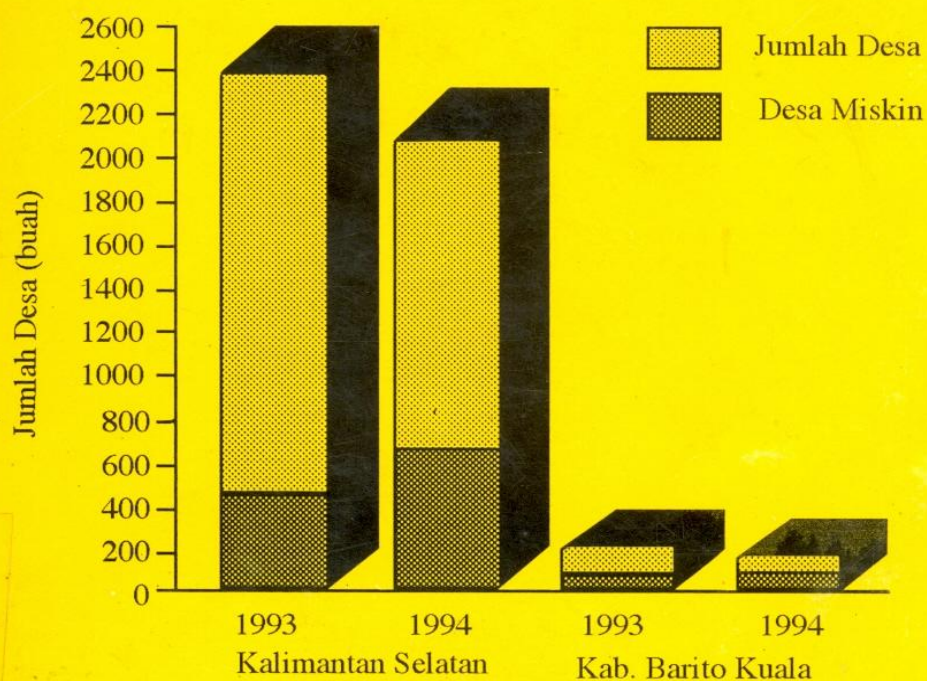


STUDI KEMISKINAN PEDESAAN DI LAHAN PASANG SURUT KALIMANTAN SELATAN



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PANGAN LAHAN RAWA

1 9 9 6

1046
5

No. KLAS 339.11/255/
No. 85/balitra/4/1/1
Tgl. 5-6-76
HARIAN MELI TEL Mandiah

STUDI KEMISKINAN PEDESAAN DI LAHAN PASANG SURUT KALIMANTAN SELATAN

632 16 (911.22)
BAL
S

Penyunting :

M. Yusuf Maamun
Silvia Sunarno
Yanti Rina

Redaksi Pelaksana :

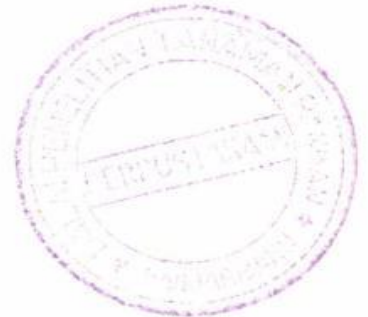
Sjachrani A.

Setting/Layouting :

Edi Supriyadi
Murzani

Desain Kulit :

Hairu Susanto



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PANGAN LAHAN RAWA

1 9 9 6

ISBN : 979-8253-28-0

KATA PENGANTAR

Sampai saat ini di Indonesia masih terdapat lebih kurang 27 juta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sebagian besar adalah masyarakat petani. Kemiskinan membuat terbatasnya kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia, sehingga dapat menjadi kendala untuk peningkatan produksi pertanian sebagai basis dari perekonomian Indonesia saat ini.

Publikasi ini adalah hasil penelitian yang mengkaji tingkat kesejahteraan masyarakat di desa-desa berpendapatan rendah di wilayah pasang surut di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Walaupun pelaksanaan studi telah berlangsung beberapa waktu yang lalu, penyampaian informasi akhir telah dilakukan dan penerbitannya baru dapat dilaksanakan saat ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak sempurna, namun diharapkan dapat memberikan masukan didalam upaya mengentaskan kemiskinan khususnya di Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan ini Balai Penelitian Tanaman Pangan Lahan Rawa (Balittra) menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik selama pelaksanaan penelitian sampai pada penerbitan publikasi ini.

Balai Penelitian Tanaman
Pangan Lahan Rawa,
Kepala,

Dr. M. Y. Maamun, MSc
NIP. 080 020 188



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
Kemiskinan Pedesaan : Metodologi Penelitian <i>M. Djamhuri dan M. Y. Maamun</i>	1
Kemiskinan di Lahan Pasang Surut Kalimantan Selatan. <i>M. Djamhuri, Noorginayuwati, Rosita G. dan Rachmadi Ramli</i>	11
Sumber daya dan Infrastruktur di Desa Tanjung Keramat <i>Rumansjah I., Isdijanto Ar-Riza dan M. Noor</i>	35
Sumber Daya dan Infrastruktur di Desa Sukaramai. <i>Noorginayuwati, Achmadi J., dan M. Najib</i>	49
Sumber Daya dan Infrastruktur di Desa Banitan. <i>Rachmadi Ramli, Nurul Fauziati dan Agus Supriyo</i>	71
Sumber Daya dan Infrastruktur di Desa Simpang Nungki <i>Rosita G., M. Thamrin dan R. Zuraida</i>	83
Sumber Daya, Infrastruktur dan Permasalahan di Desa tertinggal Tabukan Raya, Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan <i>Hidayat Dj. Noor, Danu Ismadi Saderi dan Bambang Prayudi</i>	101

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan di Lahan Pasang Surut dan Perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan	12
2. Distribusi Pendapatan Penduduk di Lahan Pasang Surut Kalimantan Selatan, Kasus Kabupaten Barito Kuala	13
3. Persentase Pengeluaran Makanan terhadap Seluruh Pengeluaran dan Rata-rata Konsumsi Kalori Perkapita Perhari di Lahan Pasang Surut dan Perbandingannya dengan Kalimantan Selatan	14
4. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Luas Tanah yang Ditempati di Kabupaten Barito Kuala dan Perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan	15
5. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Bangunan yang Ditempati di Lahan Pasang Surut dan Perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan	15
6. Keadaan Perumahan Menurut Status Tempat Tinggal dan Luas Bangunan di Kabupaten Barito Kuala dan Perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan	16
7. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang Dipakai di Lahan Pasang Surut dan Perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan	16
8. Struktur Penduduk Menurut Pendidikan di Lahan Pasang Surut dan Perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan	17
9. Luas Tanah Menurut Jenis Penggunaannya di Kabupaten Barito Kuala dan Perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan	18
10. Hasil Analisa Tanah di Lahan Pasang Surut dan Perbandingannya dengan Lahan Tadah Hujan	19
11. Struktur Penduduk Berdasarkan Umur di Lahan Pasang Surut dan Perbandingannya dengan Kalimantan Selatan	20

12. Distribusi Penduduk Berumur Sepuluh Tahun Keatas Menurut Pendidikan di Lahan Pasang Surut dan Perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan	20
13. Distribusi Penduduk Berumur Sepuluh Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama di Lahan Pasang Surut dan Perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan	21
14. Prasarana Pendidikan di Lahan Pasang Surut dan Perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan	22
15. Fasilitas Komunikasi di Kabupaten Barito Kuala dan Perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan	23
16. Fasilitas Kesehatan/sanitasi di Lahan Pasang Surut dan Perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan	23
17. Energi Listrik di Lahan Pasang Surut dan Perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan	24
18. Fasilitas Transportasi di Lahan Pasang Surut dan Perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan	25
19. Kelembagaan Ekonomi Pedesaan di Lahan Pasang Surut dan Perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan	26
20. Banyaknya koperasi, anggota dan jumlah simpanan di Lahan Pasang Surut, dan Perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan	27
21. Keadaan Kelembagaan Penyuluhan di Lahan Pasang Surut dan Perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan	27
22. Kemampuan Kelompok tani di Lahan Pasang Surut dan Perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan	28
23. Realisasi Intensifikasi Padi Kabupaten Barito Kuala dan Perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan	29
24. Penggunaan lahan di desa Tanjung Keramat	37
25. Tingkat upah untuk usahatani padi di desa Tanjung Keramat	38

26. Hasil panen dan pendapatan petani jeruk pada berbagai umur tanaman di desa Tanjung Keramat	39
27. Struktur penduduk menurut umur di desa Tanjung Keramat	43
28. Sebaran dan persentase penduduk berdasarkan kelompok umur Desa Sukaramai	52
29. Sebaran penduduk Desa Sukaramai berdasarkan tingkat pendidikannya	52
30. Jenis pekerjaan yang menjadi sumber pendapatan utama di Desa Sukaramai	53
31. Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur di Desa Banitan, Kec. Bakumpai, Kalimantan Selatan	72
32. Penduduk berdasarkan jenis pekerjaan, Desa Banitan Kec. Bakumpai	73
33. Pendapatan sektor dan sub-sektor di Desa Banitan, Kec. Bakumpai	74
34. Curahan tenaga kerja setiap kegiatan usahatani padi di Desa Simpang Nungki, Kec. Cerbon, Kab. Batola	86
35. Biaya dan penerimaan usahatani padi pasang surut di Desa Simpang Nungki, Kec. Cerbon, Kab. Batola	88
36. Pendapatan daerah dari sektor/sub sektor didesa Simpang Nungki, Kec. Cerbon, Kab. Batola	91
37. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia dan jenis kelamin di Desa Tabukan Raya, Kec. Tabukan, Kab. Batola	103
38. Distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Tabukan Raya, Kec. Tabukan, Kab. Batola	104
39. Prasarana jalan dan sarana angkutan di Desa Tabukan Raya, Kec. Tabukan, Kab. Batola	105

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Keterkaitan antar Berbagai Faktor Penentu Kemiskinan Penduduk di Lahan Pasang Surut Kalimantan Selatan	4
2. Pendekatan Pengentasan Penduduk dari kemiskinan di Lahan Pasang Surut Kalimantan Selatan	6
3. Pendekatan Alternatif Penanggulangan Kemiskinan Penduduk di Lahan Pasang Surut	30



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Hubungan karakteristik wilayah penyebab kemiskinan dan alternatif penanggulangannya di Desa Banitan Kec. Bakumpai Kab. Batola	79
2. Rekapitulasi usulan program penanggulangan kemiskinan di Desa Banitan, Kec. Bakumpai, Kab. Batola	80
3. Usulan program pertanian terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Banitan, Kec. Bakumpai, Kab. Batola	81
4. Hubungan karakteristik wilayah penyebab kemiskinan dan alternatif penanggulangannya di Desa Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola	96
5. Usulan program penanggulangan kemiskinan di Desa Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola	99



RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Di Indonesia masalah kemiskinan muncul hampir diseluruh pelosok tanah air, termasuk di wilayah lahan rawa pasang surut Kalimantan Selatan. Hasil kajian tahun 1988 yang dilakukan oleh Kantor Statistik (BPS) bekerja sama dengan Bappeda Dati I Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa penduduk di wilayah ini diperkirakan masih terdapat 29,36% penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Oleh karena itu upaya peningkatan pendapatan penduduk difokuskan pada mereka yang tergolong penduduk miskin akan memberikan dampak yang besar bagi kemajuan pembangunan.
2. Tingkat kemiskinan individu atau sekelompok penduduk yang tinggal di suatu wilayah merupakan hasil akhir kemampuan pelaku ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan tersedia, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur dan kelembagaan. Kemiskinan itu sendiri dapat menurunkan kuantitas dan kualitas sumber daya ekonomi, oleh karena itu program penanggulangan kemiskinan di suatu wilayah perlu diupayakan dengan (1) memahami karakteristik kemiskinan, (2) identifikasi penyebabnya dan (3) mencari alternatif penanggulangannya.
3. Pendekatan dalam mencari alternatif upaya penanggulangan kemiskinan didasari atas pendekatan pragmatis yakni berorientasi pada pemecahan masalah nyata. Dan salah satu metode penelitian kemiskinan yang cukup baik untuk digunakan adalah "integrasi" antara studi referensi dan pemahaman pedesaan dalam waktu singkat (PPWS). Studi referensi dilakukan sebelum PPWS dilaksanakan.
4. Di wilayah lahan rawa pasang surut Kalimantan Selatan, persentasi penduduk yang hidup dibawah kemiskinan pada tahun 1988 mencapai 29,36% dan pada tahun 1993 terjadi penurunan menjadi 18,61%. Penyebab utama kemiskinan tersebut adalah ketidakmampuan penduduk dalam memanfaatkan lahan yang marginal sehingga berakibat ketidakmampuan memenuhi

kebutuhan akan pangan, pakaian, papan, pendidikan dan kesehatan secara layak. Upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangnya adalah dengan pengelolaan air pasang surut, diversifikasi usahatani, rekayasa teknik budidaya tanaman dan sosial ekonomi. Studi kemiskinan ini dilakukan pada lima desa di kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

5. Kemiskinan penduduk desa Tanjung Keramat dicirikan oleh rendahnya pendapatan perkapita (Rp 115.375/kap/th), status gizi, tingkat pendidikan dan kualitas perumahan serta tingginya tingkat kematian anak balita (80 orang-dalam 1000 kelahiran). Penyebabnya adalah terbatasnya diversifikasi usahatani ataupun usahatani masih bersifat tradisional. Cekaman kendala bio-fisik dan kurang berfungsinya sarana/prasarana yang menunjang usahatani. Usahatani jeruk memberikan harapan yang baik untuk peningkatan pendapatan petani.
6. Tingkat kemiskinan penduduk desa Sukaramai ditandai oleh rendahnya pendapatan perkapita (Rp 173.829/kap/th), status gizi dan kualitas perumahan serta rata-rata tingkat kematian bayi (IMR) yang cukup tinggi. Penyebab kemiskinan tersebut adalah tingkat kesuburan tanah yang rendah, keracunan Al dan Fe, kegaraman, tingkat pendidikan rendah, pengalaman dan ketrampilan terbatas pada teknologi yang ada, tidak ada penataan lahan, penggunaan input rendah, dan intensitas tanaman rendah. KUD serta kelompok tani tidak berfungsi. Oleh karena itu upaya yang perlu dilakukan untuk penanggulangan masalah tersebut adalah pengaturan tata air, varietas unggul, pemupukan, penataan lahan, meningkatkan intensitas tanam dan mengaktifkan KUD dan kelompok tani.
7. Tingkat kesejahteraan di desa Banitan termasuk masih rendah yang dicirikan dengan rendahnya tingkat pendapatan (Rp.182.122/kap/th), kesehatan, pendidikan dan kualitas perumahan. Penyebabnya adalah belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam, karena kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang seperti sarana pengendalian air di persawahan, tidak tersedianya pelayanan kredit dan penyuluhan. Upaya untuk penanggulangan

kemiskinan yaitu dengan meningkatkan dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan untuk memacu kegiatan perekonomian masyarakat. Sumberdaya alam yang berpotensi untuk dikembangkan adalah sub sektor tanaman pangan, perikanan dan peternakan.

8. Rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk di desa Simpang Nungki ditandai oleh rendahnya pendapatan perkapita (Rp.220.136/kap/th), kesehatan, pendidikan, kualitas perumahan dan konsumsi kalori serta tingginya tingkat kematian bayi. Penyebab kemiskinan tersebut adalah merupakan akumulasi rendahnya kemampuan dan ketrampilan penduduk, belum lancarnya arus barang dan jasa, serta kebijakan pemerintah setempat yang menerapkan sistem prioritas karena keterbatasan dana, dan petugas di lapangan. Upaya penanggulangannya adalah peningkatan fasilitas jalan, transportasi, listrik dan kesehatan serta koordinasi terpadu dari instansi terkait dan pelayanan aparat/petugas yang lebih intensif dan berkesinambungan.
9. Tingkatan kemiskinan penduduk Tabukan Raya dicirikan oleh rendahnya pendapatan perkapita (Rp 136.000/kap/th) dan tingkat kesehatan penduduk sehat, ketersediaan infrastruktur yang belum memadai. Keadaan ini disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keadaan sumber daya biofisik yang bermasalah.
10. Rendahnya tingkat pendapatan perkapita penduduk di wilayah studi menyebabkan rendahnya kemampuan dan akses penduduk terhadap kebutuhan dasar (makanan bergizi, pakaian, kesehatan, pendidikan dan perumahan). Sumberdaya yang tersedia perlu didekati dengan teknologi. Oleh karena itu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan ketrampilan, pengetahuan dan teknologi. Kesemuanya memerlukan kebijaksanaan dan penanganan yang sungguh-sungguh.

KEMISKINAN PEDESAAN : METODOLOGI PENELITIAN

M. Djamhuri dan M. Y. Maamun

PENDAHULUAN

Walaupun Indonesia telah berhasil meningkatkan taraf hidup rakyatnya, namun untuk menurunkan jumlah penduduk miskin masih perlu terus diupayakan. Menurut Bank Dunia (1990) selama periode tahun tujuh puluhan sampai delapan puluhan Indonesia telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 60% menjadi 20%. Ini berarti bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 179,3 juta jiwa (Sensus Penduduk 1990), pada saat ini masih terdapat sekitar 35,8 juta penduduk yang tergolong miskin. Persoalan ini dapat menghambat proses pembangunan selanjutnya. Selain itu juga akan menurunkan produktifitas dan kualitas sumberdaya manusia.

Di Indonesia persoalan kemiskinan muncul hampir di seluruh pelosok tanah air, termasuk di lahan pasang surut Kalimantan Selatan. Hasil kajian yang dilakukan oleh Kantor Statistik (BPS) bekerja sama BAPPEDA Propinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa pada lahan ini diperkirakan masih terdapat 29,36% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu upaya peningkatan pendapatan penduduk yang difokuskan pada mereka yang tergolong penduduk miskin akan memberikan dampak yang besar bagi kemajuan pembangunan. Hal ini dikarenakan secara makro kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat meningkat, keterbelakangan berkurang dan pembagian pendapatan semakin merata. Dalam konteks memperkuat landasan pembangunan, keberhasilan ini akan meningkatkan mobilitas sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tingkat kemiskinan suatu individu atau sekelompok penduduk, yang tinggal di suatu wilayah, merupakan hasil akhir kemampuannya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi yang tersedia, baik sumberdaya manusia, sumber daya alam maupun infrastruktur fisik dan infrastruktur sosial. Pada giliran berikutnya, kemiskinan itu sendiri akan menurunkan kuantitas dan kualitas sumberdaya ekonomi tersebut. Seberapa jauh "lingkaran setan" ini terus berputar sangat tergantung pada upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan, yang mana ketepatan strategi yang digunakan dan program yang diusulkan sangat ditentukan oleh

kejelian, kecermatan dan ketelitian mengidentifikasi sumberdaya ekonomi yang dikuasai kelompok penduduk miskin tersebut.

Dalam konstelasi upaya untuk mengentaskan penduduk dari kemiskinan, umumnya ada tiga tujuan pokok yang secara bertahap akan dicapai dalam penelitian kemiskinan di kawasan lahan pasang surut, yaitu:

1. Mengetahui tingkat kemiskinan penduduk di lahan pasang surut berdasarkan pendapatan perkapita, status gizi, tingkat kesehatan, keadaan perumahan, pendidikan dan pengeluaran untuk konsumsi pangan.
2. Melakukan identifikasi dan karakterisasi jumlah dan mutu sumberdaya ekonomi (economic resources) dan infrastruktur yang dapat digali dan dialokasikan untuk menanggulangi kemiskinan, yang meliputi : sumber daya alam, sumberdaya manusia, infrastruktur dan kelembagaan.
3. Mendapatkan alternatif pemecahan masalah kemiskinan di wilayah lahan pasang surut melalui peningkatan jumlah dan kualitas sumberdaya dan infrastruktur.

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut akan dapat diperoleh suatu priskripsi alternatif untuk mengentaskan penduduk dari kemiskinan yang sesuai dengan kondisi fisik lahan dan kondisi sosial ekonomi penduduk miskin di wilayah pasang surut.

KONSEP KEMISKINAN

Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Mubyarto, 1981). Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan akan pangan, pakaian, papan dan kebutuhan sosial lainnya.

Pemenuhan kebutuhan dasar sangat tergantung dari tingkat pendapatan keluarga/masyarakat. Tingkat pendapatan ini menentukan daya beli, dalam artian semakin tinggi tingkat pendapatan semakin tinggi pula kemampuan untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atas dasar pengertian ini, mereka yang tergolong miskin pada dasarnya adalah keluarga/masyarakat yang pendapatannya sangat rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Terdapat beberapa kriteria kelayakan suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, atau penentuan "garis kemiskinan". Sajogyo (1974) me-

mentukan dengan ukuran pendapatan ekuivalen beras. Penduduk berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatannya dibawah 240 kg perkapita pertahun bagi daerah pedesaan atau 360 kg perkapita per tahun bagi daerah perkotaan. Sumitro Djojohadikusumo (1975) menggunakan patokan pendapatan, yaitu \$ 75 per kapita pertahun. Di samping itu masih terdapat berbagai ukuran lain, seperti yang dibuat oleh Biro Pusat Statistik, Anne Booth dkk, dan Mahar Manghaas, dkk.

Penggunaan pendapatan per kapita untuk mengukur tingkat kemiskinan suatu wilayah banyak mengandung kelemahan. Oleh karena itu beberapa peneliti melengkapi dengan indikator lain untuk mengukur mutu kehidupan fisik ini, antara lain status gizi, tingkat konsumsi pangan, pemilikan barang-barang tahan lama, konsumsi energi listrik, kualitas rumah, sumber air bersih, kelancaran transportasi dan komunikasi dengan wilayah pusat pertumbuhan.

Dengan demikian, indikator agregate yang digunakan untuk menganalisis tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah adalah: (1) pendapatan perkapita, (2) kualitas rumah, (3) pendidikan anak, (4) tingkat kesehatan, (5) status gizi dan (6) kematian balita. Dengan asumsi bahwa semua indikator mempunyai peran yang sama dalam pengukuran wilayah miskin, maka keempat indikator tersebut tidak diberi bobot. Indikator ini tidak ditujukan untuk mengkaji nilai garis kemiskinan, tetapi ditujukan untuk mencari pemecahan masalah kemiskinan di suatu wilayah, dalam artian mencari upaya meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat miskin.

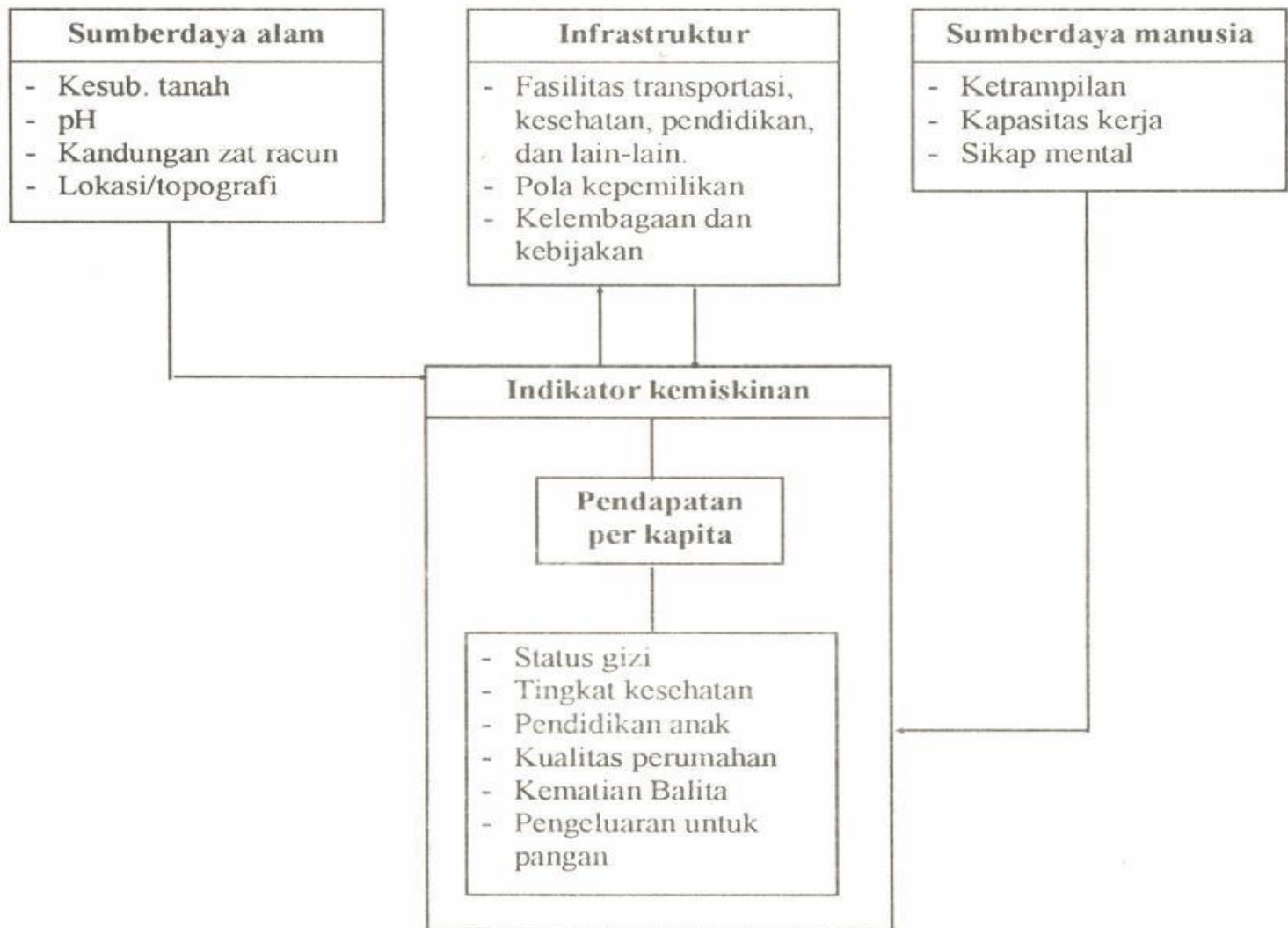
FAKTOR PENENTU KEMISKINAN

Tingkat kemiskinan suatu keluarga atau masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yang dapat dibagi menjadi faktor-faktor yang sifatnya umum, misalnya kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik (Prisma, 1976), dan faktor-faktor yang sifatnya subyektif. Faktor yang terakhir ini menyangkut kapasitas keluarga atau masyarakat itu dalam memanfaatkan sumberdaya yang dikuasai.

Jenis, mutu dan jumlah faktor penentu kemiskinan bervariasi dari satu individu ke individu lainnya dan dari satu tempat ke tempat lain. Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan penduduk di suatu wilayah meliputi kualitas sumberdaya fisik lahan, sumberdaya manusia, teknologi, sarana/prasarana dan kelembagaan. Kualitas fisik lahan yang rendah menyebabkan rendahnya produktifitas, sehingga tidak dapat mendukung kehidupan yang layak di daerah yang

bersangkutan. Kemiskinan penduduk dapat pula bersumber dari tatanan kelembagaan yang kurang mendukung pemerataan pembagian pendapatan.

Selanjutnya, kemiskinan juga dapat disebabkan oleh terisolirnya suatu wilayah sehingga ongkos transaksi dengan pihak luar menjadi mahal, akibatnya transaksi ekonomi jarang terjadi. Masih banyak lagi akar penyebab yang perlu diketahui. Pengetahuan tersebut sangat penting mengingat implikasinya yang sangat besar terhadap kebijakan pengentasan penduduk dari kemiskinan. Gambaran yang agak menyeluruh tentang faktor penentu tingkat kemiskinan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Keterkaitan antar Berbagai Faktor Penentu Kemiskinan Penduduk di Lahan Pasang Surut Kalimantan Selatan.

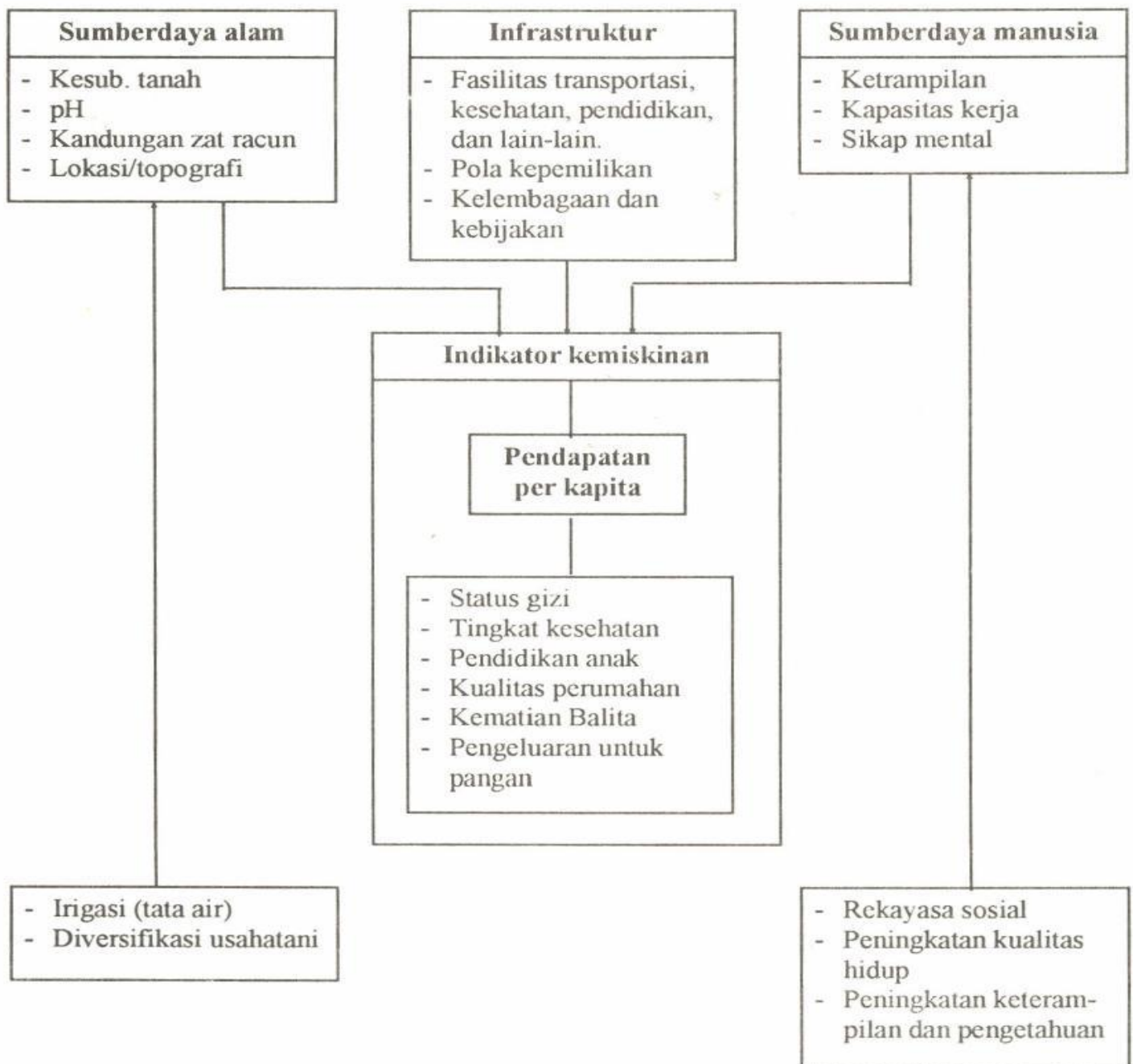
PENDEKATAN UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN

Dalam penelitian ini pendekatan alternatif untuk menanggulangi kemiskinan penduduk di lahan pasang surut bersifat komprehensif dan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan pragmatis. Dengan cara demikian preskripsi alternatif yang diperoleh dapat diuji keterandalannya di lapangan. Sehingga, disamping dapat diuji berdasarkan kaidah kejelasan atau konsistensi juga diharapkan dapat diuji berdasarkan kaidah keberhasilan (*workability*).

Pendekatan alternatif untuk menanggulangi kemiskinan penduduk sangat tergantung karakteristik yang melekat pada sumberdaya dan infrastruktur yang dimiliki penduduk tersebut. Karakteristik sumberdaya dan infrastruktur ini bersifat heterogen, variatif dan selalu berubah dari waktu ke waktu.

Penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada golongan melarat atau golongan yang berpendapatan sangat rendah (kurang dari Rp 25.000,-/kapita/perbulan). Golongan ini biasanya hidup dengan kualitas hidup yang sangat rendah dan tinggal pada lingkungan yang buruk (daerah kumuh). Oleh karena itu di samping membahayakan dirinya sendiri juga berbahaya bagi lingkungan keluarganya dan keluarga lainnya. Hal ini bisa terjadi mengingat lingkungan yang buruk biasanya menjadi sarang penyakit menular dan sejenisnya.

Sesuai dengan karakteristik yang melekat pada sumber daya dan infrastruktur di lahan pasang surut, upaya alternatif untuk menanggulangi kemiskinan penduduk yang diduga memiliki keterandalan cukup tinggi adalah perbaikan tata air dan diversifikasi usahatani yang didukung oleh berbagai rekayasa sosial ekonomi. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, rekayasa sosial ekonomi memiliki fungsi ganda, yaitu untuk mendukung rekayasa biofisik dan peningkatan mutu hidup (Gambar 2).



Gambar 2. Pendekatan Pengentasan Penduduk dari kemiskinan di Lahan Pasang Surut Kalimantan Selatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Agar diperoleh hasil identifikasi sumberdaya dan infra struktur penentu kemiskinan dilahan pasang surut, maka penelitian kemiskinan sebaiknya menggunakan "zona agro ekosistem". Tingkat kemiskinan diterangkan dengan menggunakan suatu indek majemuk (composite index) dari sekelompok indikator sosial ekonomi, antara lain (1) status gizi, (2) tingkat kesehatan, (3) tingkat kematian balita, (4) tingkat pendidikan, (5) kualitas perumahan, dan (6) pendapatan per kapita.

Tahapan kegiatan penelitian meliputi studi referensi (desk study) dan pemahaman pedesaan dalam waktu singkat (PPWS).

1. Studi Referensi.

Studi ini dimaksudkan sebagai penuntun dalam pelaksanaan studi lapang pada waktu PPWS. Dengan menggunakan informasi awal yang diperoleh dapat dilakukan uji silang (cross check) di lapang sehingga hasil PPWS menjadi lebih akurat.

Studi referensi diawali dengan pengumpulan data dan informasi naratif yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder yang diperoleh, baik dalam bentuk publikasi maupun yang belum dipublikasikan, kemudian dievaluasi, dianalisa, dan diinterpretasi secara tajam. Informasi yang bersifat naratif juga dikaji dan dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai.

Studi referensi ini dilaksanakan oleh suatu tim interdisiplin yang meliputi pakar biofisik, seperti ilmu tanah, agronomi, pemuliaan tanaman dan hama penyakit, maupun sosial ekonomi, baik sosiologi pedesaan maupun ekonomi pertanian. Dengan demikian semua informasi yang relevan akan terjaring, teranalisis dan dapat diinterpretasikan secara lengkap dan tepat. Hasil yang diperoleh digunakan sebagai acuan tahapan penelitian berikutnya.

2. Rapid Rural Apraisal.

Rapid Rural Apraisal (RRA) atau Pemahaman Pedesaan dalam Waktu Singkat (PPWS) merupakan kegiatan penelitian yang sistematis agak terstruktur, dilaksanakan oleh tim antar disiplin dan dirancang untuk mendapatkan informasi baru. Dalam penelitian ini obyek yang dipilih adalah persoalan kesejahteraan penduduk di lahan pasang surut, khususnya di Propinsi Kalimantan Selatan.

Metode PPWS memiliki berbagai keunggulan, antara lain penggambaran dilakukan dengan pendekatan "sistem", sehingga unsur- unsur pokok dari obyek yang diamati dan interaksi sesamanya dapat diperhatikan secara cermat. Di samping itu, dalam PPWS pendekatan dan pengkerabatan kerja dilakukan secara multidisiplin, pemahaman dilakukan secara cepat dan berkembang, bersifat penggalan (exploratory) dan perulangan (iterative), menggunakan pengetahuan asli, fleksibel dan menggunakan penilaian yang tepat.

Penelitian diawali dengan penentuan topik. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke petani untuk melakukan diskusi secara umum, hasilnya kemudian didiskusikan dengan sesama anggota team. Tahapan berikutnya adalah kembali kelapangan dengan kwesioner yang sudah lengkap. Hasil yang diperoleh didiskusikan lagi dengan sesama anggota tim. Kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang. Tahapan terakhir adalah seminar dan pembuatan laporan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian pada tahapan ini, yaitu berupa pre-skripsi alternatif untuk meningkatkan pendapatan penduduk yang tergolong miskin, diharapkan dapat diuji keberhasilannya (workability) melalui penelitian lapangan (on-farm research), kemudian dilanjutkan dengan penelitian pengembangan dalam skala yang lebih luas, sehingga diperoleh rekomendasi tentang penanggulangan kemiskinan yang benar-benar sudah teruji keberhasilannya di lapangan secara baik.

KESIMPULAN

1. Masalah kemiskinan khususnya dilahan pasang surut perlu mendapatkan pemecahan segera. Hal ini dikarenakan persoalan ini dapat menghambat proses pembangunan selanjutnya, selain itu akan menurunkan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia.
2. Untuk memecahkan persoalan kemiskinan di lahan pasang surut perlu dikaji secara mendalam baik mengenai tingkat kemiskinan itu sendiri maupun berbagai faktor penentunya, seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia dan infrastruktur. Kajian ini akan menghasilkan rumusan kebijakan untuk mengentaskan penduduk dari kemiskinan.
3. Salah satu metode penelitian kemiskinan yang paling tepat untuk digunakan adalah "integrasi" antara studi referensi dan pemahaman pedesaan dalam waktu singkat (PPWS). Studi referensi dilakukan sebelum PPWS dilak-

sanakan. Untuk operasionalisasi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan "action research".

4. Studi kemiskinan di Kalimantan Selatan masih terbatas kepada daerah-daerah tertentu. Namun pengembangan hasil studi dapat meliputi wilayah yang lebih luas di ekosistem lahan rawa dimana masyarakat miskin berada relatif homogen.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Dunia, 1990. What Do We Know About The Poor ? *Dalam:* World Development Report. The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank. Washington.
- BPS, 1990. Sensus Penduduk 1990, Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- Mubyarto, 1981. Program Pemerataan. Tujuan dan Pengalaman. *Dalam:* Politik Pertanian. Yayasan OBOR. Jakarta.
- Prisma, 1976. Pemerataan Pendapatan Masyarakat; Impian atau Keharusan ? (Pe-ngantar Redaksi). LP3ES. Jakarta.
- Sajogyo, 1974. Usaha Perbaikan Gizi Keluarga. Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sumitro Djoyohadikusuma, 1975. Indonesia Menuju Tahun 2000. PRISMA, No. 2, April 1975. LP3ES. Jakarta.



KEMISKINAN DI LAHAN PASANG SURUT KALIMANTAN SELATAN

M. Djamhuri, Noorginayuwati, Rosita G., dan Rachmadi R.

PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan muncul hampir diseluruh pelosok tanah air, utamanya di kawasan lahan marginal, termasuk lahan pasang surut.

Di Kalimantan Selatan, persoalan kemiskinan di lahan pasang surut sangat menonjol. Hasil kajian yang dilakukan oleh kantor Statistik (BPS) bekerjasama BAPPEDA setempat menunjukkan bahwa pada lahan ini diperkirakan masih terdapat 29,3% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan penduduk umumnya terjadi karena masih terbatasnya kemampuan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang dikuasai, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur maupun kelembagaan. Akibatnya pendapatan mereka sangat rendah sehingga tidak mampu membeli kebutuhan pokoknya (Mubyarto, 1981).

Paper ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kemiskinan penduduk di lahan pasang surut. Analisis ditekankan pada tingkat kemiskinan itu sendiri, baik mengenai pendapatan per kapita, pengeluaran untuk pangan, kualitas perumahan, keadaan kesehatan maupun tingkat pendidikan. Disamping itu diuraikan juga karakteristik faktor penentu kemiskinan dan alternatif cara penanggulangannya.

Kabupaten Barito Kuala digunakan sebagai fokus pengamatan karena hampir seluruh wilayah kabupaten ini merupakan lahan pasang surut.

PERSPEKTIF KEMISKINAN DI LAHAN PASANG SURUT

1. Pendapatan Perkapita

Lahan pasang surut dicirikan oleh kondisi yang "serba marginal", terutama dari segi kualitas sumber daya alam. Areal tanahnya luas (man/land ratio sangat rendah), tetapi kurang subur, pH rendah dan bahkan kadang-kadang mengandung zat racun yang sangat mengganggu pertumbuhan tanaman. Akibatnya produk-

tivitas tanaman sangat rendah, demikian pula pendapatan yang diperoleh petani. Dengan mengambil sampel Kabupaten Barito Kuala, hasil pengumpulan data melalui studi referensi menunjukkan bahwa di lahan pasang surut Kalimantan Selatan rata-rata pendapatan penduduk sebesar Rp 54.823,48/kap/bln. Angka ini masih lebih rendah dibanding Propinsi Kalimantan Selatan pada umumnya, dimana pendapatan mencapai Rp 55.233,4/kap/bln.

Persoalan pokok dalam struktur pendapatan penduduk di lahan pasang surut adalah distribusi pendapatan yang kurang merata, baik distribusi antar golongan, sektoral maupun regional. Pada Tabel 1 terlihat bahwa pada daerah ini terdapat 5,68% rumah tangga yang pendapatan kurang dari Rp 25.000,-/bulan. Angka ini cukup tinggi dibanding Propinsi Kalimantan Selatan pada umumnya, yaitu 1,88%. Prosentase rumah tangga yang pendapatannya diantara Rp 25.000,- dan Rp 30.000,- juga cukup tinggi, yaitu 10,76%. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa di daerah ini persoalan penduduk berpendapatan rendah cukup serius.

Tabel 1. Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan di Lahan Pasang Surut dan Perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Kelompok Pendapatan (x Rp 1000/bln)	Lahan Pasang Surut (%)	Kalimantan Selatan Umumnya (%)
Kurang dari 25	5,68	1,88
25 - 30	5,18	2,84
30 - 40	5,58	6,57
40 - 50	10,08	12,85
50 - 75	19,69	22,58
75 - 100	21,41	22,31
100 - 150	18,69	17,77
150 - 200	7,36	7,89
200 - 400	4,08	4,24
400 lebih	2,25	1,07
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Kantor Statistik Prop. Kalimantan Selatan, 1988

Ditinjau dari sektor ekonomi, walaupun tersedia lahan yang cukup luas, penduduk yang bekerja di sektor pertanian memperoleh pendapatan paling rendah dibanding sektor-sektor lainnya. Rata-rata pendapatan petani per bulan Rp 116.345,-/rumah tangga, atau Rp 25.970,-/jiwa. Angka-angka ini berturut-turut hanya 78,54 dan 74,16% dari pendapatan per bulan rata-rata kabupaten.

Distribusi pendapatan regional antar kecamatan secara lengkap disajikan pada Tabel 2. Pada tabel tersebut terlihat bahwa Kecamatan Alalak menempati peringkat pertama dalam hal tingginya pendapatan per rumah tangga, sedikitnya

prosentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dan besarnya angka gini ratio. Fenomena ini terjadi karena Kecamatan Alalak merupakan "kawasan industri", sehingga walaupun distribusi pendapatan kurang merata tetapi karena pendapatan perkapita tinggi prosentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tetap rendah. Lain halnya dengan kecamatan Kuripan, pendapatan per rumah tangga penduduk di kecamatan ini hanya sebesar Rp 88.373,-/bulan, walaupun pembagian pendapatan cukup merata (Gini ratio = 0,1803) tetapi prosentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan cukup tinggi. Dengan demikian tampak bahwa jumlah penduduk berpendapatan rendah ditentukan secara bersama oleh tingkat pendapatan per kapita dan pemerataan pembagian pendapatan.

Tabel 2. Distribusi Pendapatan Penduduk di Lahan Pasang Surut Kalimantan Selatan, Kasus Kabupaten Barito Kuala.

Kecamatan	Pendapatan per rumah tangga (Rp/bln)	% penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan	Gini Ratio
1. Anjir Muara	81.871	26,60	0,18
2. Anjir Pasar	142.619	19,86	0,26
3. Tabukan	133.531	20,86	0,19
4. Belawang	124.798	46,12	0,28
5. Cerbon	128.719	18,23	0,17
6. Kuripan	88.373	34,04	0,18
7. Bakumpai	144.122	32,41	0,24
8. Alalak	399.063	7,00	0,48
9. Barambai	119.749	21,29	0,16
10. Rantau Badauh	125.634	44,16	0,45
11. Mandastana	109.550	12,89	0,13
12. Mekarsari	119.743	30,65	0,16
13. Tabunganen	110.256	18,12	0,21
14. Tamban	158.919	37,33	0,41
Barito Kuala	148.123,41	29,36	0,35

Sumber : Kantor Statistik Prop. Kalimantan Selatan, 1988

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa penduduk miskin tersebar hampir diseluruh kecamatan dengan persentase yang berbeda. Persentase tertinggi terdapat di Kecamatan Belawang (46,12%), kemudian diikuti oleh Kecamatan Rantau Badauh (44,16%), Kecamatan Tamban (37,3%), Kecamatan Kuripan (34,04%) dan kecamatan Bakumpai (32,41%).



2. Pengeluaran untuk Pangan

Bagian pendapatan yang digunakan untuk konsumsi pangan cukup tinggi pada tingkat pendapatan yang rendah. Pangan merupakan kebutuhan dasar fisiologis yang paling utama, dan oleh karena itu, kebutuhan ini akan dipenuhi lebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan lainnya.

Pada Tabel 3 dampak dari tingkat pendapatan yang rendah di lahan pasang surut menyebabkan persentase pengeluaran untuk konsumsi pangan relatif cukup tinggi, sebesar 77,99% (lebih tinggi dibanding Propinsi Kalimantan Selatan). Konsumsi kalori juga cukup tinggi, yaitu 2.103,59 kalori/hari.

Tabel 3. Persentase pengeluaran makanan terhadap seluruh pengeluaran dan rata-rata konsumsi kalori perkapita perhari di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Kalimantan Selatan.

No. Uraian	Lahan Pasang Surut (%)	Kalimantan Selatan Umumnya (%)
1. % pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran.	77,99	71,90
2. Konsumsi kalori/hari		
- di rumah	1.99	1.88
- di luar rumah	0,12	0,20
- seluruhnya	2.10	2.08

Sumber : Kantor Statistik Prop. Kalimantan Selatan, 1988

3. Kualitas Perumahan

Kualitas perumahan di lahan pasang surut pada umumnya kurang memenuhi persyaratan kesehatan. Dari luas hunian yang 33,98% rumah tangga penduduk memiliki luas tanah untuk perumahan kurang dari 60 m² dan hanya 25,36% di atas 100 m² (Tabel 4).

Tabel 4. Persentase rumah tangga berdasarkan luas tanah yang ditempati di Kabupaten Barito Kuala dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Luas Tanah	Barito Kuala (%)	Kalimantan Selatan (%)
<20 m ²	0,36	3,33
20 - 59 m ²	33,62	33,40
60 - 99 m ²	40,66	29,56
100 - 200 m ²	21,44	24,08
>200 m ²	3,92	9,63
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Kantor Statistik Prop. Kalimantan Selatan.

Keadaan perumahan penduduk pada umumnya masih sederhana, 45,73% mempunyai luas rumah kurang dari 40 m² dan hanya 5,50 yang luas rumahnya lebih dari 80 m².

Tabel 5. Persentase rumah tangga menurut luas bangunan yang ditempati di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Keterangan	Lahan pasang surut (%)	Kalimantan Selatan Umumnya (%)
<20 m ²	4,82	7,86
20 - 40 m ²	40,91	38,76
40 - 60 m ²	32,76	28,21
60 - 80 m ²	16,01	17,10
>80 m ²	5,50	8,07
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Kantor Statistik Prop. Kalimantan Selatan, 1988

Sebagian besar rumah merupakan milik pribadi (92,43%), 3,39% berstatus rumah dinas, dan 1,61% berupa rumah sewa/kontrak, serta 2,50% berstatus lainnya. Gambaran tentang status tempat tinggal rumah tangga penduduk di lahan pasang surut ini secara lengkap disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Keadaan perumahan menurut status tempat tinggal dan luas bangunan di Kabupaten Barito Kuala dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan

Keterangan	Barito Kuala (%)	Kalimantan Selatan (%)
Milik sendiri	92,43	88,82
Sewa/kontrak	1,61	5,90
Kredit/beli	0,07	0,31
Dinas	3,39	2,71
Lainnya	2,50	2,26
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Kantor Statistik Prop. Kalimantan Selatan.

4. Keadaan Kesehatan

Umumnya penduduk di lahan pasang surut menggunakan sumber air minum dari sungai/danau yang tidak terjamin kebersihannya. Hanya sebagian kecil penduduk yang menggunakan sumber air minum yang lebih sehat (Tabel 7).

Tabel 7. Persentase rumah tangga menurut sumber air minum yang dipakai di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Keterangan	Lahan pasang surut (%)	Kalimantan Selatan (%)
PAM/PDAM	0,79	13,19
Mata air	-	0,37
Sumur pompa	2,89	0,43
Sumur perigi	4,22	32,88
Sungai/danau	86,71	37,04
Lainnya	5,39	1,09
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Kantor Statistik Prop. Kalimantan Selatan, 1989

5. Tingkat Pendidikan

Indikator lainnya yang menggambarkan tingkat kemiskinan penduduk adalah tingkat pendidikan. Pada Tabel 8 terlihat bahwa tingkat pendidikan penduduk di lahan pasang surut umumnya lebih rendah dibanding Propinsi Kalimantan Selatan umumnya. Proporsi penduduk yang tidak/belum bersekolah dan tidak/belum tamat SD masih cukup tinggi, masing-masing sebesar 29,24 dan

45,60%. Untuk Propinsi Kalimantan Selatan kedua angka ini hanya 23,63 dan 39,5%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di wilayah ini relatif ketinggalan dibanding daerah lainnya.

Tabel 8. Struktur penduduk menurut pendidikan di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Keterangan	Barito Kuala (%)	Kalimantan Selatan (%)
Tidak/belum sekolah	29,24	23,63
Tidak/belum tamat SD	45,60	39,50
Tamat SD	17,04	23,19
Tamat SLTP	4,58	7,30
Tamat SLTA	3,27	5,78
Tamat Akademi	0,17	0,35
Tamat Universitas	0,10	0,25
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Kantor Statistik Prop. Kalimantan Selatan, 1988.

III. FAKTOR PENENTU KEMISKINAN

1. Sumberdaya Alam

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa lahan pasang surut masih dalam "kondisi marginal", sehingga daya dan hasil gunanya sangat terbatas. Hal ini mendorong penduduk untuk tidak menggunakan lahan ini secara maksimal. Tabel 9 menunjukkan bahwa pada kawasan ini lahan yang dimanfaatkan untuk sawah beririgasi teknis dan setengah teknis belum ada. Sawah berpengairan sederhana, seluas 2.275 ha, atau 2,37% dari luas sawah seluruhnya. Yang paling dominan adalah sawah pasang surut, dengan luasan mencapai 77.571 ha. Rendahnya pendayagunaan lahan pasang surut ditandai pula oleh masih banyaknya sawah yang sementara tidak diusahakan, ditaksir seluas 15.824 ha, atau 16,54% dari luas sawah yang ada.

Tabel 9. Luas tanah menurut jenis penggunaannya di Kabupaten Barito Kuala dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Jenis penggunaan	Barito Kuala (ha) (*)		Kalimantan Selatan (ha) (*)	
Tanah Sawah :		98.506		503.823
1. Irigasi teknis	-	-	8.540	9.751
2. Irigasi 1/2 teknis	-	-	3.811	3.829
3. Irigasi sederhana	2.275	-	10.402	9.345
4. Irigasi non PU	-	-	11.246	10.762
5. Tadah Hujan	-	-	112.037	141.585
6. Pasang Surut	77.571	83.928	129.874	138.364
7. Tanah sawah lebak	-	-	47.717	64.997
8. Tanah sawah yang tidak diusahakan	15.824	14.578	100.609	125.190
Tanah kering :		200.569		3.194.727
1. Tanah untuk bangunan	15.218	15.742	90.454	122.166
2. Tegal/kebun rakyat	15.160	9.683	279.280	145.801
3. Padang rumput	17.000	11.012	-	151.620
4. Rawa-rawa	34.905	24.922	-	425.567
5. Kolam/Tambak/empang	35.000	192	9.661	9.855
6. Tanah kering yang tidak diusahakan	5.971	4.111	243.410	187.404
7. Ladang/huma	1.084	-	-	121.039
8. Tanah yang ditanami kayu-kayuan	30.066	29.402	1.979.764	-
9. Hutan negara	79.657	41.775	-	517.930
10. Perkebunan	10.430	12.082	249.165	289.068
11. Lain-lain	11.483	51.648	-	921.247
Jumlah	204.026	299.075	3.291.482	3.698.550

Sumber : 1. Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Barito Kuala

2. Laporan Tahunan Dinas 1990/91. Sub Dinas Bina Program Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Kalimantan Selatan

*) Laporan Tahunan Dinas 1992/93. Sub Dinas Bina Program Diperta Tk I Kalimantan Selatan.

Kesuburan tanah umumnya sangat rendah, menunjukkan bahwa dibanding dengan sawah tadah hujan, kandungan unsur N, K, dan bahan organik dalam tanah lebih tinggi, tetapi kandungan unsur P, Ca dan Mg jauh lebih rendah. Disamping itu pH tanah di lahan pasang surut juga lebih rendah, menunjukkan bahwa kesuburan tanah di lahan pasang surut relatif lebih rendah dari sawah tadah hujan.

Tabel 10. Hasil analisa tanah di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan lahan tadah hujan

Indikator	L a h a n	
	Pasang Surut	Tadah Hujan
pH	3,938	5,186
EC (mm/hos/cm)	415,470	-
N (%)	0,222	0,121
C-org (%)	8,826	2,160
P (pp)	1,160	3,230
K (me/100 g)	0,263	0,137
Ca (me/100 g)	0,860	9,339
Mg (me/100 g)	1,732	4,661
Al (me/100 g)	10,500	1,885
CTC (me/100 g)	37,680	19,11

Sumber : Laporan Tahunan Dinas 1990/1991. Sub Dinas Bina Program Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Kalimantan Selatan

Kandungan unsur hara yang rendah dan pH yang jauh dibawah netral mengisyaratkan bahwa tata air (water management) mutlak perlu dilakukan di lahan pasang surut. Disamping itu, untuk meningkatkan kesuburan tanah perlu dilakukan diversifikasi usahatani.

2. Sumber daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia disuatu wilayah dapat dilihat dari struktur umur, kegiatan utama dan tingkat pendidikan penduduk. Tabel 11 menunjukkan, bahwa dibanding Kalimantan Selatan pada umumnya struktur penduduk di lahan pasang surut hampir sama. Penduduk berumur 13 tahun keatas sudah mampu bekerja, 65,86% penduduk berstatus angkatan kerja. Ini berarti setiap satu orang angkatan kerja mampu menghidupi 1,52 penduduk (termasuk dirinya sendiri). Struktur demikian menunjukkan bahwa sumber daya manusia di lahan pasang surut secara kuantitas cukup baik, dan tingkat ketergantungan (dependence level) penduduk rendah.



Tabel 11. Struktur penduduk berdasarkan umur di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Kalimantan Selatan.

Kelompok Umur	Penduduk (%)	
	Barito Kuala	Kalimantan Selatan
< 5 th	13,96	13,23
5 - 6 th	2,83	2,66
7 - 12 th	18,35	17,11
13 - 15 th	7,57	7,46
16 - 18 th	8,21	6,74
19 - 26 th	14,07	14,90
> 27 th	36,01	37,90
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Kalimantan Selatan.

Struktur penduduk secara kuantitatif dianggap mencukupi, namun sumberdaya manusia yang cukup besar tersebut tidak ditunjang oleh pendidikan yang memadai. Di lahan pasang surut tingkat pendidikan penduduk pada umumnya masih rendah, 15,79% yang berumur 10 tahun keatas tidak pernah bersekolah, 50,15% tidak tamat SD, 23,11% tamat SD, dan SLTP keatas. Kondisi ini jauh lebih buruk dibanding tingkat Propinsi Kalimantan Selatan dimana jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah hanya 11,09%, tidak tamat SD sebesar 40,54% dan tamat SD 30,11%. (Tabel 12).

Tabel 12. Distribusi penduduk berumur sepuluh tahun keatas menurut pendidikan di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Tingkat Pendidikan	Penduduk (%)	
	Lahan Pasang Surut	Kalimantan Selatan Umumnya
1. Tidak/belum pernah bersekolah	15,79	11,09
2. Tidak tamat SD	50,15	40,54
3. Tamat SD	23,11	30,11
4. Tamat SLTP	6,09	9,62
5. Tamat SLTA	4,53	7,86
6. Tamat Akademi	0,23	0,44
7. Tamat Universitas	0,10	0,32
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Kalimantan Selatan

Kualitas sumberdaya manusia dalam suatu kelompok masyarakat dapat juga ditinjau dari kegiatan utama penduduk yang berumur 10 tahun keatas. Kualitas sumberdaya manusia semakin tinggi apabila jumlah yang kegiatan utamanya bekerja lebih besar. Tabel 13 menunjukkan bahwa pada lahan pasang surut 55,24% penduduk kegiatan utamanya adalah bekerja, lainnya : masih sekolah (23,05%), mengurus rumah tangga (13,25%), sementara yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan 0,35%. Dibanding Propinsi Kalimantan Selatan pada umumnya struktur penduduk ini lebih baik, persentase yang bekerja lebih banyak dan yang hanya mengurus rumah tangga lebih sedikit.

Tabel 13. Distribusi penduduk berumur sepuluh tahun keatas menurut kegiatan utama di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan Utama	Penduduk (%)	
	Lahan Pasang Surut	Kalimantan Selatan Umumnya
1. Bekerja	55,24	50,94
2. Sementara tidak bekerja	1,67	1,55
3. Mencari pekerjaan	0,35	0,45
4. Sekolah	23,05	24,74
5. Mengurus rumah tangga	13,12	15,13
6. Lainnya	6,57	6,68
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Kalimantan Selatan.

3. Prasarana Ekonomi dan Sosial

3.1. Prasarana Pendidikan

Kualitas sumberdaya manusia berkaitan erat dengan ketersediaan prasarana pendidikan. Tabel 14 memberikan gambaran bahwa secara keseluruhan keadaan prasarana pendidikan di lahan pasang surut berada dibawah rata-rata Propinsi Kalimantan Selatan, baik jumlah sekolah, ruang kelas maupun jumlah guru. Jumlah sekolah TK, SD, SMP dan SMA di lahan ini masing-masing 24,255, 23 dan 5 buah, yang jumlahnya jauh lebih kecil dari rata-rata Propinsi. Jumlah guru TK, SD, SMP dan SMA adalah 41, 1.702, 338 dan 103 orang. Hal ini menunjukkan prasarana pendidikan di lahan pasang surut perlu ditingkatkan, baik prasarana sekolah, maupun sumber daya manusianya.

Tabel 14. Prasarana pendidikan di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Jenis Prasarana	Barito Kuala		Kalimantan Selatan	
	1989	1993	1989	1993
1. Jumlah sekolah				
TK	24	-	77	802
SD	255	269	294	2.986
SMTP	23	27	29	280
SMTA	6	5	15	132
2. Ruang/bilik				
TK	58	-	137	1.362
SD	1.590	1.605	1.758	18.042
SMTP	74	130	182	1.802
SMTA	31	27	112	1.227
3. Jumlah guru				
TK	41	-	179	1.881
SD	1.702	1.687	1.993	21.369
SMTP	338	312	513	4.877
SMTA	116	103	266	3.612
4. Jumlah murid				
TK	783	-	2.604	26.543
SD	33.358	32.097	36.750	371.242
SMTP	3.801	3.917	6.370	58.886
SMTA	1.012	843	6.746	40.809

Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi juga oleh ketersediaan fasilitas komunikasi. Semakin banyak fasilitas komunikasi yang tersedia (semakin besar kesadaran penduduk akan informasi), sehingga pengetahuan dan ketrampilan mereka semakin tinggi. Di lahan pasang surut fasilitas komunikasi cukup memadai (Tabel 15). Yang kurang memadai adalah pengorganisasian penduduk kedalam kelompok pencapir dan jumlah koran masuk desa. Di lahan ini koran masuk desa hanya 1.245 eksemplar, padahal Kalimantan Selatan pada umumnya 2.576 eksemplar. Hal ini mengakibatkan informasi yang diterima sangat terbatas.

Tabel 15. Fasilitas komunikasi di Kabupaten Barito Kuala dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Jenis Fasilitas	Barito Kuala	Kalimantan Selatan
1. TV Umum	250	243
2. Sambungan telpon	97	-
3. Kantor Pos :		
Jumlah Kantor Pos	1	1,1
Kantor pos pembantu	7	6,5
Rumah Pos	1	5,4
Pos Desa Keliling	3	-
4. Kelompencapir :		
Jumlah	161	206
Anggota	3849	4753
5. Radio Swasta	-	1,7
6. Koran masuk desa (exp)	1245	2576

Sumber : Kabupaten Barito Kuala dalam Angka.

3.2. Kesehatan

Prasarana penting lainnya yang sangat menentukan kualitas sumber daya dan kesejahteraan hidup manusia adalah ketersediaan fasilitas kesehatan termasuk sanitasi. Di lahan pasang surut ketersediaan fasilitas kesehatan cukup memadai (Tabel 16). Yang masih menjadi persoalan besar adalah air minum. Di lahan ini jumlah pelanggan air minum hanya 704 KK, produksi air minum sebesar 162.627 m^3 , sedang penggunaannya mencapai 111.719 m^3 , atau 68% dari jumlah produksi. Persoalan air minum perlu mendapatkan perhatian serius, sebab pada umumnya penduduk menggunakan air sungai yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

Tabel 16. Fasilitas kesehatan/sanitasi di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Jenis Fasilitas	Lahan Pasang Surut		Kalimantan Selatan umumnya	
	1989	1993	1989	1993
1. Jumlah RSU	1	1	2	11
2. Puskesmas	15	16	16	185
3. Puskesmas pembantu	55	60	41	525
4. Dokter	12	20	22	301
5. Paramedis	168	198	330	243
6. Klinik KB	18	20	20	254
7. Air minum :				
- Jumlah pelanggan	704	1.076	4.360	57.235
- Produksi (m^3)	162.627	351.501	2.247.425	21.561.475
- Penggunaan (m^3)	111.719	331.756	124.020	16.259.504

Sumber : Kabupaten Barito Kuala dalam Angka, 1989 dan 1993.

3.3. Energi listrik

Fasilitas yang masih jauh dari memadai terutama adalah energi listrik dan fasilitas transportasi. Pada Tabel 17 terlihat bahwa di lahan ini banyaknya pelanggan listrik hanya 1.186 orang, padahal Propinsi Kalimantan Selatan pada umumnya mencapai 17.047 orang. VA terpasang, KWH dibandingkan dan KWH terjual berturut-turut sebesar 716.165 VA, 1.052.130 KWH dan 1.015.980 KWH, atau hanya 3,55%, 2,90% dan 3,18% dibanding Kalimantan Selatan pada umumnya.

Tabel 17. Energi listrik di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Jenis Fasilitas	Lahan Pasang Surut		Kalimantan Selatan umumnya	
	1989	1993	1989	1993
Pelanggan listrik	1.186	1.843	17.047	255.161
VA terpasang	716.165	1.128.465	20.188.332	271.796.698
KWH dibangkitkan	1.052.130	1.793.109	36.270.532	42.366.046
KWH terjual	1.015.980	1.684.067	31.898.465	457.633.136

Sumber : Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka, 1989 dan 1993.

3.4. Fasilitas transformasi

Kondisi fasilitas transformasi kurang memadai. Alat transportasi yang paling dominan adalah kendaraan air. Fasilitas transportasi darat masih sangat terbatas, jalan negara tidak ada, yang paling banyak jalan kabupaten (86,27%), sisanya berupa jalan propinsi. Permukaan jalan sebagian besar berupa tanah (61,37%), dan hanya 24,57% yang sudah diaspal. Oleh karena itu hanya 4,57% jalan yang tergolong mantap, semuanya termasuk jalan kelas V. Dibanding Propinsi Kalimantan Selatan pada umumnya kondisi fasilitas transportasi ini berbeda jauh, dimana rata-rata terdapat 56,67 km jalan negara, dan 70,86 jalan propinsi (Tabel 18).

Tabel 18. Fasilitas transportasi di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Jenis Fasilitas	Lahan Pasang Surut		Kalimantan Selatan Umumnya	
	1989	1993	1989	1993
1. Kendaraan air (buah)	1943	985	148	2581
2. Panjang jalan menurut status wewenang :				
- Negara (km)	-	-	56,67	566,71
- Propinsi (km)	70,10	70,10	70,86	708,63
- Kabupaten (km)	440,83	565,02	457,16	5329,71
3. Panjang jalan menurut jenis permukaan :				
- Aspal (km)	125,56	20,00	213,93	1015,64
- Krikil (km)	72,34	50,00	158,48	252,60
- Tanah (km)	313,03	7,10	216,32	7,10
4. Panjang jalan menurut kondisi jalan :				
- Mantap (km)	7,98	83,40	130,93	1656,279
- Tak mantap (km)	166,36	170,28	249,15	1580,324
- Kritis (km)	336,59	311,34	225,13	2156,116
5. Panjang jalan menurut kelas :				
- Kelas I (km)	-	-	60,87	23,950
- Kelas II (km)	-	-	2,10	24,320
- Kelas III (km)	-	183,78	81,44	905,581
- Kelas IIIa (km)	-	71,00	19,33	1017,485
- Kelas IV (km)	-	-	137,05	914,935
- Kelas V (km)	70,10	-	74,1	1517,640
- Kelas tidak dirinci (km)	-	310,24	-	988,808

Sumber : Kalimantan Selatan dalam angka, 1989 dan 1993.

4. Kelembagaan dan Kebijakan

4.1. Kelembagaan ekonomi

Kelembagaan terpenting yang menunjang kesejahteraan penduduk adalah kelembagaan ekonomi pedesaan dalam wujud kelompok tani dan koperasi. Kelompok tani dianggap sebagai suatu unit pelaku ekonomi yang mengurus distribusi sarana produksi, pemasaran hasil, penyediaan modal dan kredit.

Di Kabupaten Barito Kuala terdapat 773 kelompok tani, 5 BRI Unit Desa, 24 KUD, 11 Kios Sarana Produksi dan 9 Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) (Tabel 19). Untuk menampung kegiatan ekonomi pedesaan maka jumlah lembaga ekonomi pedesaan ini masih jauh dari memadai, terutama jumlah BRI, Kios

Sarana Produksi dan TPK. Jumlah kelompok tani dan KUD sudah hampir seimbang dengan rata-rata Kalimantan Selatan.

Tabel 19. Kelembagaan ekonomi pedesaan di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Jenis kelembagaan	Lahan Pasang Surut		Kalimantan Selatan	
	1990	1992	1990	1992
1. Kelompok Tani	773 (17,61)	807	8545 (20,81)	9031
2. BRI Udes	5 (0,11)	5	55 (0,13)	63
3. KUD	24 (0,55)	34	235 (0,57)	380
4. Kios Saprodi	11 (0,25)	11	327 (0,79)	327
5. TPK	9 (0,20)	9	348 (0,85)	348
6. Puskud	-	-	6 (0,02)	6

Sumber : Laporan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 1990 dan 1992.

Angka dalam kurung menunjukkan persentase tingkat pelayanan

BRI Unit Desa, Kios Sarana Produksi dan TPK merupakan Lembaga-lembaga ekonomi yang sangat vital untuk menunjang kegiatan ekonomi pedesaan. Di Kabupaten Barito Kuala jumlah ketiga lembaga tersebut per 1.000 petani berturut-turut hanya 0,11; 0,25 dan 0,20, yang berarti setiap lembaga harus melayani 9.090; 4.000 dan 5.000 orang petani. Angka ini sangat tinggi dibanding rata-rata Kalimantan Selatan pada umumnya, yang hanya 769; 1.754; dan 1.176 orang petani.

Lembaga ekonomi yang juga penting untuk menunjang kegiatan ekonomi pedesaan adalah koperasi. Di Kabupaten Barito Kuala terdapat 51 koperasi, terdiri atas 23 KUD dan 28 koperasi primer Non KUD. Jumlah anggota KUD tercatat sebesar 11.231 orang. Dibanding Propinsi Kalimantan Selatan pada umumnya perkembangan koperasi di wilayah ini cukup baik, di Kalimantan Selatan hanya terdapat 226 buah KUD dan 67 buah koperasi Non KUD (Tabel 20).

Tabel 20. Banyaknya koperasi, anggota dan jumlah simpanan di lahan pasang surut, dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Uraian	Barito Kuala		Kalimantan Selatan	
	1990	1993	1990	1993
1. KUD				
- Jumlah (buah)	23	25	226	265
- Anggota (orang)	7.955	8.695	66.550	85.775
- Simpanan (x Rp. 1.000)	65.687	127.469,2	4.127.548	1.785.028,2
2. Non KUD				
- Jumlah (buah)	28	35	67	778
- Anggota (orang)	3.276	6.526	10.205	127.505

Sumber : Kalimantan Selatan Dalam Angka, 1990 dan 1993

4.2. Kelembagaan Penyuluhan

Kelembagaan Penyuluhan memiliki arti yang sangat penting bagi petani, seperti disajikan pada Tabel 21, di lahan pasang surut terdapat 4 orang PPS, 122 orang PPL, 6 buah KWBPP dan 75 buah WKPP. Lembaga penyuluhan ini diharapkan dapat melayani kebutuhan informasi teknologi pertanian untuk 43.886 petani yang terhimpun dalam 773 kelompok tani. Keberadaan lembaga penyuluhan ini secara kualitatif cukup memadai, sebab tiap 1 PPL rata-rata hanya membina 6-7 kelompok tani, atau sekitar 360 orang petani.

Tabel 21. Keadaan kelembagaan penyuluhan di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Uraian	Lahan Pasang Surut	Kalimantan Selatan
1. PPS	4 (0,0911)	82 (0,1997)
2. PPL	122 (2,7799)	1257 (3,0617)
3. KWBPP	6 (0,1367)	40 (0,0974)
4. WKPP	75 (1,7090)	711 (1,7318)
5. Kelompok Tani	773 (17,614)	8.545 (20,814)
6. Kontak Tani	638 (14,538)	6.751 (16,444)
7. Tani Biasa	15.018 (342,20)	245.453 (597,87)
8. KK Tani	43.886 (1000,0)	410.549 (1000,0)

Angka dalam kurung adalah rasio per 1.000 orang petani.

Sumber : Laporan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 1990.

Mengenai struktur kelompok tani, Tabel 22 menunjukkan bahwa di lahan pasang surut 78,01% kelompok tani masih berstatus pemula, lainnya berstatus lanjut (17,59%) dan madya (4,14%). Dari 773 kelompok tani hanya 2 kelompok

yang berstatus utama. Dibanding Propinsi Kalimantan Selatan pada umumnya kondisi kelompok tani ini sangat memilukan, sebab untuk rata-rata propinsi hanya 55,88% kelompok tani yang masih berstatus pemula, lainnya berstatus lanjut (32,49%), madya (8,26%) dan utama (1,40%). Oleh karena itu dukungan fasilitas dan pembinaan petugas lapang perlu ditingkatkan agar hasil kerjanya lebih baik. Tanpa dukungan fasilitas yang cukup dan pembinaan intensif mustahil program penyuluhan akan berhasil, karena secara geografis lahan pasang surut memiliki medan yang berat.

Tabel 22. Kemampuan kelompok tani di lahan pasang surut dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Uraian	Lahan Pasang Surut	Kalimantan Selatan
1. Pemula	603 (78,01)	4.775 (55,88)
2. Lanjut	136 (17,59)	2.776 (32,49)
3. Madya	32 (4,14)	706 (8,26)
4. Utama	2 (0,26)	120 (1,40)
5. Belum dikukuhkan	-	168 (1,97)
Jumlah	773 (100,0)	8.545 (100,0)

Angka dalam kurung adalah prosentase terhadap jumlah kelompok tani

Sumber : Laporan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 1990.

Mengenai kelembagaan pengairan, di lahan pasang surut, satu-satunya lembaga yang mengurus pengairan di lahan pasang surut adalah Persatuan Petani Pemakai Air (P3A). Lembaga ini berfungsi :

- (1) mengatur pembukaan dan penutupan pintu air,
- (2) melakukan pemupukan bersama,
- (3) melakukan gotong royong pembersihan parit, dan
- (4) melakukan penyaluran saprodi

Yang tak kalah pentingnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk pedesaan adalah kebijakan pertanian, dan yang paling menonjol adalah kebijakan intensifikasi. Tabel 23 menunjukkan bahwa dalam hal intensifikasi padi, Kabupaten Barito Kuala belum mendapatkan perhatian sepenuhnya. Pada MT 90 luas areal Insus Paket D hanya 26 ha, atau 0,10% dari yang ditargetkan, pada hal Propinsi Kalimantan Selatan realisasinya mencapai 3.237 ha, atau 32,30% dari target. Pada MT 1990/91 realisasi Insus Paket D meningkat menjadi 306 ha (12,40%) tetapi Kalimantan Selatan realisasinya mencapai 22.126 ha, atau 97,5%. Kebijakan intensifikasi yang proporsional dengan Propinsi Kalimantan Selatan adalah Insus Paket A, B dan C.

Tabel 23. Realisasi intensifikasi padi Kabupaten Barito Kuala dan perbandingannya dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Uraian	Barito Kuala	Kalimantan Selatan
1. Insus Paket D		
MT 1990	26 (0,10)	3.237 (32,30)
MT 1990/91	306 (12,40)	22.126 (97,50)
2. Insus Paket A, B, C		
MT 1990	10.990 (151,59)	55.751 (157,48)
MT 1990/91	8.295 (135,78)	80.333 (100,09)

Angka dalam kurung adalah prosentase terhadap target.

Sumber : Laporan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 1990.

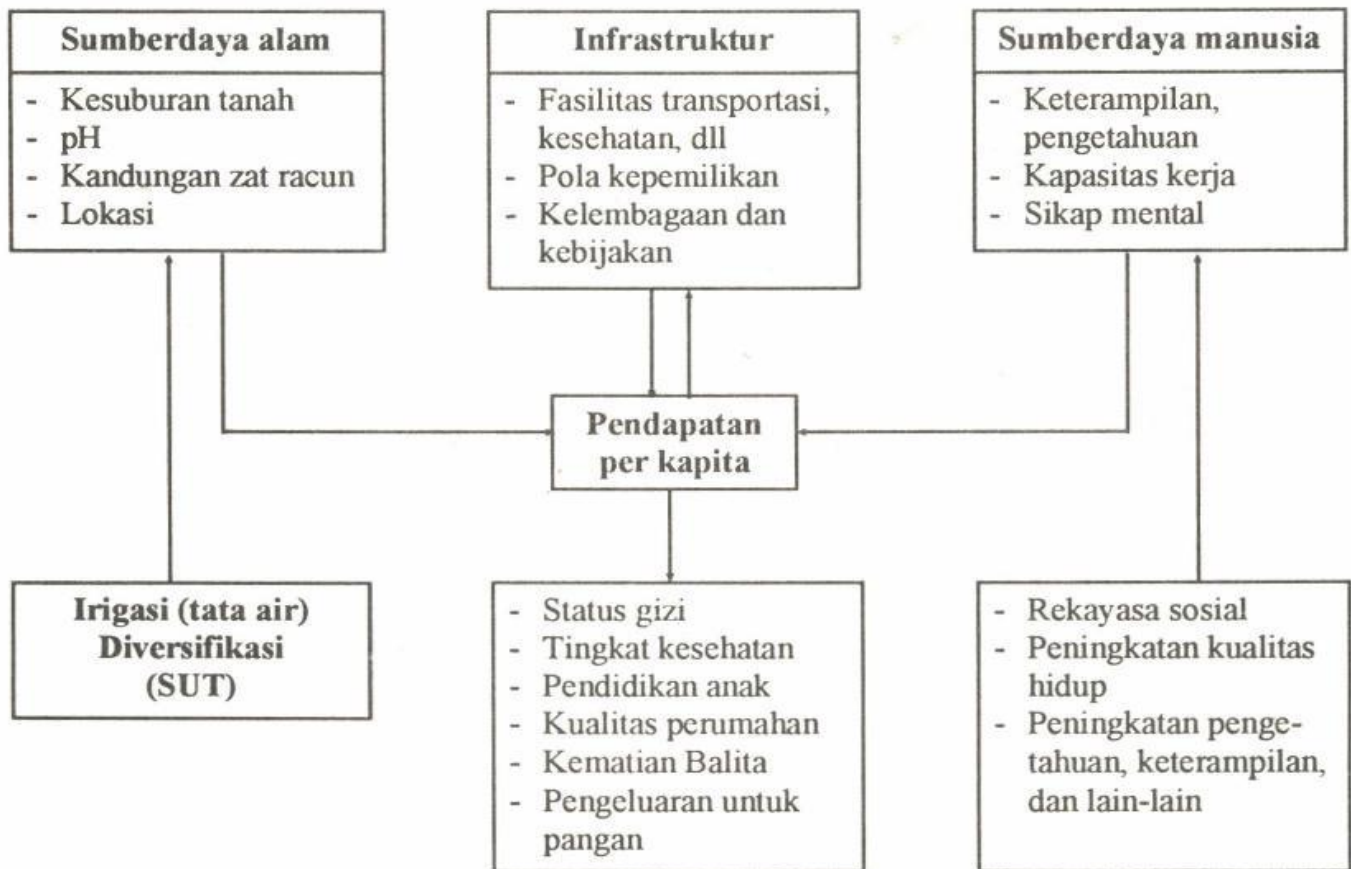
Berdasarkan kriteria efisiensi, tindakan meletakkan prioritas intensifikasi usahatani padi di luar lahan pasang surut dapat dibenarkan, mengingat intensifikasi pada lahan ini lebih sulit. Tetapi kebijakan ini perlu ditinjau kembali mengingat di lahan pasang surut usahatani padi merupakan sumber pendapatan utama penduduk, yang sebagian besar hidupnya masih di bawah garis kemiskinan. Jadi dalam penerapan prioritas intensifikasi usahatani padi perlu didasarkan atas kriteria efisiensi dan kriteria pemerataan pendapatan secara seimbang.

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Hasil pengamatan mengenai sumberdaya dan infrastruktur daerah miskin dan implikasinya terhadap kemiskinan penduduk di lahan pasang surut, sebagaimana diuraikan diatas, menunjukkan bahwa pada kawasan ini persoalan kemiskinan menuntut pemecahan segera. Persoalan kemiskinan muncul sebagai akibat keterbatasan penduduk untuk menguasai dan mengalokasikan lahan secara optimal. Akibatnya pendapatan mereka masih berada dibawah kebutuhan pokok minimal (basic minimum need), sehingga mereka tidak mampu melakukan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau membangun infrastruktur untuk meningkatkan pendapatan pada masa mendatang.

Siklus yang mengarah kepada kemiskinan yang lebih parah ini dapat dipotong dengan meningkatkan kemampuan penduduk untuk menguasai dan mengalokasikan lahan secara optimal. Salah satu alternatif yang dapat dipilih adalah melalui introduksi teknologi tata air (water management) dan diversifikasi usahatani yang dilaksanakan secara komprehensif dan dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi sosial ekonomi penduduk miskin tersebut. Se-

cara ringkas alternatif pendekatan untuk meningkatkan penduduk berpendapatan rendah ini disajikan pada Gambar 6.



Gambar 3. Pendekatan alternatif penanggulangan kemiskinan penduduk di lahan pasang surut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model tata air satu arah aliran cukup baik untuk diterapkan untuk mendukung diversifikasi usahatani di lahan pasang surut. Dengan model tata air ini proses pencucian tanah dari zat racun tanah lebih lancar dan keasaman tanah dapat diturunkan hingga mendekati pH optimal.

Salah satu strategi diversifikasi usahatani yang dapat digunakan adalah melalui introduksi pola usahatani terpadu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Proyek SWAMP II menunjukkan bahwa pola usahatani sistem surjan yang mengkombinasikan tanaman semusim (padi dua kali setahun dan palawija), tanaman keras dan ternak dapat memberikan pendapatan petani yang cukup tinggi. Di lahan pasang surut sulfat masam pola usahatani ini dapat memberikan pendapatan sebesar Rp 1.424.585,- per tahun atau Rp 4.316,- per HOK, pada hal pola usahatani petani pada waktu yang sama hanya memberikan pendapatan

sebesar Rp 607.865,-. Di lahan pasang surut bergambut hasilnya lebih tinggi lagi, yaitu Rp 1.564.950,- per tahun, namun karena jumlah tenaga kerja yang digunakan lebih banyak, pendapatan per HOK lebih rendah dibanding di lahan pasang surut sulfat masam.

Upaya peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui perbaikan tata air dan diversifikasi usahatani harus didukung oleh rekayasa sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka, baik rekayasa sosial ekonomi untuk mendukung program peningkatan pendapatan tersebut maupun rekayasa sosial ekonomi untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Rekayasa sosial ekonomi yang sangat diperlukan untuk mendukung perbaikan tata air dan diversifikasi usahatani antara lain: penyediaan input atau sarana produksi secara lokal, pe-ningkatan tenaga, sarana dan sarana penyuluhan, penyediaan modal usaha, pembinaan kelompok tani, peningkatan efisiensi pemasaran dan pemberian perangsang produksi bagi petani.

Agar kenaikan pendapatan yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, upaya peningkatan pendapatan penduduk miskin harus dibarengi dengan bimbingan dan penyediaan prasarana menuju kualitas hidup yang lebih tinggi, misalnya: pembentukan posyandu, PKK, karang taruna, taman gizi, penyediaan air minum yang sehat, peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan dsb.

KESIMPULAN

Walaupun tingkat pendapatan per kapita relatif tinggi, namun oleh karena pembagian pendapatan yang kurang merata, jumlah penduduk miskin di lahan pasang surut Kalimantan Selatan masih cukup besar. Dengan mengambil Kabupaten Barito Kuala sebagai sampel pengamatan, dapat diketahui bahwa jumlah mereka mencapai 29,36%. Pada umumnya mereka adalah penduduk yang bekerja di sektor pertanian atau tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Di lahan ini prosentase pengeluaran penduduk untuk konsumsi pangan cukup tinggi, yaitu 77,99%. Keadaan perumahan pada umumnya masih sederhana, 45,73% luas bangunannya kurang dari 40 m dan hanya 5,50% yang lebih dari 80 m. Tingkat pendidikan penduduk jauh ketinggalan.

Banyaknya penduduk miskin merupakan resultante dari besarnya pendapatan per kapita dan tingkat pemerataan pembagian pendapatan. Walaupun tingkat pemerataan pembagian pendapatan rendah, apabila tingkat pendapatan tinggi, jumlah penduduk berpendapatan rendah sedikit (Kasus Alalak). Se-



baliknya, walaupun tingkat pemerataan pembagian pendapatan tinggi, jika tingkat pendapatan rendah, penduduk berpendapatan rendah berjumlah besar. Oleh karena itu, untuk mengurangi jumlah penduduk berpendapatan rendah upaya peningkatan dan pemerataan pembagian pendapatan harus dilakukan secara serentak.

Sumber daya dan infrastruktur memegang peranan sangat menentukan dalam upaya untuk mengurangi banyaknya penduduk berpendapatan rendah. Di lahan pasang surut ketersediaan sumberdaya ekonomi ini, untuk jenis tertentu jumlahnya cukup memadai, tetapi kualitasnya masih sangat terbatas. Untuk keperluan pertanian lahan pasang surut masih cukup luas, tetapi masih berada dalam "kondisi marginal", sehingga daya dan hasil gunanya sangat terbatas. Untuk meningkatkannya perlu konservasi dan reklamasi lahan.

Kaitan antara kualitas sumber daya dan infrastruktur dengan pendapatan penduduk ini mengisyaratkan bahwa jumlah penduduk berpendapatan rendah dapat berkurang apabila sumber daya dan infrastruktur yang mereka kuasai ditingkatkan. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah melalui perbaikan tata air dan diversifikasi usahatani. Berdasarkan hasil penelitian diversifikasi usahatani dengan menggunakan pola usahatani sistem surjan yang memadukan antara tanaman semusim (padi dua kali setahun dan palawija) dengan tanaman keras dan ternak dapat memberikan pendapatan usahatani yang cukup tinggi. Agar lebih berhasil upaya peningkatan pendapatan tersebut harus didukung oleh seperangkat rekayasa sosial ekonomi, baik untuk mendukung upaya peningkatan sumber daya tersebut maupun untuk membimbing penduduk berpendapatan rendah meningkatkan taraf hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Kalimantan Selatan, 1992. Laporan Tahunan Dinas 1990/91. Banjarbaru.
- Kantor Statistik Propinsi Kalimantan Selatan, 1989^{a)}. Kalimantan Selatan Dalam Angka, Banjarbaru.
- Kantor Statistik Propinsi Kalimantan Selatan, 1989. Pola Pengeluaran Penduduk Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru.
- Mubyarto, 1981. Program Pemerataan. Tujuan dan Pengalaman. Dalam: Politik Pertanian. Yayasan Obor. Jakarta.

- Rachmadi Ramli, R. Smith Simatupang dan Isdijanto Ar Riza, 1990. Penelitian Sistem Usahatani di Lahan Pasang Surut Sulfat Masam, Terantang, Kalimantan Selatan. Prosiding Seminar Penelitian Lahan Pasang Surut dan Rawa SWAMP II, 1990. Palembang, 29-31 Oktober 1990.
- Supriyo A., B. Prayudi, Sudirman U., Rina Y. dan Isdijanto, 1990. Penelitian Pengembangan Sistem Usahatani pada Lahan Bergambut di Sakalagun, Kalimantan Selatan. Prosiding Seminar Penelitian Lahan Pasang Surut dan Rawa SWAMP II, 1990. Palembang, 29-31 Oktober 1990.

SUMBER DAYA DAN INFRASTRUKTUR DI DESA TANJUNG KERAMAT

Rumansjah Itjin, Isdijanto Ar-Riza dan Muhammad Noor

PENDAHULUAN

Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa dari 27,2 juta penduduk miskin Indonesia pada tahun 1990 terdapat 9,4 juta (34,55%) bermukim di kota dan sisanya 17,8 juta (65,45%) berdomisili di desa. Walaupun Indonesia telah berhasil meningkatkan taraf hidup rakyat namun masalah kemiskinan masih ditemukan terutama pada lahan-lahan marginal, diantaranya lahan pasang surut. Sebagian besar penduduk yang bermukim pada kawasan pasang surut bekerja disektor pertanian.

Secara umum pendapatan di sektor pertanian baik lahan pasang surut maupun lahan lainnya menduduki tempat yang terbawah, baik per rumah tangga maupun per jiwa dan pendapatan tersebut kebanyakannya berada dibawah garis kemiskinan. Selanjutnya sub sektor pangan menempati tempat yang paling bawah dibandingkan dengan komponen lainnya (BPS, 1990). Lahan pasang surut di Kalimantan Selatan tergolong lahan marginal dikarenakan usaha pemanfaatannya sebagian besar masih mengandalkan sistem tradisional. Di Kalimantan Selatan lahan pasang surut yang berjumlah sekitar 200.000 ha terdiri dari lahan pasang surut tipe A (28,2%), lahan pasang surut tipe B (38,5%) dan lahan pasang surut tipe C (33,13%) (Diperta Kalsel, 1984).

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak pernah tertuntaskan dikarenakan oleh :

1. Garis kemiskinan akan selalu berubah dari waktu ke waktu sehingga selalu saja ada orang yang hidup dibawah garis kemiskinan.
2. Indikator yang digunakan belum bersifat baku (standard)

Kemiskinan merupakan resultante interaksi dan interaksi antara teknologi, sumber daya manusia, kapital dan kelembagaan/kebijaksanaan. Dengan demikian ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan sebagai masalah sosial dan dampak kemiskinan tersebut terhadap masyarakat.

Tulisan ini membahas tentang karakteristik utama kemiskinan, penyebab dan alternatif penanggulangannya pada kasus Desa Tanjung Kramat, Kec. Belawang, Kab. Batola.

KEADAAN UMUM WILAYAH

1. Sejarah Perkembangan Desa

Desa Tanjung Keramat terbentuk pada tahun 1973, merupakan pemekaran dari desa Sukaramai. Keseluruhan desa Tanjung Keramat berupa hutan dan kemudian oleh para perintis terutama perantau dari Hulu Sungai dibuka secara perorangan untuk dijadikan persawahan dan sebagian untuk tanaman kebun buah-buahan.

Desa Tanjung Keramat termasuk wilayah persawahan pasang surut yang terbagi dalam tipe A, B, dan C. Yang dimaksudkan tipe A adalah wilayah yang terluapi air pasang baik pada saat pasang tunggal maupun oleh pasang ganda. Wilayah yang termasuk tipe A adalah daerah pinggir sungai yang menjorok lebih kurang 0,5 km. Tipe B adalah wilayah yang terluapi air pasang pada saat terjadinya pasang tunggal. Wilayah yang termasuk tipe B adalah daerah pada bentang antara 0,5 sampai dengan 1 km dari tepi sungai. Sedangkan tipe C adalah wilayah yang sama sekali tidak terluapi air pasang dengan permukaan air tanah pada kedalaman < 60 cm. Wilayah yang termasuk tipe C adalah daerah pada bentang lebih jauh dari 1 km dari tepi sungai. Untuk penataan air telah dibuat "*handil-handil*" sederhana yang berfungsi untuk melancarkan air masuk ke petak-petak persawahan. Terdapat tiga handil yang melintang timur-barat desa yaitu Handil Karya, Handil Condong, dan Handil Karamunting.

Secara administratif desa Tanjung Keramat berada di wilayah kecamatan Belawang berbatasan sebelah timur dengan sungai Barito, sebelah barat dengan desa Dandajaya, sebelah utara dengan desa Pateh Selera, dan sebelah selatan dengan desa Sukaramai.

2. Sumber daya Alam

Luas wilayah desa Tanjung Keramat 400 ha, sebagian besar berupa persawahan yang sifatnya masih sederhana (Tabel 24). Bentuk permukaan wilayah datar dan pada ketinggian 1,5 m dari permukaan laut. Jenis tanah termasuk alluvial dan sebagian besar berupa tanah sulfat masam dengan kedalaman pirit yang beragam antara 60-120 cm. Produktivitas lahan tergolong rendah karena mempunyai tingkat kemasaman tinggi.

Tabel 24. Penggunaan lahan di desa Tanjung Keramat.

Penggunaan Tanah	Jumlah (ha)
Perumahan	2
Pekarangan	-
Persawahan	
- Teknis	-
- 1/2 Teknis	-
- Sederhana	330
Perkebunan	
- Negara	-
- Rakyat	6
Danau/rawa	10
Tanah tandus	-
Empang/kolam/tabat	-
Lain-lain	52
Jumlah keseluruhan	400

Sumber : Daftar isian potensi desa dan kelurahan Tanjung Keramat, 1990.

Penataan lahan pada desa Tanjung Keramat dibagi menjadi dua yaitu persawahan dan tanaman kebun/buah-buahan yang ditumpang sari dengan padi. Penataan lahan tersebut diatas berdasarkan kesesuaian lahan yang telah dipelajari oleh petani secara mandiri berdasarkan pengalaman.

Lahan untuk persawahan dipusatkan pada bentang daerah lebih kurang 1-1,5 km dari tepi Sungai Barito, sedangkan pada bentang daerah < 1 km dari tepi Sungai Barito digunakan sebagai lahan kebun dan buah-buahan, khususnya jeruk yang sebagian ditumpang sari dengan padi.

Sistem bercocok tanam padi di desa Tanjung Keramat masih bersifat tradisional menggunakan varietas lokal seperti Siam lantik, Pandak, Adil, atau Simon, tanpa pengolahan tanah atau pengolahan secara minimum, tanpa dipupuk atau hanya dipupuk dengan N (urea), penyiangan sangat minim, pengendalian hama dan penyakit tidak secara intensif. Dengan demikian hasil padi yang diperoleh tergolong rendah sekitar 7-8 kaleng/borong setara 2,4-2,8 t gkg/ha. Hasil padi dapat ditingkatkan sampai 10 kaleng/borong setara dengan 3,5 t gkg/ha, bila disertai dengan pemupukan.

Beberapa petani sudah mulai menggunakan pupuk fosfat (TSP), yang ternyata dapat memberikan hasil padi lebih baik. Jumlah TSP yang diberikan biasanya antara 1/2 atau 1/4 dari jumlah urea yang diberikan. Jumlah pupuk N dan P yang diberikan keseluruhan berkisar sekitar 250 kg/ha atau antara 175-200 kg urea (85 - 100 kg N) dan 50 - 75 kg TSP (20 - 40 kg P₂O₅) per ha. Petani belum biasa menggunakan pupuk K atau KCl untuk tanaman padinya. Sebagian

petani ada yang berkeinginan untuk mencoba menanam varietas unggul, tetapi dihadapkan pada keterbatasan pengetahuan teknik budidayanya.

Rendahnya tingkat kemampuan petani dan belum terjangkaunya penerapan sistem usahatani secara lebih maju sehingga hasil yang diperoleh petani masih rendah. Peluang untuk meningkatkan hasil usahatani sebetulnya masih terbuka, jika petani meningkatkan dosis penggunaan pupuk dan penerapan pemupukan secara berimbang, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, dan penataan air secara lebih baik.

Dilihat dari aspek pengeluaran dan penerimaan hasil usahatani padi maka pendapatan petani masih tergolong rendah, antara Rp 490.000 - Rp 550.000. Hasil penerimaan usahatani dari padi ditaksir sekitar 2,4 ton/ha atau Rp 980.000/tahun sedangkan pengeluaran untuk upah ditaksir Rp 400.000 (Tabel 25) dan biaya lainnya seperti pupuk Rp 58.000 dan pestisida Rp 32.000.

Tabel 25. Tingkat upah untuk usahatani padi di desa Tanjung Keramat.

Macam kegiatan	Besar pengeluaran (Rp)
Menajak	50.000
Memuntal/angkut	40.000
Tanam	80.000
Menyiang/rumput	70.000
Panen (1/5 hasil)	160.000
Jumlah keseluruhan	400.000

Sumber : Hasil wawancara dengan petani (data primer).

Hasil usahatani selain padi yang banyak diminati petani karena hasil dan pemasarannya yang cukup baik adalah bercocok tanam jeruk, terutama untuk bentang daerah yang berjarak antara 0,5 - 1 km dari tepi sungai Barito. Sekitar 70% petani di desa Tanjung Keramat mempunyai tanaman jeruk dengan jumlah yang bervariasi antara 25 - 650 pohon. Budidaya jeruk oleh petani desa Tanjung Keramat dimulai sejak 1980, yang sebelumnya hanya ditanami padi. Budidaya jeruk tersebut dimulai oleh pendatang dari Sungai Madang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar sebagai petani ahli khusus jeruk dilingkungan masyarakat Kalimantan Selatan.

Teknik budidaya jeruk dilakukan petani dengan membuat gundukan tanah (tukungan) secara bertahap. Besar tukungan berukuran dengan luar $1,7 \text{ m}^2$ dan tinggi 60 cm untuk satu pohon tanam jeruk. Teknik budidaya jeruk oleh sebagian petani dilakukan dengan membuat semacam surjan. Surjan berukuran dengan lebar tembokan sekitar 2 depa (3,4 m) dan tinggi 60 cm, sedangkan lebar tabukan sekitar 1,5 depa (2,5 m).

Hasil jeruk baru dapat dipetik atau dipanen setelah umur 4 tahun. Hasil tertinggi dicapai pada umur antara 10-25 tahun. Diatas 25 tahun produksi akan menurun, walaupun terus dapat menghasilkan hingga berumur 50 tahun. Panen jeruk dapat dilakukan beberapa kali dengan satu kali panen musim dan 4-5 kali panen penyela. Panen musim biasanya pada bulan Juni dan panen penyela setiap dua bulan setelah panen musim yaitu sekitar bulan Agustus, Oktober, Desember dan Februari. Hasil dari panen penyela bisa mencapai 25% dari panen musim.

Hasil panen jeruk bervariasi, tergantung pada umur tanaman. Harga jual hasil panen juga bervariasi tergantung dari kelas buah. Kelas I seharga Rp 90/biji, kelas II Rp 45/biji dan kelas III Rp 25/biji. Kriteria kelas buah ditentukan oleh besar garis tengah buah sebagai berikut :

- Kelas I : bila besar lingkaran buah mencakup pertemuan antara ibu jari dengan jari tengah ditambah 2 lebar jari tangan.
- Kelas II : bila besar lingkaran buah mencakup pertemuan antara ibu jari dengan jari tengah ditambah 1 lebar jari tangan.
- Kelas III : bila besar lingkaran buah mencakup pertemuan antara ibu jari dengan jari tengah.

Hasil panen dan nilai penghasilan petani jeruk di desa Tanjung Keramat disajikan pada Tabel 26.

Tabel 26. Hasil panen dan pendapatan petani jeruk pada berbagai umur tanaman di desa Tanjung Keramat, 1991.

Banyaknya pohon	Umur tanaman (tahun)	Produksi buah per pohon	Nilai harga (Rp juta)
200	7	250 - 750	4,0
60	12	500 - 1000	2,0
150	25	500 - 1000	0,5*)

Sumber : Hasil wawancara dengan petani

*) = pengalaman dari petani di Sungai Madang, Sungai Tabuk.

Kendala petani dalam bercocok tanam jeruk terutama adalah serangan hama pada batang pohon sehingga mengeluarkan lendir, yang selanjutnya kulit pohon menjadi lapuk dan akhirnya tanaman menjadi mati.

Hasil petani lainnya berupa ternak kambing, namun tidak berkembang dengan baik karena adanya penyakit seperti bodok.

SUMBER DAYA MANUSIA

Penduduk Desa Tanjung Keramat termasuk kurang padat, yaitu 290 jiwa yang tergabung dalam 57 Kepala Keluarga. Jika ditinjau dari luas wilayahnya (400 ha atau 4 km²), maka kepadatan penduduknya adalah sebesar 72 jiwa/km². Dengan kepadatan penduduk sebesar itu dan dengan jumlah penduduk usia kerja sebesar 204 orang, sebenarnya cukup mampu untuk mengelola lahan usaha seluas 330 ha dengan baik.

Dari data yang ada, kendala yang dihadapi adalah masih rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam usahatani, terutama usahatani padi.

Hal ini disebabkan antara lain :

1. Tingkat pendidikan masih rendah, tercermin dari jumlah penduduk yang tergolong lulus SD sebanyak 37 orang, lulus SLTP 10 orang dan lulus SLTA 4 orang.
2. Informasi atau penyuluhan mengenai teknologi pertanian sangat jarang.
3. Belum ada kelompok tani, sebagai wadah pembinaan, atau wadah untuk menyampaikan informasi.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, diperoleh kesan bahwa masyarakat belum mempunyai tokoh panutan yang memberikan bimbingan dan arahan, khususnya dalam usahatani. Dari keadaan demikian terlihat bahwa di desa ini belum ada kaderisasi, sehingga diperlukan pembinaan untuk memacu dan memotifikasi pelaku pembangunan desa.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan sejumlah penduduk, diperoleh gambaran bahwa sebenarnya penduduk di Desa ini cukup antusias untuk meningkatkan kehidupan warganya. Hal ini tampak banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh petani tentang berbagai hal mengenai pertanian. Hal ini memberikan kesan yang menunjukan bahwa penduduk desa telah mempunyai kemauan sehingga perlu ditumbuhkan lingkungan yang baik. Dengan modal jumlah tenaga kerja yang cukup, desa ini mempunyai peluang yang besar untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya alamnya sehingga dapat lebih menguntungkan.

Untuk itu diperlukan pembinaan, penyuluhan dan pemberian informasi baru tentang berbagai hal, terutama yang menyangkut masalah pertanian. Dengan demikian tahap demi tahap pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya manusianya dapat meningkat.

Tingkat Kesejahteraan

a. Pendapatan Perkapita

Rata-rata pemilikan lahan di desa ini adalah 2,5 ha/KK yang terdiri dari 1,5 ha sawah (termasuk pekarangan), 0,5 ha sawah dengan campuran tanaman perkebunan/buah-buahan (terutama jeruk dan sebagian kecil rambutan, kelapa, ketapi, jambu-jambuan, pisang dan sayuran) dan 0,5 ha sawah lainnya yang kadang-kadang ditelantarkan. Pekarangan yang dimiliki relatif kecil sekali 250-500 m² dengan beragam tanaman buah-buahan, sayur dan rempah-rempahan. Sedang usaha ternak (itik, ayam dan kambing) belum bisa diandalkan walaupun sekitar 75% penduduk yang mengusahakan. Rata-rata pendapatan dari ternak sebesar Rp 50.000/tahun.

Penduduk desa ini terdiri dari 58 KK dengan mata pencaharian seluruhnya bertanam padi, 40 KK tanam jeruk, kelapa dan rambutan serta usaha sampingan lain setelah selesai tanam padi lokal sementara menunggu panen. Usaha sampingan bermacam-macam antara lain menjadi buruh pada usahatani di desa, atau di kota sebagai tukang beca dan tukang ojek dan kerja musiman pada perusahaan kayu. Jenis pekerjaan umumnya pekerjaan kasar yang dibayar dengan upah harian. Diperkirakan pendapatan rata-rata usaha sampingan adalah Rp 3.000/hari selama 60 hari aktif dalam setahun. Sekitar 50% penduduk desa mempunyai pekerjaan sampingan.

Dari data total pemilikan diatas diasumsikan rata-rata pemeliharaan usahatani penduduk yang diperhitungkan adalah :

- 2 ha sawah padi lokal dengan produksi 2,6 t/ha (58 KK)
- pohon jeruk sebanyak 40 pohon produksi umur (4-6 th) 40 KK
- pohon jeruk sebanyak 85 pohon belum produksi umur (1-4 th) 40 KK
- ternak sebanyak 43 KK ($\pm 75\%$) dengan pendapatan Rp 50.000/ tahun.

Pendapatan total :

- Padi (2 ha @ 2,6 ton @ Rp 40/kg) 58 KK	= Rp 12.064.000
- Jeruk*	
Panen utama 40KK @ 40 phn @ Rp 10.000	= Rp 10.000.000
Panen "penyala" (25% dari panen utama)	= Rp 4.000.000
- on farm/off farm = 0,5 x 58 x 60 x Rp 3.000	= Rp 5.220.000
- ternak = 0,75 x 58 x Rp 50.000	= Rp 2.175.000
Total	= <u>Rp 33.459.000</u>

Total pendapatan/kapita penduduk

$$\frac{\text{Rp } 33.459.000}{290} = \text{Rp } 115.375,86/\text{jiwa}$$

*) Jeruk

- 40 KK dari 58 KK penduduk desa menanam jeruk
- rata-rata pemilikan/KK = 125 pohon yang terdiri 40 pohon umur 4-6 tahun dan 85 pohon umur dibawah 40 tahun
- perhitungan produksi/pohon, umur 4-6 tahun
= Rp 10.000/pohon panen utama
= Rp 2.500/pohon panen "penyala"

b. Status Gizi

Menu pokok makanan sehari-hari penduduk adalah nasi (2-3) kali sehari dengan sayuran dan kadang-kadang buah-buahan. Menurut penduduk sayuran dimaksudkan juga sebagai bahan makanan mentah seperti nangka, pisang dan lain-lain dan umbi-umbian yang dijadikan lauk pauk sewaktu makan. Selama seminggu sayuran dedaunan hanya disajikan sebanyak 2-3 kali terutama pada saat makan siang dan makan malam.

Daging ayam apalagi ternak besar jarang dikonsumsi. Rata-rata konsumsi daging dari penduduk kurang dari 0,25 kg/kapita/tahun.

Sayuran yang dikonsumsi hampir semuanya berasal dari hasil tanaman sendiri dan apabila tidak tersedia ditempat, mereka jarang membeli keluar/kepasar. Pola makan penduduk yang bertransmigrasi hampir sama saja dengan pola penduduk asli, oyek dan gaplek sebagai bahan suplemen tidak terlihat. Dalam keadaan paceklik mereka sering menambahkan pisang rebus dan ubi kayu rebus sebagai suplemen karbohidrat.

Kebutuhan air minum dapat berupa air hujan atau sungai, sumur jarang sekali digunakan. Selama musim hujan, air yang digunakan untuk minum dan cuci adalah air hujan, sedangkan untuk mandi dan kakus digunakan air handil. Apabila musim kemarau tiba dan handil-handil mengering, air hujanpun tidak bisa diperoleh lagi, sehingga untuk air minum biasanya diambil dari air kolam ikan yang berfungsi sebagai sumur. Pada "sumur-sumur" tertentu airnya tidak asin sehingga bisa untuk diminum. Pada saat kemarau panjang kebanyakan sumur (kolam ikan) tersebut juga asin sehingga air terpaksa dibeli dari luar yang diangkut dari Sungai Barito.

Status gizi mereka boleh dikatakan rendah, menu yang mereka konsumsi jarang 5 sempurna, terdiri dari nasi dan ikan dengan ditambah sayur (dari dedaunan dan tumbuh-tumbuhan/umbi) dan kadang-kadang ditambah buah-buahan, tanpa minuman susu.

c. Harapan hidup, kematian balita dan tingkat kesejahteraan

Struktur penduduk menurut umur adalah sebagai seperti pada Tabel 27 berikut.

Tabel 27. Struktur penduduk menurut umur di desa Tanjung Keramat.

Usia	0-4	5-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50
Pria	12	17	26	22	25	26	16
Wanita	13	16	27	26	23	28	15
Total	25	33	53	48	48	52	31

Sumber : Monografi Desa Tanjung Keramat, 1990.

Menurut informasi pada tahun ini ada dua anak balita yang meninggal dunia dan juga terdapat anak balita yang kekurangan gizi. Penyebab kematian utama adalah usia lanjut yang berakibat fisik lemah, linu-linu tulang dan sebagian ada juga disebabkan oleh gangguan pernapasan. Penyakit-penyakit menular boleh dikatakan tidak ada. Tingkat kesehatan antara rendah sampai sedang.

d. Pendidikan Anak

Sekolah yang tersedia di desa hanyalah Madrasah Swadaya masyarakat sedangkan TK, SD, SLTP maupun SLTA belum tersedia. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

- Belum sekolah 40 orang (13,8%)
- Tidak tamat SD/ sederajat 199 orang (68,6%)
- Tamat SD/ sederajat 37 orang (12,7%)
- Tamat SLTP/ sederajat 10 orang (3,5%)
- Tamat SLTA/ sederajat 4 orang (1,4%)

Total 290 orang (100%)

Kekurangan sekolah di desa tersebut, sekarang ini berdampak pada tingkat pendidikan anak yang rendah. Walaupun demikian semua anak usia sekolah

masih tertampung. Faktor penyebab rendahnya tingkat pendidikan adalah biaya sekolah yang tinggi karena semua sekolah lanjutan berlokasi di luar desa sedangkan transportasi sulit (mahal).

e. Kualitas Perumahan

Semua perumahan menggunakan tongkat/tiang penyanggah karena pada musim hujan terendam air. Semua tiang yang mereka pakai adalah dari kayu ulin, beratap daun (rumbia) atau sirap dan seng. Seluruh perumahan yang ada berlantai dan berdinding kayu. Bahan bangunan seperti genteng, bata, semen, maupun tegel jarang bahkan hampir tidak digunakan.

Hanya sekitar 25% dari total perumahan yang mempunyai jamban; WC dibuat dipinggir handil/sungai di luar rumah dan jarang berada didalam rumah. Diperkirakan kurang dari 50% perumahan dikategorikan memenuhi kesehatan.

STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

1. Potensi lahan

Lahan didaerah ini dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kebun dan sawah. Lahan kebun topografinya lebih tinggi, lokasinya dekat sungai Barito dan sangat cocok untuk pertanaman jeruk. Total lahan kelompok ini seluas sekitar 40 ha, tetapi baru sekitar 6 - 10 ha yang dimanfaatkan untuk tanaman jeruk. Pertanaman jeruk belum menggunakan teknologi budaya maju, sehingga dengan teknologi yang lebih baik, tingkat hasil dan mutunya berpeluang untuk ditingkatkan.

Lahan sawah menempati hamparan kurang lebih 330 ha dengan kondisi luapan pasang tipe B ke C. Lahan ini berjarak 1,5 km dari tepi sungai Barito, berdrainase sangat jelek, dengan reaksi tanah yang masam. Pertumbuhan tanaman pada umumnya kurang baik dengan gejala keracunan besi, sehingga rata-rata hasil antara 1 - 1,2 t/ha. Kendala ini bisa diatasi dengan memasukkan teknologi tata air, pemilihan varietas yang tepat dan pemupukan, sehingga hasil bisa ditingkatkan menjadi 3,5 - 4 t/ha.

Usaha kearah tujuan diatas tersebut untuk peningkatan kesejahteraan baru akan tercapai tentunya kalau kemampuan sumberdaya manusianya sudah ditingkatkan, kalau belum maka usaha memasukkan teknologi akan mengalami banyak hambatan.

2. Potensi Teknologi

Karena kondisi lahannya bermasalah, tentunya diperlukan teknologi yang sesuai, tetapi petani pada umumnya belum mengetahui teknik budidaya padi yang baik. Hal ini bisa dimaklumi karena sebagian besar penduduk desa ini berasal dari daerah Hulu Sungai, dan sebagian dari Jawa, tetapi biasa berusaha di lahan yang subur dan beririgasi.

Mengingat kemauan yang keras dari warga desa untuk memajukan usahatani, teknologi yang sesuai diharapkan dapat diterapkan di desa ini. Dengan demikian, maka peningkatan hasil dan tingkat kesejahteraan petani dapat dicapai dengan perbaikan teknologi budidaya.

3. Potensi Sumberdaya Manusia

Jumlah sumberdaya manusia dianggap telah mencukupi untuk mengelola lahan usaha, tetapi yang perlu segera diusahakan adalah tingkat pengetahuan dan ketrampilan berusahatani. Hal ini disebabkan karena selain latar belakang daerah asal dan tingkat pendidikan. Juga karena kurangnya informasi teknologi dan pembinaan.

Yang diperlukan adalah pembentukan wadah pembinaan, berupa kelompok tani, koperasi, percontohan dan penyuluhan.

4. Modal

Selain aspek sumber daya manusia dan teknologi, petani pada umumnya mengeluh kekurangan modal untuk memajukan usahatani, serta ketidakmampuan memasarkan hasil pertaniannya. Dampaknya terlihat para tengkulak yang masuk di desa ini dengan segala kemudahannya.

Untuk menanggulangi masalah ini perlu dibentuk lembaga keuangan desa berbentuk koperasi (KUD) agar keperluan modal usaha bisa ditanggulangi, dan pemasaran hasil bisa terjamin.

5. Sarana dan Prasarana

Desa Tanjung Keramat, Kecamatan Belawang, Kabupaten Batola di Propinsi Kalimantan Selatan merupakan lahan persawahan padi pasang surut tipe A dan yang terbanyak adalah lahan pasang surut tipe B. Daerah ini merupakan lahan pinggiran (tepi) sungai Barito yang jaraknya dengan ibukota propinsi sekitar 15 km dan hanya dapat ditempuh melewati air/sungai. Luas wilayah ditaksir sekitar 400 ha, terdiri dari perumahan 2 ha, persawahan 330 ha, perkebunan rakyat 6 ha, danau dan rawa 10 ha dan lainnya 5 ha.

Untuk memperlancar tata air maka pada desa ini dibuat saluran sebanyak 4 buah yang membelah daerah tersebut menjadi 3 bagian (lihat sket). Saluran-sa-

luran tersebut dibuat sejajar satu sama lain dan tegak lurus dengan serta bermuara di Sungai Barito.



Handil tersebut merupakan swadaya masyarakat yang ditunjang oleh biaya Subsidi desa (Inpres). Pada tahun 1989, khusus handil Condong digali kembali dengan peralatan mekanis bantuan Proyek Transmigrasi Danda Besar. Tanah galian dari pembuatan handil dibuat jalan yang letaknya berdampingan dengan handil dan tempat-tempat tertentu yang elevasinya rendah dibuatkan jembatan (penghubung). Total panjang jalan (tanah) sepanjang 6 km dengan total panjang jembatan 30 m. Jalan (tanah) dan handil-handil pada desa ini kurang terawat sehingga sulit difungsikan sebagai transportasi darat, dan transportasi air tetap yang paling dominan.

Pasar desa belum ada sehingga untuk berbelanja atau menjual hasil pertanian dibawa ke Belawang (pasar Kecamatan) maupun SPT (Satuan Pemukiman Transmigrasi) Danda Besar (pasar desa).

Satu unit rice miller (huller gabah) yang dahulu dimiliki, sejak 2 tahun terakhir ini dipindahkan sebab kurang menguntungkan. Gabah untuk digiling dari desa cukup untuk dikonsumsi sendiri. Gudang dan perusahaan belum ada dan KUD belum terbentuk.

6. Sosial Budaya

Data tahun 1990 menunjukkan jumlah penduduk desa sebesar 290 jiwa, yang melek buta huruf berjumlah 255 jiwa. Anak usia sekolah (7-12 tahun) berjumlah 49 orang dan seluruhnya menikmati pendidikan. Madrasah tsanawiyah berstatus swasta (Swadaya) sistem belajarnya juga masih tersendat-sendat karena guru-gurunya yang belum menetap. Guru-guru tersebut mempunyai mata pencaharian utamanya sebagai petani padi lokal. Anak-anak yang ingin bersekolah SD bergabung dengan SDN di Danda Besar tetapi SPM yang tersedia

masih berstatus Swasta. Bagi mereka yang ingin melanjutkan sampai dengan SLTA harus ke Marabahan atau Banjarmasin.

Pada desa ini belum tersedia sekolah Taman Kanak-kanak. Agama penduduk seluruhnya Islam, pada desa terdapat 2 buah surau, satu diantaranya difungsikan sebagai mesjid, sebab mesjid yang ada relatif jauh (diluar desa).

Listrik, sarana olah raga/rekreasi, kios, toko, gudang dan Bank belum tersedia. Pengangkutan hanya berupa klotok (2 buah), perahu 10 buah, sepeda motor belum ada, TV hitam putih 4 buah dan radio 20 buah.

7. Kerja Kelembagaan

Lembaga yang ada di desa dengan 2 RK dan 4 RT ini adalah LKMD (Lemabaga Ketahanan Masyarakat Desa) yang beranggotakan 18 orang, PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) beranggotakan 16 orang, kelompok arisan beranggotakan 45 orang, PKBD (Pembantu Keluarga Berencana Desa), lumbung desa yang beranggotakan 15 orang, rebana dan hansip.

Penduduk yang dominan adalah suku Banjar dan sebagian kecil suku Jawa pindahan dari transmigrasi Puntik tahun 1961.

Adat istiadat mereka masih terlihat kokoh dipertahankan, misalnya pada upacara sunatan dimana pada suku Banjar hal tersebut tidak ada. Selain itu, mereka juga sudah beradaptasi baik dengan penduduk setempat sehingga dalam mengelola lahan usahatani boleh dikatakan sama dengan penduduk asli. Dalam berusaha misal padi mereka cenderung menanam padi dengan menggunakan sistem ekstensifikasi yaitu sistem "tebas-puntal-balik-ampar", dan perancangan relatif jarang dilakukan.

Acara-acara kegiatan keagamaan yang paling menonjol pada penduduk asli yaitu maulid, yasinan, ceramah mi'raj pada bulan Rajab, pengajian Al qur'an dan peringatan hari Asyura. Acara bertamu ketetangga/keluarga yang akan berangkat haji masih kuat dilakukan disana. Pada setiap mulai tanam padi lokal mereka mengadakan selamatan kecil-kecilan.

Bahasa yang mereka pakai untuk berkomunikasi adalah bahasa Banjar, termasuk eks transmigrasi suku Jawa. Sebaliknya, penduduk asli suku Banjar rata-rata kurang paham bahasa Jawa. Kegotongroyongan walaupun cukup baik namun pada kegiatan tertentu, misalnya setelah selesai tanam padi lokal pemberihan jalan dan handil sering kurang lancar. Hal ini terjadi karena biasanya penduduk asli banyak yang tidak berada ditempat. Selama waktu antara selesai tanam sampai dengan menjelang panen petani tidak berada ditempat bahkan ada diantara mereka yang mempunyai rumah tangga lagi di desa/kabupaten lain.

KESIMPULAN

1. Kemiskinan penduduk desa Tanjung Keramat dicirikan oleh pendapatan per kapita yang rendah (Rp 115.375,86/kap/thn), status gizi yang rendah, tingkat kematian anak balita tinggi (80 orang dalam 1000 kelahiran), tingkat pendidikan yang rendah (umumnya SD), dan kualitas perumahan rendah.
2. Penyebab rendahnya kesejahteraan penduduk disebabkan terbatasnya diversifikasi usahatani, sistem usahatani yang masih tradisional, cekaman kendala biofisik (pH rendah, keracunan Al/Fe, rendahnya kesuburan tanah dan tata air yang sulit dikuasai) serta kurang berfungsi sarana/prasarana yang menunjang usahatani.
3. Usahatani jeruk memberikan harapan yang baik untuk meningkatkan pendapatan petani, secara potensial pengembangannya sangat memungkinkan.
4. Kendala kurangnya modal, keterampilan yang minim, teknologi yang belum tersedia merupakan kendala utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Tingkat I Kalimantan Selatan, 1982. Laporan Pengkajian Tingkat Pemerataan di Kalimantan Selatan. Bappeda Tingkat I Kalimantan Selatan Banjarmasin, hal. 22-23.
- Biro Pusat Statistik (BPS) Jakarta, 1990. Jakarta.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kalimantan Selatan, 1984. Pelaksanaan penyuluhan pada daerah pasang surut dan lebak Kalimantan Selatan, Diperta Tingkat I Propinsi Kalimantan Selatan, hal. 3-5.
- Kantor Pembangunan Desa Barito Kuala, 1990. Monografi desa Tanjung Keramat, Marabahan.
- PSE, 1991. Rencana Penelitian Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia dan Alternatif Penanggulangannya, Bogor.

SUMBER DAYA DAN INFRASTRUKTUR DI DESA SUKARAMAI

Noorginayuwati, Achmadi J dan M. Najib

PENDAHULUAN

Indonesia telah berhasil meningkatkan taraf hidup rakyat, namun persoalan kemiskinan masih muncul hampir diseluruh pelosok tanah air, utamanya di lahan-lahan marginal seperti lahan pasang surut.

Menurut PSE (1991), kemiskinan merupakan suatu resultante interaksi dan interaksi antara teknologi, sumberdaya alam dan kapital, sumber daya manusia dan kelembagaan/kebijaksanaan. Dengan demikian ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu (1) faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan timbul sebagai masalah sosial dan (2) dampak kemiskinan terhadap masyarakat.

Lahan pasang surut di Kalimantan Selatan merupakan lahan marginal yang keberadaannya patut diperhitungkan karena luasnya terbesar dibandingkan lahan lainnya. Karena itu untuk memecahkan masalah kemiskinan di lahan ini diperlukan program penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi kemiskinan di suatu wilayah.

Untuk menjawab pertanyaan ini, maka dalam tulisan ini akan diuraikan karakteristik utama kemiskinan di wilayah ini, apa penyebabnya dan mencari alternatif upaya penanggulangannya.

KEADAAN UMUM WILAYAH

1. Sejarah Perkembangan Desa Sukaramai

Upaya pemerintah untuk memacu dan mengakselerasikan pembangunan di suatu wilayah ditempuh melalui implementasi pemekaran wilayah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan pemekaran maka terjadi wilayah administrasi baru yang dilengkapi dengan perangkat organisasi, dana, dan aparat yang juga baru.

Desa Bambang misalnya, merupakan desa yang sudah lama berdiri dengan wilayah yang sangat luas. Pada tahun 1985, dilakukan pemekaran dari desa tersebut menjadi dua buah desa yaitu Desa Bambang (seperti nama aslinya) dan Desa Sukaramai sebagai desa baru. Desa Sukaramai berjarak 8 km dari ibukota

kecamatan Belawang, 22 km dari ibukota kabupaten Barito kuala (Marabahan) dan 32 km dari ibukota propinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin).

Kepala desa Sukaramai dalam menjalankan tugas pemerintahan dibantu oleh Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum dan dua orang Kepala Dusun. Lembaga Musyawarah Desa sebagai mitra kerja Kepala Desa juga telah terbentuk dengan jumlah anggota sebanyak 11 orang, 1 orang sekretaris dan 1 orang ketua. Selain itu telah pula dilengkapi dengan terbentuknya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dengan jumlah anggota sebanyak 25 orang.

Pelaksanaan kegiatan administrasi dan pemerintahan oleh Kepala Desa dan perangkatnya sampai saat ini masih berlangsung di rumah Kepala Desa. Pada tahun 1991 telah selesai dibangun gedung/kantor Kepala Desa, berukuran 40 m². Gedung tersebut nampaknya belum dimanfaatkan dengan kegiatan administrasi pemerintahan desa, karena belum dilengkapi dengan fasilitas kerja yang diperlukan seperti meja dan kursi. Dari 17 buah jenis buku administrasi pemerintahan desa yang wajib dimiliki (diisi) baru 10 jenis buku yang terisi. Ketujuh jenis buku yang belum diisi tersebut adalah buku ekspedisi, buku tanah, buku perubahan penduduk, buku jumlah penduduk, buku anggaran desa, buku kas desa, dan buku kas pembantu.

Sekalipun kondisi administrasi demikian keadaannya, namun kegiatan pembangunan terutama upaya inovasi disegala aspek kehidupan terus dilaksanakan, ditunjukkan dengan kedatangan para petugas dari kecamatan dan kabupaten secara periodik.

2. Sumber daya Alam

Luas wilayah Desa Sukaramai tercatat sebesar 500 ha (atau sama dengan 5 km²). Penggunaan lahan terdiri dari 12,5 ha untuk perumahan, 327 ha untuk sawah, 29 ha untuk tegalan perkebunan rakyat, 11 ha untuk kolam, dan 120,5 ha masih berupa hutan yang belum dibuka.

Keadaan permukaan tanah datar dengan ketinggian berkisar antara 0-1,3 m dari permukaan laut. Berdasarkan penampilan tanaman yang diamati dilapangan, diperkirakan produktivitas tanah di Desa Sukaramai termasuk sedang.

Pada lahan sawah ditanami padi varietas lokal satu kali dalam setahun. Areal tegalan (guludan) ditanami pisang, rambutan dan jeruk. Pada tegalan dekat rumah ditanami kelapa.

Areal hutan yang belum dibuka yang seluas 120,5 ha sampai saat ini masih merupakan masalah bagi pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten karena penduduk asli Desa Bambang mempertahankan sebagai milik leluhur

mereka. Areal hutan tersebut merupakan tempat bermukim babi hutan yang selalu mengganggu tanaman penduduk Desa Sukaramai.

Kolam yang merupakan saluran sekunder yang juga sebagai sumber air bersih bagi penduduk Desa Sukaramai, ditaksir seluas 11 ha. Kolam untuk budidaya ikan masih merupakan suatu model percontohan yang terdapat dipekarangan rumah kepala keluarga desa. Ketersediaan air sepanjang tahun dari aliran sungai Barito memungkinkan introduksi budidaya ikan yang adaptif dan toleran.

Keragaman vegetasi terutama rumput-rumput alam yang dapat dijadikan hijauan makanan ternak memberi kemungkinan (peluang) untuk introduksi rumput hijauan unggul apabila sub sektor peternakan terutama ternak potong dan ruminansia kecil akan dikembangkan.

3. Sumber daya Manusia

Sampai pada tahun 1991, Desa Sukaramai berpenduduk 692 jiwa yang tersebar dalam 146 keluarga, terdiri atas penduduk asli Bambang dan pendatang dari Hulu Sungai. Rata-rata anggota keluarga adalah 4-5 jiwa dengan kepadatan sebesar 138 jiwa/km².

Potensi sumber daya manusia yang dapat dilihat dari sebaran penduduk dalam kisaran umur dan tingkat pendidikan disajikan dalam Tabel 28 dan 29 berikut ini.

Dari sebaran tersebut apabila umur kurang dari 20 tahun merupakan angkatan kerja, maka 43,2% penduduk Desa Sukaramai berada di atas angkatan kerja tetapi biasanya angkatan kerja dipedesaan dimulai pada usia yang lebih muda (15 tahun) sehingga angkatan kerja hanya sebesar 31.5%. Besarnya angkatan kerja ditambah lagi dengan penduduk berusia lanjut (lebih dari 55 tahun) yang besarnya 4.6% sehingga total beban yang harus dipikul oleh tenaga dewasa yang produktif (yang besarnya 63.9%) adalah 36.1%. Tugas-tugas sosial yang ditanggung oleh tenaga kerja dewasa produktif adalah mendidik dan menghidupi golongan usia lebih muda selain mengasuh golongan usia lanjut.

Tabel 28. Sebaran dan persentase penduduk berdasarkan kelompok umur, Desa Sukaramai.

Kisaran umur (thn)	Jumlah jiwa	Persentase
0- 4	69	10.0
5- 9	72	10.4
10-14	77	11.1
15-19	81	11.7
20-24	79	11.4
25-29	72	10.4
30-34	54	7.8
35-39	60	8.7
40-44	34	4.9
45-49	35	5.1
50-54	27	3.9
> = 55	32	4.6
Jumlah	692	100.0

Sumber : Monografi Desa Sukaramai, 1990/91.

Dari angka-angka tersebut tampaknya beban ketergantungan golongan usia muda dan golongan usia lanjut pada tenaga dewasa produktif tidak terlalu berat. Namun demikian sebagian tenaga yang tersedia tersebut tidak bekerja pada lahan pertanian yang ada di desanya, tetapi bekerja diluar desa sebagai kuli bangunan di Banjarmasin atau sebagai penebang kayu di daerah kabupaten Kotabaru. Mereka hanya sesekali pulang kedesa untuk mengirimkan sebagian hasil kerjanya kepada keluarga (isteri dan anak) yang ditinggalkan. Pola bekerja tersebut mengakibatkan lahan pertanian yang ada di desa menjadi kurang terkelola karena anggota keluarga yang ditinggal (isteri dan anak-anaknya) mempunyai kemampuan rendah dalam menggarap lahannya. Sesungguhnya lahan pertanian yang ada di Desa Sukaramai cukup potensial dan dapat memberikan penghidupan yang cukup baik tetapi dengan tiadanya tenaga produktif maka dinamika kehidupan perekonomian desa yang bertumpu pada pertanian berjalan sangat lamban.

Tabel 29. Sebaran penduduk Desa Sukaramai berdasarkan tingkat pendidikannya.

Tingkat pendidikan	Jumlah jiwa	Persentase
Belum sekolah	105	15.2
Tidak tamat SD	199	28.8
Tamat SD	349	50.4
Tamat SLTP	30	4.3
Tamat SLTA	9	1.3
Jumlah	692	100.0

Sumber : Monografi Desa Sukaramai, 1990/91

Dari tabel terlihat bahwa jumlah penduduk yang berpendidikan rendah (tidak tamat SD - tamat SD) mencapai 79,2%. Kondisi demikian ini merupakan masalah yang berat dalam upaya pengembangan berbagai aspek kehidupan. Bidang pekerjaan yang paling erat hubungannya dengan tingkat pendidikan demikian adalah pertanian. Untuk menjadikan pertanian yang maju dan berkembang diperlukan tenaga dan biaya yang sangat besar karena memberi motivasi untuk maju dan berkembang memerlukan waktu yang lama.

Jenis pekerjaan yang menjadi sumber pendapatan utama keluarga di Desa Sukaramai adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Jenis pekerjaan yang menjadi sumber pendapatan utama di Desa Sukaramai.

Jenis Pekerjaan	Jumlah (jiwa)
Pertanian sawah	
- Pemilik /penggarap	134
Perkebunan rakyat	18
Kerajinan tangan	25
Guru	3
Buruh	11
Pedagang	6

Dari Tabel 3 tampak bahwa proporsi jenis pekerjaan sebagai petani masih sangat dominan dan dihubungkan dengan tingkat pendidikan yang rendah (dominasi tamat dan tidak tamat SD) maka perlu bahan pertimbangan dalam memilih metode inovasi teknologi untuk pengembangan desa Sukaramai.

4. Infrastruktur

a. Sarana dan Prasarana

Desa Sukaramai terletak disepanjang sungai Barito yang menghubungkan ibukota propinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin) dengan ibukota kabupaten Barito Kuala (Marabahan). Terhadap kedua kota tersebut, desa Sukaramai berjarak masing-masing 32 km dan 22 km, dengan ibukota kecamatan Belawang berjarak 8 km. Perhubungan keibukota kecamatan dan ibukota kabupaten dapat ditempuh melalui jalan darat (sepeda atau sepeda motor) dan melalui jalan sungai dengan perahu kelotok, long boat atau speed boat. Perhubungan melalui sungai agak mudah karena desa Sukaramai berada disepanjang sungai Barito, selain jalan darat (tanah) sepanjang 5,5 km, juga dihubungkan dengan jembatan kayu ulin

sepanjang 75 m dan jalan sungai (saluran sekunder) sepanjang 2 km yang bermuara pada sungai Barito.

Pasar desa belum ada, sehingga kebutuhan bahan-bahan pokok sehari-hari hanya dijual pada beberapa kios sederhana yang tidak lengkap.

Gedung sekolah sebagai sarana pendidikan formal telah ada, yaitu gedung SD dengan 6 ruang dan berdaya tampung total 240 murid. Untuk pendidikan lebih lanjut (SLTP dan SLTA) belum ada di Desa Sukaramai, sehingga siswa yang ingin melanjutkan sekolahnya harus ke Desa Bambang dan ibukota kecamatan Belawang.

Pada tahun 1992 Desa Sukaramai memiliki gedung Puskesmas Pembantu tetapi belum difungsikan, karena terbatasnya tenaga medis.

Sarana ibadah bagi penduduk desa Sukaramai yang 100% beragama Islam hanya dilengkapi dengan 1 mesjid dan 2 langgar yang terbuat dari kayu.

Fasilitas penerangan (listrik) dan air bersih belum ada, dan sumber penerangan dari lampu petromak. Air berasal dari sungai Barito yang masuk ke desa Sukaramai melalui saluran sekunder tidak memenuhi persyaratan kesehatan digunakan sebagai air minum.

b. Kelembagaan

Kehidupan dan kegiatan kelompok pada hakekatnya diarahkan untuk mendapatkan kemudahan melalui sikap saling membantu, saling mendukung, saling bertukar informasi dan meningkatkan keterampilan.

Di Desa Sukaramai, kelembagaan yang kegiatannya mengarah pada perekonomian tampak belum ada atau walaupun ada belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Kelompok tani belum terbentuk, sehingga penyuluhan yang dilakukan oleh PPL tidak efektif. Koperasi Unit Desa tidak berfungsi lagi sehingga lembaga usaha bersama sama sekali kosong. PKK belum mengarah kepada kegiatan peningkatan keterampilan yang inovatif produktif. Kegiatan PKK selama ini masih semata-mata silaturahmi yaitu yasinan, dan arisan yang dilakukan secara priodik. Kegiatan Posyandu terutama memberikan imunisasi dan penimbangan bayi.

c. Tataan Sosial

Susunan desa Sukaramai terasa sangat tradisional, tampak dari mekanisme berbagai aspek kehidupan pemilikan lahan yang sebagian besar berdasarkan warisan dari orang tua. Sistem sewa- menyewa lahan hampir tidak terjadi, karena petani berstatus sebagai pemilik-penggarap. Sistem upah berkembang seperti halnya di desa-desa lain karena permasalahan kekurangan tenaga kerja.

II. Tingkat Kesejahteraan

A. Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator tentang tingkat kemiskinan disuatu wilayah adalah pendapatan perkapita.

Menurut monografi desa Sukaramai, pendapatan perkapita desa sebesar Rp 173.829/kapita/tahun.

Dengan batasan yang dikemukakan Sayogyo bahwa pada suatu penduduk desa dikategorikan miskin apabila pendapatan perkapita sebesar 240 kg beras/kapita/tahun (Rp 175.920/kapita/tahun), maka penduduk desa Sukaramai berada dibawah garis kemiskinan. Pendapatan perkapita desa Sukaramai adalah pendapatan desa dibagi dengan jumlah penduduk.

Lapangan kegiatan yang memberikan pendapatan desa tertinggi adalah sektor tanaman pangan yaitu sebesar Rp 107.067.220 diikuti oleh sektor jasa (Rp 9.963.335), sub sektor perikanan (Rp 6.405.850), perkebunan (Rp 5.804.500), peternakan (Rp 5.066.350), sektor transportasi dan angkutan Rp 1.710.000 dan sektor industri dan kerajinan (Rp 1.315.000). Dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh pertanian tanaman pangan, penduduk desa Sukaramai dikategorikan kurang sejahtera karena menurut Todaro (1983) penduduk dicirikan miskin bilamana sebagian besar berusaha tani disektor tanaman pangan.

Pendapatan perkapita yang rendah tidak hanya berpengaruh terhadap kemampuan menabung, tetapi juga pada tingkat kesejahteraan lainnya seperti pendidikan anak, kematian bayi, gizi keluarga, kesehatan anak dan pemenuhan kebutuhan dasar atau daya beli masyarakat.

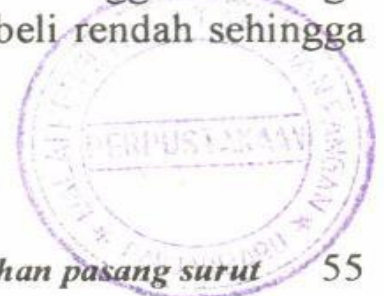
B. Indikator Mutu Hidup

Dalam mengidentifikasi indeks mutu hidup, indikator yang digunakan yaitu tingkat kematian bayi, status gizi, kualitas perumahan dan tingkat melek huruf.

Rata-rata tingkat kematian bayi pada tahun 1992 (IMR) sebesar 111, yang berarti setiap 1000 kelahiran terdapat 111 bayi yang meninggal (11%). Angka ini cukup tinggi (diatas 100) karena besarnya IMR negara ASEAN kurang dari 100 (Mantra, 1985).

Angka kematian bayi ini merupakan indikator yang sangat berguna karena tidak saja merefleksikan masalah kesehatan bayi tetapi juga tingkat kesehatan ibu. Kesejahteraan ibu dan anak tersebut erat kaitannya dengan status gizi.

Tingkat pendapatan keluarga yang rendah dengan jumlah anggota keluarga yang cukup besar yakni 4-5 orang/kk menyebabkan daya beli rendah sehingga penduduk mengkonsumsi gizi yang juga rendah.



Sebagai gambaran dari hasil RRA, pada umumnya masyarakat makan 2 kali sehari dengan pola konsumsi nasi, ikan dan sayur. Ikan segar tidak selalu setiap hari bisa dikonsumsi karena penduduk umumnya mendapatkan dengan cara memancing di sungai dan kalau ada yang menjual hanya tersedia satu kali seminggu di pasar desa. Demikian juga sayur, penduduk mengkonsumsinya 3-4 kali seminggu, sedangkan daging/ayam 2-3 bulan sekali. Pola makan yang demikian, tentunya belum memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna.

Disamping status gizi, kualitas perumahan juga merupakan indikator mutu hidup karena rumah yang sehat akan mempengaruhi tingkat kesehatan penduduk.

Indikator yang mengacu pada kualitas perumahan adalah luas bangunan minimum 40 m² rumah yang berventilasi/jendela, lantai dan dinding tidak lembab, dan memiliki WC.

Hasil identifikasi dari 123 buah rumah yang ada, menunjukkan bahwa 80% penduduk memiliki rumah dengan luas bangunan kurang dari 40 m². Pada umumnya rumah penduduk memiliki jendela, lantai dan dinding yang tidak lembab, karena rumah mereka berdinding papan (79%) dan beratap daun. Rumah yang memiliki WC hanya 14% dan 80% penduduk melakukan minum, cuci, mandi dan buang hajat di sungai. Keadaan demikian mengakibatkan berjangkitnya penyakit muntaber terutama pada musim kemarau.

Sebagai gambaran terakhir untuk menilai indeks mutu hidup guna mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Sukaramai adalah tingkat pendidikan berdasarkan tingkat melek huruf. Menurut monografi desa, usia 10-55 tahun tidak dijumpai yang buta aksara, dengan demikian tingkat melek huruf masyarakat cukup tinggi.

Walaupun demikian, pendidikan tertinggi masyarakat pada umumnya hanya tamat SD (50%), yang tamat SLTP sebesar 4%, tamat SLTA hanya 1% dan tidak tamat SD sebesar 29%.

III. Strategi Peningkatan Kesejahteraan

Uraian pada bab terdahulu menunjukkan bahwa, secara visual tingkat kesejahteraan penduduk desa Sukaramai masih tergolong rendah tetapi desa memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Masalah dan kendala yang dihadapi cukup banyak, yang harus dipecahkan agar tujuan peningkatan kesejahteraan dapat dicapai.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk perlu disusun strategi yang sistematis dengan mempertimbangkan potensi, masalah dan kendala yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan, serta alternatif pemecahan yang

dapat dilaksanakan yang didasarkan atas pengamatan lapang. Strategi yang akan diterapkan dibagi dalam beberapa bagian, yang satu sama lain saling terkait dan tidak bisa dipisah-pisahkan.

1. Sumberdaya Biofisik

Yang mendominasi permasalahan pada sumberdaya biofisik adalah tanah dan air, produktivitas tanaman, ternak dan ikan, serta faktor iklim yang dapat menjadi faktor penunjang. Permasalahan ini merupakan suatu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk. Untuk memecahkan masalah yang ada harus menggunakan teknologi dan pendekatan yang spesifik karena lahan yang ada sebagian besar adalah tanah sulfat masam yang tergolong marginal.

A. Iklim

Faktor iklim yang besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman adalah jumlah curah hujan dan sebarannya. Iklim yang ada di desa Sukaramai khususnya, seperti Kab. Barito Kuala ditinjau dari jumlah curah hujan tahunan berkisar 2000-3500 mm termasuk tipe B dengan 9 bulan basah dan hanya 2-3 bulan kering. Jumlah curah hujan dan sebarannya per bulan dapat dimanfaatkan untuk menyusun pola tanam dalam rangka pemanfaatan lahan agar lebih efektif dalam menunjang pendapatan keluarga. Bila keadaan curah hujan ini dimanfaatkan dengan benar untuk menyusun pola tanam, terutama tanaman pangan, maka peluang kegagalan panen akibat kekeringan menjadi kecil.

Temperatur yang ada berkisar antara 24-34°C, dan tidak pernah terjadi perubahan temperatur yang ekstrim sehingga faktor temperatur bukan merupakan faktor penghambat pertumbuhan dan hasil tanaman.

B. Tanah dan Air

Ditinjau dari gerakan pasang surut air, lahan yang ada sebagian termasuk lahan pasang surut tipe A dan sebagian lagi tipe B. Sebagian besar petani memiliki lahan 1,0 ha, tanpa ada petani penyakap. Tanah yang belum dibuka menjadi lahan pertanian masih sangat luas sekitar 1/3 luas desa, masih berupa hutan galam.

Walaupun lahan yang dimiliki luas, tetapi tingkat kesuburannya rendah yang dicirikan dengan pH rendah, kahat hara P dan Ca, serta keracunan Al dan Fe. Bahaya keracunan pirit merupakan ancaman yang serius karena bila pengolah tanah tidak tepat dan pirit terangkat keatas maka tidak ada tanaman yang dapat tumbuh.

Menurut sejarah desa itu, dulu hutan galam yang ada sebagian besar sudah dibuka untuk lahan pertanian. Saat dibuat saluran air, tanah yang diangkat untuk pembuatan saluran masuk ke lahan petani menyebabkan matinya tanaman yang diusahakan. Hal ini membuat petani jera serta lari meninggalkan lahannya tetapi tidak melupakan haknya atas tanah sehingga sekarang menjadi hutan galam. Hal inilah yang menjadi masalah karena petani tidak mau melepaskan haknya, sedangkan tenaga kerja yang tersedia sudah habis untuk menggarap lahan yang telah dibuka.

Air yang masuk langsung dari Sei. Barito kualitasnya cukup baik dan kaya unsur hara terutama Mg karena adanya 'enrichment' dari air sungai dan pencucian unsur meracun lebih efektif sehingga pada lahan pasang surut tipe A ini, tanaman padi tumbuh baik. Masalah yang timbul adalah selalu tingginya air masuk ke lahan. Akibatnya varietas padi yang adaptif untuk lahan seperti ini hanya varietas lokal seperti Pandak, Bayar dan Siam yang tanamannya tinggi, umurnya dalam dan hasilnya rendah. Varietas unggul dengan tinggi sekitar 115-125 cm, umur pindah bibit sekitar 21 hari tidak diusahakan karena bisa tenggelam. Kendala lain yang dihadapi di lahan tipe A ini adalah masalah kegaraman pada saat kemarau panjang.

Untuk lahan pasang surut tipe B, air hanya masuk bila pasang besar sehingga untuk mencuci hara yang dapat meracun lebih banyak diharapkan dari air hujan. Pada pasang kecil, air tidak sampai kelahan petani dan air yang berasal dari hutan galam dan curah hujan lebih dominan. Air dari hutan galam ini kualitasnya tidak baik dan dapat merangsang terjadinya keracunan besi pada pertanaman padi. Keadaan di lapang menunjukkan keadaan yang lebih buruk lagi karena pintu-pintu air yang ada tidak berfungsi lagi yang menyebabkan air pasang besar tidak sampai kelahan petani sehingga pencucian yang terjadi tidak sempurna. Akibatnya, dalam suasana tergenang tanaman padi mengalami keracunan besi dan hasilnya rendah.

Air pasang surut yang berasal dari Sei. Barito, pada saluran sekunder juga digunakan oleh penduduk untuk air minum, mandi, cuci serta kakus. Hal ini menjadi masalah besar, terutama saat kemarau, karena cepatnya berjangkit penyakit muntaber. Penyediaan sumur pompa atau penampung air seperti dari proyek cipta karya, sangat penting untuk mengatasi air minum dan menghindari berjangkitnya penyakit, serta tempat mck untuk penduduk perlu dibangun.

C. Produktivitas Tanaman

Untuk tanaman pangan, padi merupakan tanaman utama yang diusahakan petani dengan menggunakan varietas lokal, baik pada lahan tipe A dan tipe B.

Pada lahan pasang surut tipe A, dimana air selalu cukup tinggi (>25 cm), bahkan dapat mencapai >50 cm (terutama pada musim hujan), terkadang membawa air berlumpur yang dapat melekat pada daun. Hasil penelitian LAWOO-Balittan di lokasi tipe A menunjukkan bahwa dengan pengelolaan air sekalipun genangan air ini masih sulit diatur (Kselik, 1990).

Balittan Banjarbaru turut melaksanakan penelitian tata air tipe A untuk mengendalikan air, meningkatkan intensitas tanam dan hasil tanaman. Pada kondisi seperti ini pertanaman hanya dapat dilakukan sekali setahun, dengan varietas lokal dimana transplanting dilaksanakan 2-3 kali. Menyemai (teradak) biasanya dilakukan pada Oktober - awal November, sedang tanam sekitar awal Maret, serta panen bulan Agustus. Keadaan ini juga berlangsung pada lokasi lahan pasang surut tipe A di Kalimantan Selatan. Walaupun panen hanya 1 kali setahun, hasil pada lahan tipe A sekitar 2,5-3,5 t/ha lebih tinggi dibanding dengan tipe B dan tipe C.

Untuk meningkatkan hasil padi lahan pasang surut tipe A, bisa dilakukan melalui pendekatan varietas, yaitu mencari varietas yang berdaya hasil tinggi, umur menengah (115-125 hari), mempunyai kemampuan memanjang cukup cepat dan tahan kegaraman air. Bila hal ini sulit dikembangkan, maka lahan ini harus lebih banyak dimanfaatkan untuk tanaman keras yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi seperti jeruk, rambutan, sawo, dan kelapa pada guludannya. Dengan sistem ini tumpuan pendapatan keluarga lebih banyak pada hasil tanaman keras, sedang tanaman padi hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Okupasi areal antara padi dan tanaman keras, ditentukan dengan menghitung kebutuhan keluarga terhadap beras/th dengan asumsi hasil padi 2,5-3,5 t/ha, berapa luasan yang harus ditanami padi. Dengan asumsi jumlah anggota keluarga dalam 1 KK = 5-6 orang, maka kebutuhan beras /th = 600- 720 kg sehingga luas lahan yang diharapkan ditanami padi = 0,36 ha, sisanya dibuat tabukan yang ditanami tanaman keras atau sayuran.

Sama seperti lahan pasang surut tipe A, lahan pasang surut tipe B juga masih menggunakan padi varietas lokal dengan hasil yang lebih rendah (1,5-2,5t/ha) karena lahan ini umumnya lebih masam (pH 3,5-4,5), kahat hara P dan Ca, serta mengalami keracunan Al dan Fe.

Sebenarnya lahan ini mempunyai peluang besar untuk ditingkatkan intensitas tanamnya, bukan hanya satu kali setahun, yaitu dengan memanfaatkan varietas unggul pada pertanaman pertama (Oktober-Pebruari) dan varietas lokal (Maret-Agustus) pada pergiliran berikutnya. Syarat utama agar pola ini dapat berjalan adalah dengan pengaturan tata air. Yang harus mendapat perhatian adalah perbaikan pintu-pintu air, serta mengfungsikan kembali saluran yang ada untuk pemasukan serta drainase. Dengan sistem tata air yang baik, pencucian

akan lebih cepat sehingga varietas unggul dapat diusahakan. Hasil penelitian Balittan-LAWOO di Unit Tatas (Kalimantan Selatan) dan penelitian pengembangan padi pasang surut telah membuktikan bahwa intensitas tanam lahan pasang surut tipe B dapat ditingkatkan. Varietas Kapuas, IR64, IR66 dengan input yang tepat memberikan hasil antara 4,0-5,0 t/ha.

Selain tanaman pangan, tanaman keras seperti jeruk, kelapa, rambutan, sawo, pisang, kecapi cukup adaptif tumbuh di guludan (tukungan) yang dibuat petani. Hampir semua petani memiliki tanaman pisang yang hasilnya dapat menambah pendapatan mereka. Pemeliharaan yang minim merupakan penyebab rendahnya hasil. Sekarang ini terlihat minat petani yang besar untuk menanam jeruk dilahan tipe A, serta rambutan dilahan tipe B karena melihat keberhasilan desa tetangganya serta mulai masuknya petani lain ke desa ini.

D. Ternak dan Ikan

Ternak ayam buras mendominasi ternak di desa ini dan sebagian besar petani memilikinya. Ternak dilepas di pekarangan sehingga pengeluaran untuk biaya pakan hampir tidak ada. Kelebihan ternak ayam, selain biaya pemeliharaan sedikit, mudah dipasarkan sehingga dapat menunjang ekonomi rumah tangga. Ternak ayam ini nampaknya cukup adaptif dengan lingkungan pasang surut yang cukup banyak air.

Ada beberapa petani yang memelihara kambing, nampaknya cukup baik walaupun kondisi kandang dan pakannya masih sangat terbatas. Tidak semua petani dapat memelihara ternak ini karena modal yang diperlukan cukup besar, serta diperlukan tambahan tenaga untuk mencari pakannya setiap hari.

Selain itu, ternak ini juga sulit dilepas, seperti kebiasaan petani, karena bisa memakan tanaman palawija yang diusahakan digalangan seperti kacang panjang, labu.

Ternak sapi yang juga memerlukan modal besar tidak terlihat di desa ini. Hal ini berhubungan erat dengan keadaan sosial dan modal serta pakan yang tidak mampu disediakan ditambah lagi kebanyakan anggota keluarga yang tinggal setelah tanam padi hanya perempuan dan anak-anak. Petani sampai sekarang tidak mampu memanfaatkan ternak sapi secara optimal, sebagai ternak kerja karena pengolahan tanah dilakukan secara tradisional (tajak).

Bila akan mengusahakan ternak sapi yang dapat pula dimanfaatkan sebagai ternak kerja selain tabungan, yang diperlukan adalah meningkatkan keterampilan petani untuk memelihara sapi, disamping cara penyediaan pakan yang terencana (menanam hijauan pakan ternak).

Pada daerah yang kondisinya banyak air, peluang budidaya air tawar cukup besar, baik dengan pola mina padi maupun dengan pembuatan kolam di pe-

karangan. Sekarang ini untuk memenuhi protein hewani dari ikan petani memperolehnya dari sungai, tetapi semakin sudah sulit diperoleh karena lokasi tempat mencari ikan semakin jauh. Akibatnya, harga yang harus dibayar semakin mahal sehingga keluarga petani tidak mungkin membelinya setiap hari. Dimasa lalu banyak petani yang menggunakan potash, berakibat ikut matinya anak-anak ikan dan populasi ikanpun menurun.

Pengenalan budidaya ikan dikolam sudah saatnya digalakkan ataupun memanfaatkan sistem mina-padi. Untuk menjawab hal ini kualitas dan pengetahuan PPL harus ditingkatkan, selain frekuensi penyuluhan yang lebih tinggi.

2. Teknologi

Teknologi untuk tanaman pangan, terutama untuk lahan-lahan pasang surut tipe B dan C yang cukup andal dari hasil-hasil penelitian Balittan Banjarbaru khususnya, serta Puslitbangtan umumnya cukup banyak serta teruji pada lokasi-lokasi yang luas.

Sasaran teknologi yang akan dikembangkan di pasang surut diusahakan memiliki kretaria; (1) meningkatkan produksi; (2) mengurangi biaya produksi; (3) mengurangi jumlah tenaga kerja; (4) stabilitas dan sustainabilitas teknologi tinggi.

Teknologi yang digunakan untuk lahan pasang surut tipe B sangat spesifik dibanding lahan-lahan lain, baik cara, varietas dan input yang diberikan. Pengelolaan tata air yang bertujuan untuk pencucian zat-zat yang meracuni merupakan satu persyaratan yang harus di penuhi bila ingin mengusahakan padi dua kali setahun dengan pola padi unggul-padi lokal. Untuk mengusahakan padi unggul diperlukan ketepatan cara, waktu dan input pupuk yang diberikan serta pemeliharaan varietas yang berdaya hasil tinggi dan adaptip seperti padi varietas Kapuas dan Musi. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa galur yang memberikan harapan besar untuk dilepas menjadi varietas unggul baru untuk lahan pasang surut, seperti BW 267-3, IR19661, CR 261, IR3240 dan IR6023. Walaupun demikian dengan menggunakan dosis pupuk yang tepat, varietas IR64, IR66 dan IR42 cukup baik pertumbuhan dan hasilnya. Umumnya di Desa Sukaramai ini petani hanya memberikan pupuk urea dan kadang-kadang TSP, serta sebagian petani tidak mengenal pupuk KCl. Dosis pupuk yang diberikan hanya 50 kg/ha urea (22,5 kg/ha N) serta 25 - 30 kg/ha TSP (12,5-15,0 kg/ha P₂O₅), sama untuk kedua tipe lahan (tipe A dan tipe B). Rendahnya dosis pupuk yang diberikan diduga berhubungan erat dengan pengalaman serta kecilnya modal yang dimiliki petani. Varietas lokal kurang tanggap terhadap pupuk buatan dengan dosis tinggi, dan daya hasil varietas lokal hanya berkisar 3,0-4,0 t/ha. Walaupun demikian, keinginan petani untuk menggunakan pupuk buatan sudah besar dan

untuk pengadaannya petani membeli dengan pembayaran setelah panen. Hal ini karena tidak ada uang tunai yang tersedia, dan harga 100 kg pupuk urea 12 blek gabah.

Teknologi yang digunakan petani untuk budidaya padi masih sangat sederhana dengan HOK yang cukup rendah (70-80 HOK). Kegiatan yang banyak menggunakan tenaga adalah saat penyiapan lahan, tanam dan panen. Sebagian besar kegiatan untuk tanam dan panen dilaksanakan secara gotong-royong sehingga lahan yang bisa ditanami sampai 70 borong (sekitar 2 ha). Setelah tanam, sebagian petani laki-laki berangkat untuk mencari pekerjaan lain (off-farm), seperti membatang, memburuh yang tempatnya jauh dari desa tersebut, seperti Banjarmasin dan Kotabaru. Sebagian lagi petani yang tidak punya keahlian, bekerja jadi nelayan. Pemeliharaan padi selanjutnya diserahkan pada istri dan anak-anak mereka dengan pengelolaan yang minimum. Terapan teknologi seperti ini dan rendahnya hasil yang dicapai serta penanaman yang hanya sekali setahun, tidak dapat dijadikan tumpuan sepenuhnya bagi ekonomi keluarga, sehingga petani terpaksa meninggalkan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan.

Peluang penerapan teknologi baru dengan meningkatkan intensitas tanam menjadi 2x setahun cukup besar untuk dilaksanakan. Konsekuensinya, petani harus selalu berada dilokasi terutama bila menanam varietas unggul, karena dibutuhkan ketepatan cara, waktu, dan jumlah pupuk yang diberikan, dan perlindungan yang lebih insentif terutama terhadap serangan hama/penyakit. Syarat lainnya adalah keserempakan waktu tanam dan umur varietas yang tidak terlalu jauh berbeda. Keserempakan varietas tanam ini sangat besar pengaruhnya terhadap penanggulangan hama penyakit, seperti tikus, walang sangit yang merupakan hama utama.

Untuk mencapai sasaran ini aktivitas penyuluhan dan kegiatan kelompok serta keterlibatan aparat pemerintah sangat besar diperlukan. Dosis pupuk untuk lahan pasang surut berkisar 90 kg/ha N - 90 kg/ha P₂O₅ - 50 kg/ha K₂O dan 1,0-2,0 t kapur/ha.

Penelitian yang layak untuk menjawab sasaran teknologi yang akan dicapai antara lain : penerapan lahan menggunakan traktor yang didahului bush cutter, menggunakan cara tanam sebar langsung, pengendalian hama dengan herbisida dan tata air, varietas yang adaptif, dll.

Untuk tanak pasang surut tipe A, diharapkan peningkatan kesejahteraan petani lebih dititikberatkan pada hasil tanaman keras, seperti jeruk atau sawo, sedangkan padi varietas lokal hanya dikerjakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga (subsisten). Jarak antar galangan 5,0-10,0 m cukup memadai.

Proporsi tanaman padi di lahan tipe B dengan tanaman keras seperti rambutan bisa lebih lebar dari tipe A karena peluang peningkatan produksi padi di lahan ini lebih besar, bila air ditata dan diberi input yang cukup.

Untuk teknologi budidaya tanaman keras di galangan, petani dapat belajar dari petani lain yang telah berhasil mengelolanya, seperti petani jeruk di Sei. Madang atau Sei. Tandipah. Penerapan teknologi seperti ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya.

Faktor penunjang yang sangat berperan untuk peningkatan keterampilan petani adalah keberadaan PPL yang punya kualitas khusus untuk lahan pasang surut. Akan sangat berat beban yang harus dipikul apabila PPL yang diturunkan belum memiliki keterampilan demikian karena tantangan dan masalah yang dihadapi di lahan ini sangat besar dan serius. Ketersediaan saprodi juga harus diperhatikan dengan menghidupkan kembali KUD dan kios pertanian.

Untuk mengembangkan sektor peternakan dan perikanan, prioritas lebih diarahkan pada penyediaan benih ikan atau ternak bermutu, suatu penyuluhan tentang teknologi penelitian, seperti : mina padi, pembuatan kandang dan penyediaan pakan.

3. Sumberdaya Manusia

Tenaga produktif (umur 15-49 tahun) yang tersedia di desa ini sekitar 605 orang. Ditinjau dari teknologi tanaman pangan yang dilaksanakan dan kesempatan bekerja off-farm yang cukup besar maka HOK yang belum dimanfaatkan atau tersedia masih cukup banyak bila ingin melaksanakan teknologi baru.

Masalahnya terletak pada bagaimana merubah kebiasaan dan teknologi yang ada, dimana tidak diperlukan ketepatan waktu, cara dan jumlah pupuk yang diberikan. Untuk merubah kebiasaan diperlukan waktu dan usaha keras, seperti meningkatkan frekuensi penyuluhan, dan latihan-latihan anggota kelompok tani. Dilihat dari tingkat pendidikan penduduk desa ini yang hanya sampai tamat SD sekitar 51% dapat dijadikan parameter untuk mengukur kemampuan adopsi teknologi petani yang masih rendah. Prioritas penelitian dengan melibatkan petani secara langsung dapat mempercepat proses alih teknologi, seperti penelitian pengembangan atau penelitian paket teknologi.

Pengalaman berusaha petani penduduk desa ini hanya dengan teknologi yang turun-temurun. Jadi masih belum tahu banyak atau terampil untuk teknologi baru dengan sistem surjan.

Tingkat kesehatan penduduk secara visual dari anak-anaknya terlihat kurang baik. Hal ini didukung dengan kualitas perumahan yang terlalu kecil (ukuran 4 x 6 m untuk 5-6 jiwa/KK) dan ventilasi yang kurang. Juga status gizi terutama protein hewani yang sulit terjangkau karena semakin sulitnya mencari

ikan. Sumber vitamin, seperti pisang yang diusahakan sebagian besar untuk dijual, bukan untuk dikonsumsi. Kesadaran terhadap gizi perlu ditingkatkan terutama untuk kalangan ibu rumah tangga dengan lebih mengaktifkan penyuluhan melalui program PKK, serta mengaktifkan kebun PKK, disamping pengetahuan beternak. Jadi aktivitas PKK tidak hanya untuk berkumpul, arisan, yasinan tetapi juga diselipkan program-program penyuluhan.

4. Modal

Modal berupa uang tunai untuk membeli saprodi tidak tersedia, karena habis untuk biaya hidup sehari-hari. Selain itu KUD yang dapat menolong menyediakan saprodi dan biaya usahatani melalui KUT sudah tutup, sedangkan KUD yang masih berfungsi ada didesa tetangga (5-7 km dari desa). Untuk membeli pupuk, petani berhutang pada pedagang, dengan pembayaran setelah panen (100 kg urea = 12 kg beras). Harga pupuk termasuk mahal sehingga meningkatkan biaya produksi dan mengurangi keuntungan yang diperoleh.

Selain itu pada saat panen, harga jual ditingkat petani lebih rendah dari harga dasar, seperti yang terjadi sejak tahun 1992. Harga yang diterima petani bervariasi antara Rp 2300- 2700/blek pada pedagang pengumpul, tetapi di KUD desa Terantang harga gabah Rp 3000/blek.

Upaya menghimpun modal dikelompok tani atau disimpan berupa beras dapat digalakkan, tetapi dengan syarat produktivitas tanaman padi harus ditingkatkan. Pengusahaan tanaman keras sebagai penunjang utama ekonomi rumah tangga petani juga perlu digalakkan. Selain itu, KUD dihidupkan kembali dengan pengurus yang memprioritaskan kepentingan umum.

Bila ingin mengembangkan budidaya sistem surjan, baik untuk lahan tipe A maupun tipe B, modal yang dibutuhkan lebih besar lagi dibanding hanya tanaman pangan, terutama untuk pengadaan bibit tanaman keras dan upah kerja pembuatan galangan/tabukan. Diperlukan kebijakan untuk memudahkan petani meminjam kredit dari Bank sebagai modal usaha atau ada pengusaha yang jadi bapak angkat (pembantu modal) untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Apabila tanaman keras digalakkan, masalah harga terutama saat panen perlu diantisipasi lebih dini agar tidak terlalu rendah. Perlu dimotivasi para pemilik modal untuk berusaha dibidang pertanian (agribisnis), seperti pabrik pengawetan atau kemasan sehingga harga tidak jatuh.

5. Kelembagaan

Tutupnya KUD yang pernah ada merupakan salah satu faktor yang menyebabkan petani sulit menerapkan teknologi baru, terutama yang berkaitan dengan penyediaan saprodi, modal kerja (KUT), maupun pemasaran hasil. Sebenarnya

keinginan petani untuk menjadi anggota KUD cukup besar. Oleh karena itu KUD perlu dihidupkan kembali dengan kepengurusan yang lebih mementingkan keperluan petani.

Selain KUD, tidak tersedianya pasar desa merupakan penyebab rendahnya harga yang diterima petani. Pasar yang tersedia pada desa-desa disekitarnya memerlukan transportasi yang sebagian besar melalui air atau petani membawa hasil panennya (kelapa, pisang) dengan perahu kecil (jukung) dengan kapasitas angkut yang sedikit. Akibatnya, petani terpaksa menjual pada pedagang pengumpul yang tentu saja harganya lebih murah. Bila tidak dijual hasil tersebut membusuk padahal petani memerlukan uang untuk kebutuhan hidupnya.

Sarana kesehatan yang ada di desa ini adalah Puskesmas Pembantu yang baru saja berdiri dan diperuntukan juga bagi desa-desa disekitarnya. Untuk berobat ke Puskesmas ini di tarik bayaran yang cukup mahal (Rp 1000 setiap kali berobat), yang dirasakan sulit dijangkau petani. Akibatnya, kalau tidak terpaksa sekali petani tidak akan berobat ke Puskesmas, walaupun minat untuk menjaga kesehatan cukup besar. Jumlah biaya yang harus dibayar tersebut perlu ditinjau kembali oleh pengambilan kebijakan (Pemda) agar bisa terjangkau petani yang tingkat ekonominya rendah. Besarnya biaya tidak bisa disamakan untuk setiap Puskesmas Pembantu yang ada, karena bergantung pada pendapatan perkapitanya.

Pemerintahan desa yang ada nampaknya belum berfungsi baik dan selama survei kantor desa tidak pernah dibuka. Juga tidak terlihat aparat desa lainnya. Lembaga-lembaga informal yang cukup baik terselenggara adalah kegiatan yasinan, maulid dan sejenisnya. Kesempatan menyampaikan penyuluhan desa dan pesan pesan sangat terbatas waktunya. Upaya untuk mengaktifkan lembaga formal ini dapat ditempuh dengan jalan meningkatkan insentif Kepala Desa dan aparatnya. Diharapkan dengan berfungsinya lembaga ini seluruh keluhan dan masalah yang dihadapi penduduk bisa ditampung dan disampaikan pada lembaga yang terkait.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sukaramai

Dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan petani di desa Sukaramai mulai dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki dan memecahkan masalah yang dihadapi.

Untuk mencapai sasaran ini pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu dari berbagai instansi yang terkait.

Beberapa program yang dibuat untuk menanggulangi kemiskinan di desa ini antara lain:



Sektor Pertanian

Sektor pertanian dibagi dalam beberapa sub sektor yaitu: tanaman pangan, tanaman keras dan hortikultura, perikanan dan peternakan.

1. Tanaman Pangan

Upaya untuk meningkatkan pendapatan petani adalah dengan meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas tanam.

Pendekatan yang dilakukan dengan perakitan varietas unggul, penerapan tata air, pola tanam dan teknologi yang hemat tenaga, serta sistem surjan.

Varietas yang diinginkan untuk lahan pasang surut adalah berdaya hasil tinggi (5,0-6,0 t/ha), umur 115-125 hari, tinggi medium, adaptif terhadap tanah sulfat masam dan tahan terhadap keragaman serta pertumbuhannya cepat untuk lahan pasang surut tipe A.

Penerapan sistem tata air merupakan syarat yang harus dilakukan agar peningkatan intensitas tanam meningkat dari 1 kali menjadi 2 kali setahun. Pada prinsipnya sistem tata air untuk mengatur keluar masuknya air untuk memperlancar proses pencucian zat-zat beracun yang ada di lahan. Selain itu, fungsi tata air untuk mengatur ketinggian air yang dikehendaki.

Untuk proses adopsi teknologi, agar tidak terjadi perubahan drastis dari teknologi yang biasa dilakukan sehingga proses itu mempunyai peluang yang besar untuk diterima. Pola yang diharapkan untuk meningkatkan intensitas tanam adalah padi unggul-padi lokal. Bahan pertimbangan untuk pemilihan pola ini adalah ketersediaan tenaga kerja, tingkat keterampilan yang dimiliki dan tidak langsung menghilangkan kesempatan off-farm. Penanaman varietas unggul menghendaki ketepatan waktu dari pupuk dan benih, pemeliharaan yang intensif sehingga diperlukan tenaga kerja yang lebih banyak dan petani harus selalu di tempat.

Untuk mengatasi masalah tenaga kerja ini, Balittan Banjarbaru telah melaksanakan penelitian tentang cara tanam sebar langsung untuk mengurangi tenaga kerja untuk tanam, kemungkinan penggunaan mekanisasi (traktor dan bush cutter), dan penggunaan herbisida untuk mengendalikan gulma.

Dampak dari peningkatan intensitas, produktivitas dan teknologi dan hemat tenaga diharapkan dapat meningkatkan peranan lahan pasang surut untuk menunjang swasembada beras. Hal ini bisa tercapai jika meningkatkan luas lahan garapan dan memanfaatkan lahan-lahan tidur. Yang penting diperhatikan dalam pengembangan tanaman pangan adalah waktu tanam yang serempak untuk mengendalikan hama-hama penting tanaman padi.

Instansi yang terkait untuk menangani tanaman pangan adalah Balittan, PU, Dinas Pertanian dan Pemda.

2. Tanaman Keras dan Hortikultura

Tanaman keras dan hortikultura dapat dijadikan tumpuan pendapatan petani di lahan pasang surut, seperti jeruk, rambutan, pisang dan sayuran.

Tanaman ini ditanam pada guludan atau galangan dengan sistem surjan. Masalah yang dihadapi adalah ketersediaan modal yang cukup besar dan benih bermutu, serta pengetahuan petani tentang cara bertanam dengan sistem ini.

Kebijakan pemerintah tentang kemudahan mendapatkan kredit juga diperlukan agar sasaran ini dapat dicapai.

3. Perikanan

Peluang penerapan teknologi mina padi di desa ini sangat besar karena tersedianya air yang banyak, benih ikan yang baik tetapi cara pelaksanaannya sangat menentukan keberhasilannya. Peranan PPL pangan dan perikanan yang mampu sangat diperlukan.

4. Peternakan

Penyempurnaan cara pemeliharaan ayam buras perlu digalakkan karena petani sudah menyadari besarnya peranan ternak ayam buras dalam menunjang/menopang ekonomi petani. Yang perlu diperhatikan adalah pakan dan kandang.

Introduksi paket ternak kambing dan sapi perlu diperkenalkan melalui program Banpres. Ternak sapi selain sebagai tabungan juga dapat digunakan untuk ternak kerja. Penyediaan hijauan makanan ternak harus direncanakan.

Institusi/lembaga yang sangat terkait dalam program ini adalah Bimas Peternakan.

5. Pembinaan Kelompok Tani dan Peran PPL

Penggalakan kelompok tani melalui diskusi dan aktivitas lapangan perlu ditingkatkan oleh PPL. Selain itu, perlu digalakkan perhimpunan dana sebagai modal petani dari hasil panen.

PPL yang ditempatkan dilokasi lahan pasang surut perlu ditingkatkan pengetahuannya karena banyaknya masalah yang dihadapi. Adalah tidak tepat bila lokasi pasang surut dijadikan sebagai tempat para PPL yang belum berpengalaman.

KESIMPULAN

1. Tingkat kemiskinan penduduk desa Sukaramai ditandai oleh; pendapatan per kapita berada dibawah garis kemiskinan (Rp 173829/kap/th), rata-rata tingkat kematian bayi (IMR) yang cukup tinggi (111 orang per 1000 kelahiran), status gizi dan kualitas perumahan rendah.
2. Penyebab kurang sejahteranya penduduk adalah sumberdaya biofisik yang miskin (tingkat kesuburan rendah, keracunan Al & Fe dari kegaraman); kualitas sumber daya manusia yang rendah (tingkat pendidikan rendah, pengalaman dan keterampilan terbatas pada teknologi yang ada); teknologi tidak tersedia (penataan lahan tidak ada, dosis pupuk rendah, tidak mengenal KCl, intensitas tanaman rendah); modal kurang/tidak tersedia (KUT tidak ada, beli pupuk secara kredit, penciptaan modal tidak ada, kegagalan kelembagaan (KUD dan kelompok tani tidak berfungsi).
3. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyebab kemiskinan adalah meningkatkan kualitas sumberdaya biofisik ; (pengaturan tata air, varietas tahan, pemupukan spesifik lahan) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia; (pengolahan dan latihan kelompok tan itentang divesifikasi tanaman; penelitian dengan melibatkan petani) menciptakan teknologi yang mampu menjawab permasalahan di lapangan; (penataan lahan, perbaikan pintu-pintu air, meningkatkan intensitas tanam) meningkatkan kemampuan petani dalam menciptakan modal (KUT) dan mengurangi kegagalan kelambagaan (fungsi KUD diterapkan, mengaktifkan kelompok tani).

DAFTAR PUSTAKA

- Kantor Pembangunan Desa Barito Kuala, 1990, Monografi desa Sukaramai, Marabahan.
- Kselik, R.A.L., 1990. Water management on acid sulphate soils at Pulau Petak, Kalimantan. In Papers Workshop on acid sulphate soils in The Humid Tropics. November. 1990. AARD & LAWOO. Bogor.
- Mantra I.B., 1985. Pengantar Studi Demografi. Penerbit Nur Cahaya. Yogyakarta.
- PSE, 1991. Rencana Penelitian identifikasi wilayah Miskin di Indonesia dan alternatif penanggulangannya. Bogor.
- Sayogyo, 1982. Menelaah Garis Kemiskinan. Makalah dalam Lokakarya Metodologi Kaji Tindak Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Kecil 20-23 Desember. IPB. Cisarua.
- Todaro, M.P., 1983, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Penerbit Ghalia. Indonesia.



SUMBERDAYA DAN INFRASTRUKTUR DI DESA BANITAN

Rachmadi Ramli, Nurul Fauziati dan Agus Supriyo

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan resultante dari ketersediaan sumber daya alam dan tingkat kemampuan masyarakat yang memanfaatkannya. Ada dua pengertian kemiskinan, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut yang memberikan implikasi amat berbeda dalam pemecahannya karena memang sifatnya berbeda, demikian pula sebab-sebabnya (Mubyarto, 1982). Dalam hal kemiskinan absolut masalahnya dapat lebih mudah dianalisis dan ditangani sebagai masalah ekonomi.

Sumber daya alam pasang surut relatif tidak berbeda antar kawasan, namun terjadi perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar kawasan tersebut. Perbedaan-perbedaan tersebut bisa disebabkan oleh tingkat kemampuan masyarakatnya atau infrastruktur yang terbatas maupun interaksi keduanya.

Untuk menentukan alternatif-alternatif pemecahan masalah perlu dikaji faktor penentu, independen maupun faktor dependen.

SEJARAH PERKEMBANGAN DESA

Desa Banitan terletak lebih kurang 15 km dari pusat kecamatan Bakumpai, kabupaten Barito Kuala. Desa ini berbatasan dengan desa Palingkau (Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah), desa Balukung, desa Sungai Lirik dan desa Sungai Salai (Kab. Tapin, Kalimantan Selatan). Desa ini sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang, terletak dipinggir sungai Barito memanjang sekitar 2 km. Perumahan penduduk berada disepanjang pinggir sungai.

Desa ini dahulunya merupakan hutan galam, berkembang menjadi areal persawahan dan pemukiman penduduk. Hutan galam diambil kayunya atau arealnya sebagian dijadikan persawahan yang ditanami padi atau purun.

Perkembangan usahatani padi dan purun ini berfluktuasi karena pengaruh cekaman lingkungan, seperti sering terjadi kebakaran. Baru sepuluh tahun terakhir usaha penanaman padi berkembang lagi. Pada waktu yang sama, penanaman purun berkurang karena tergeser oleh usahatani padi. Tanaman purun dapat dijadikan bahan anyaman seperti tikar, keranjang dan topi.

Sumberdaya Alam

Lahan diwilayah desa Banitan merupakan lahan yang dipengaruhi oleh pasang surut tipe B. Sebagian besar masih berupa hutan galam dan sebagian sudah dijadikan lahan persawahan.

Perairan yang terdapat pada hutan galam, sungai maupun persawahan merupakan sumber usaha penangkapan ikan, namun belum ada usaha-usaha pengembangan perikanan secara intensif.

Tanah diwilayah ini terdiri dari tanah sulfat masam potensial dan bergambut, namun dapat diusahakan tanaman padi dengan baik asalkan pengolahan tanahnya dilakukan dengan tepat.

Terdapat 9 buah handil yang berupa anak-anak sungai yang menghubungkan areal sawah dengan sungai besar (Barito) serta 4 buah tabukan yang dapat berfungsi sebagai pengendali air karena tebal dibuat pintu-pintu air. Pintu-pintu air yang ada sangat sederhana, dibuat oleh masyarakat setempat.

Dari luas wilayah sekitar 5.900 ha, sebagian besar berupa hutan galam (3.500 ha), selebihnya adalah perumahan dan pekarangan (15 ha), sawah (361 ha), perkebunan rakyat (75 ha), danau (1.425 ha), lain-lain (524 ha).

Persawahan yang ada pada umumnya ditanami padi lokal dan hanya sedikit padi unggul. Beberapa petani membuat galengan di sawah yang dapat ditanami buah-buahan atau palawija dan sayuran.

Sumberdaya Manusia

Penduduk desa ini hanya berjumlah 576 orang yang terdiri dari 285 laki-laki dan 291 perempuan. Struktur penduduk seperti pada Tabel 31.

Tabel 31. Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur di Desa Banitan, Kec. Bakumpai, Kalimantan Selatan

Jenis kelamin	Kelompok Umur (tahun)											
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	>55
Pria	49	40	41	23	21	18	20	21	8	10	10	24
Wanita	34	34	27	25	29	35	26	24	7	8	19	23
Jumlah	83	74	68	48	50	53	46	45	15	18	29	47

Sumber : Monografi desa Banitan, 1992

Berdasarkan struktur penduduk ini, maka angkatan kerja yang tersedia sebanyak 351 orang. Jumlah ini berarti sangat kurang dihubungkan dengan potensi lahan yang masih belum dimanfaatkan. Hampir 50% penduduk dewasa tidak tamat SD (271 orang), sedangkan penduduk yang tamat SD, SLP dan SLA masing-masing adalah 128; 12 dan 6 orang.

Berdasarkan jenis pekerjaan, sebagian besar bekerja disektor pertanian, baik tanaman pangan maupun perkebunan, seperti pada Tabel 32.

Tabel 32. Penduduk berdasarkan jenis pekerjaan didesa Banitan, Kecamatan Bakumpai.

Jenis pekerjaan	Jumlah (orang)
Pertanian tanaman pangan	191
Perkebunan	24
Kerajinan	77
Pegawai negeri	6
Jasa	8
Pedagang	12
Buruh	20
Lain-lain	13
Jumlah	351

Sumber : Monografi desa Banitan, 1992.

Infrastruktur

Sarana dan prasarana

Desa ini hanya memiliki jalan darat sepanjang lebih kurang 2 km yang menghubungkan dari ujung keujung desa menyusuri Sungai Barito. Kondisi jalan berupa pengerasan dengan batu krikil. Hubungan keluar desa hanya melalui sungai. Sarana transportasi yang digunakan adalah perahu tanpa dan dengan motor. Di desa ini terdapat 30 buah perahu bermotor.

Prasarana fisik pasar tidak dimiliki namun pasar dalam arti proses jual beli, terjadi dua kali dalam seminggu. Pada hari Minggu dan Kamis pedagang dari ibu kota kabupaten datang membawa dagangan kedesa ini.

Kelembagaan yang ada sangat terbatas, yaitu PKK, LKMD, LMD dan Posyandu. Lembaga Penyuluhan dan KUD belum tersedia.

Tingkat Kesejahteraan

Pendapatan perkapita

Sektor maupun sub-sektor yang merupakan sumber pendapatan penduduk adalah : Sub-sektor tanaman pangan, peternakan, perikanan, sub-sektor industri

rumah tangga, transportasi dan jasa. Sub-sektor tanaman pangan terutama padi dan sedikit palawija.

Sub-sektor perkebunan terutama tanaman kelapa. Sedangkan tanaman industri adalah tanaman purun telah yang dibudidayakan. Sedangkan sektor kehutanan adalah mengambil kayu hutan untuk kayu bakar, kayu bangunan dan mencari rotan.

Sub-sektor peternakan terdiri dari ayam kampung dan itik. Sedangkan perikanan adalah usaha penangkapan ikan secara ekstensif. Sektor transportasi adalah usaha perahu klotok. Sedangkan jasa-jasa terdiri dari : tukang cukur, dukun beranak dan pegawai negeri.

Pendapatan total dari masing-masing sektor maupun sub-sektor seperti dapat dilihat pada Tabel 33.

Tabel 33. Pendapatan sektor dan sub-sektor di desa Banitan, Kec. Bakumpai.

Sektor/Sub sektor	Pendapatan (Rp)
Tanaman pangan	11.625.000,-
Perkebunan	4.352.000,-
Kehutanan	38.555.000,-
Peternakan	14.820.000,-
Perikanan	7.100.000,-
Industri RT	10.048.000,-
Transportasi	2.360.000,-
Jasa	12.400.000,-
T o t a l	101.260.000,-

Sumber : Kantor Pembangunan Desa Kab. Batola (1992).

Berdasarkan jumlah penduduk yang sebanyak 556 orang, pendapatan perkapita di desa ini adalah Rp 182.122,302/kap/tahun.

Status Gizi

Status gizi masih rendah mengingat sumber bahan makanan yang terbatas. Diperkirakan hanya konsumsi karbohidrat yang lebih besar dalam komposisi menu masyarakat.

Sayuran sangat sedikit diusahakan baik dilahan pekarangan maupun lahan usaha. Sedangkan konsumsi protein, hanya terbatas pada ikan yang diperoleh dari usaha sendiri atau membeli dengan tetangga.

Masyarakat yang banyak mengusahakan penangkapan ikan orientasinya untuk dijual, sehingga sedikit untuk dikonsumsi.

Buah-buahan relatif kurang, karena tidak banyak diusahakan di desa, demikian halnya dengan konsumsi susu.

Pendidikan anak

Pendidikan anak usia belajar cukup memprihatinkan karena besarnya jumlah anak yang tidak bersekolah. Semua lulusan SD sebagian besar tidak melanjutkan, karena terbatasnya kemampuan orang tua serta kurangnya motivasi. Namun demikian di desa ini tidak terdapat penduduk yang buta aksara.

Kondisi demikian lebih diperburuk lagi karena tidak adanya kegiatan pembinaan keterampilan diluar sekolah. Satu-satunya keterampilan yang dimiliki masyarakat disini (selain usahatani) adalah membuat anyaman dari daun "purun" untuk dijadikan tikar, topi maupun tempat barang (karung).

Kualitas Perumahan

Perumahan penduduk semuanya dari bahan kayu dengan konstruksi rumah panggung. Luas bangunan rumah antara 12-70 m². Atap rumah terbuat dari bahan kayu besi ("sirap"), dan daun tanaman sagu.

Pada umumnya rumah penduduk tidak mempunyai fasilitas kamar mandi dan WC. Untuk keperluan mandi, cuci serta buang air mereka menggunakan jamban di sungai.

Perlengkapan seperti ventilasi udara, jendela dapat dikatakan sudah memenuhi persyaratan sebuah rumah. Lingkungan sekitar pekarangan rumah merupakan tanah rendah yang kondisinya lembab, sehingga bisa mempengaruhi kebersihan dan kesehatan.

Dari kondisi perumahan yang demikian secara umum dapat dikategorikan sebagai perumahan yang kurang sehat.

Konsumsi Kalori

Pola waktu makan pada umumnya adalah pagi dan sore dengan makan nasi, sedangkan siang hari hanya dengan makananan ringan (kue).

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa keluarga menunjukkan bahwa rata-rata menu makanan setiap hari terdiri dari 2 kg beras, 500 g ikan, 500 g sayuran dan 214 g gula untuk rata-rata 6 anggota keluarga.

Berdasarkan konsumsi tersebut, maka diperkirakan konsumsi kalori untuk setiap anggota keluarga adalah sekitar 1402 kkal. Angka konsumsi kalori ini relatif masih rendah (Sayogyo, 1982).

Tingkat Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat di desa ini masih kurang, banyak penduduk yang sering mengalami sakit. Sakit yang banyak dijumpai adalah batuk yang disertai mengeluarkan darah. Setiap tahun rata-rata 2 orang meninggal setelah

menderita batuk-batuk yang cukup lama. Diperkirakan 10% dari penduduk menderita sakit batuk ini.

Masyarakat umumnya mengkonsumsi obat yang dijual dipasaran untuk mengatasi sakit yang ringan seperti sakit kepala walaupun tidak tahu persis penyebab sakitnya. Di desa ini tidak ada petugas medis, sedangkan pelayanan dari petugas medis yang datang dari kecamatan sering tidak menentu.

STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Strategi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa ini harus melalui kegiatan yang integratif dari semua sektor/sub sektor. Salah satu faktor utama yang dapat memacu perkembangan desa adalah lancarnya transportasi antara desa dengan pusat perekonomian.

Dalam hal desa Banitan, untuk mencapai pusat perekonomian yaitu dipusat kecamatan sekaligus pusat kabupaten, hanya dapat melalui sungai. Dengan jarak ± 20 km kepusat perekonomian, kondisi ini tidak menjadi kendala yang berarti. Dengan sarana angkutan kapal sungai yang umumnya digunakan, ongkos transpor tidak begitu mahal, namun mobilitas rendah sehingga memerlukan waktu relatif lama.

Dengan asumsi ini, maka faktor pendukung lain yang perlu dipacu, adalah pengadaan sarana produksi, kredit, penyuluhan dan penyediaan teknologi spesifik lokasi.

Berdasarkan kenyataan bahwa sampai saat ini pendapatan masyarakat bertumpu kepada sektor pertanian, terutama sub sektor tanaman pangan, maka adalah logis apabila sub sektor ini lebih diprioritaskan untuk dikembangkan lebih dahulu. Petani pada umumnya telah melaksanakan usahatani padi. Untuk melengkapi serta mempercepat peningkatan sumber pendapatan masyarakat, maka sub sektor lain yang potensial untuk dikembangkan secara terpadu adalah perikanan, peternakan (unggas).

KESIMPULAN

1. Tingkat kesejahteraan di desa Banitan termasuk masih rendah yang dicirikan dengan beberapa indikator seperti tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, perumahan.

2. Sumberdaya alam di desa Banitan berpotensi dikembangkan untuk sub sektor tanaman pangan, perikanan dan peternakan yang diharapkan dapat meningkatkan sumber pendapatan masyarakat.
3. Rendahnya tingkat kesejahteraan di desa Banitan disebabkan karena belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam karena sarana dan prasarana sangat minim, seperti transportasi, penyuluhan, kredit, pengadaan saprodi.
4. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di desa ini berkenaan dengan kebijaksanaan pemda setempat untuk menerapkan sistem prioritas, karena terbatasnya dana dan tenaga aparat/petugas.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Untuk mendukung pengembangan tanaman pangan di desa ini, maka perlu pengelolaan tata air agar teknologi produksi dapat diterapkan. Pengelolaan tata air diperlukan pembuatan saluran air serta pintu-pintu air yang efektif. Perlu dilakukan demplot-demplot untuk menguji teknologi produksi, seperti pengolahan tanah, pemupukan dan lain-lain.
2. Untuk memanfaatkan potensi perikanan, perlu bantuan peralatan penangkapan ikan serta teknik budidaya yang dapat menjaga kelestarian sumberdaya.
3. Untuk mengembangkan ternak unggas (ayam ras maupun buras) perlu percontohan dan pembinaan serta pemberian kredit usaha ternak.
4. Perlu penempatan petugas penyuluhan dari masing-masing subsektor, terutama tanaman pangan, perikanan dan peternakan.
5. Menyediakan fasilitas pendukung seperti pengadaan saprodi, fasilitas kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Batola. 1992.

Monografi desa Banitan. 1992.

Mubyarto. 1982. Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan. Penerbit Sinar harapan. Jakarta.

Sayogyo. 1982. Menelaah Garis Kemiskinan Masalah Dalam Lokakarya Metodologi Kaji Tindak Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Kecil 20-30 Desember. IPB.

Lampiran 1. Hubungan karakteristik wilayah, penyebab kemiskinan dan alternatif penanggulangannya di Desa Banitan, Kec. Bakumpai, Kab. Batola

Karakteristik wilayah	Kendala	Potensi	Penyebab utama	Alternatif penanggulangannya
1. Sumberdaya alam Tipologi lahan : pasang surut - Potensi sumber pendapatan : pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan darat/sungai, ternak unggas - Jenis tanah - Curah hujan - Penggunaan lahan (ha) : - Perumahan & pekarangan 15 - Sawah 361 - Perkebunan rakyat 75 - Hutan negara 3.500 - Danau/raja 1.425 - Sungai/jalan 524 - Usahatani utama : padi sawah 5.900	Fisik : 1. Kesuburan tanah masih rendah 2. Gangguan hama/penyakit 3. Pengaruh pasang surut air belum dapat dikuasai	1. Pengembangan tan. pangan dan hortikultura 2. Pengembangan perikanan 3. Pengembangan peternakan unggas (itik & ayam) 4. Pengembangan usaha anyaman	1. Infrastruktur - Prasarana perhubungan hanya melalui sungai - Belum ada listrik - Belum ada fasilitas air bersih 2. Pertanian tan. pangan - Tidak ada fasilitas pengendalian air - Kurangnya fasilitas pelayanan penyuluhan, penyediaan saprodi, kredit	1. Pengadaan prasarana listrik, air bersih 2. Pertanian tan. pangan - Pembangunan tanggul-tanggul pengaturan air - Memperbanyak demonstrasi paket teknologi produksi - Pemberantasan hama (babi, kera) - Penyediaan pelayanan penyuluhan dan saprodi, kredit
2. Sumberdaya manusia - Jumlah penduduk : 556 - Seks ratio 295 - Dependency ratio 2 - Kepadatan penduduk : 0,1 km ² - Angkatan kerja : 294	Sosial ekonomi 1. Tingkat pendapatan rendah 2. Keterampilan petani masih rendah 3. Tingkat kesejahteraan masih rendah	Jangka panjang : - Prasarana jalan darat	Prasarana terbatas hanya pada angkutan sungai	Menumbuhkan sentra-sentra produksi di wilayah sekitarnya
3. Sarana dan prasarana - Jalan desa : ± 2 km - Alat transportasi masyarakat : perahu, perahu motor - Lokasi ke ibu kota kab./kec. : 15 km	Mobilitas transportasi relatif rendah			
4. Kelembagaan sosek - Perkumpulan agama - PKK - Warung/kios	Kelembagaan sosek tidak berjalan sebagaimana mestinya	Kelembagaan sosek yang dapat menunjang kegiatan sosek masyarakat setempat	Kurangnya tenaga penggerak serta kesadaran dari masyarakat	Menempatkan petugas-petugas serta menggiatkan bimbingan
5. Kelembagaan penyuluhan belum ada				
6. Kelembagaan perkreditan belum ada				
7. Pasar desa tidak ada				

Lampiran 2. Rekapitulasi usulan program penanggulangan kemiskinan di desa Banitan, Kec. Bakumpai, Kab. Batola

Program	Paket teknologi	Output	Dampak	Lembaga terkait	Skala lokasi	Sasaran
A. Pertanian						
Sub sektor tan. pangan	- Tata air - Pemupukan - Pengolahan tanah - Pengendalian H/P	- Pemanfaatan air pasang surut secara optimal - Takaran pemupukan yang tepat - Cara pengolahan tanah yang tepat	Peningkatan produktivitas	- Balai Penelitian - Dinas Pertanian		Petani Petani
Sub sektor perikanan	- Budidaya ikan di perairan danau dan sungai	- Pemanfaatan sumberdaya perikanan	Peningkatan konsumsi protein dan pendapatan	- Dinas Perikanan		Petani
Sub sektor peternakan	- Peternakan ayam buras dan itik di pekarangan	- Pemanfaatan lahan pekarangan	Peningkatan konsumsi protein dan pendapatan	- Dinas Peternakan		Petani

Lampiran 3. Usulan program pertanian terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan di desa Banitan, Kec Bakumpai, Kab. Batola

Nama Proyek	Kegiatan	Paket teknologi	Kelompok sasaran	Perkiraan output	Dampak	Lembaga terkait
PERTANIAN						
A. Sub sektor tan. pangan						
* Peningkatan pendapatan petani melalui pengemb- angunan tanaman padi	- Pembuatan tanggul-tanggul pengatur air - Demplot-demplot percobaan	- Sistem tata air - Teknologi produksi : - Pengolahan tanah - Pemupukan - Pengendalian H/P - Teknologi produksi - Pembinaan petani	HIPPA Petani	Pemanfaatan air pasang sunt Teknologi produksi yang tepat	Efektivitas untuk teknologi produksi Peningkatan produktivitas	P. U. Pengairan Diperta, Penelitian
B. Sub sektor perikanan						
* Peningkatan pendapatan petani melalui pengem- bangan perikanan	- Pembuatan kolam-kolam ikan air danau - Pengadaan alat tangkap ikan di perairan sungai - Pemeliharaan ikan di- sungai	- Kolam-kolam ikan di- lokasi persawahan - Alat-alat tangkap yang sesuai - Keramba	Petani/nelayan Petani/nelayan Petani/nelayan	Cara-cara pemeliharaan ikan dengan aspek kelestarian	Memperbanyak cabang usaha tani sebagai sumber pendapatan	Diperta, Perikanan
C. Sub sektor peternakan						
* Peningkatan pendapatan petani melalui pengem- bangan peternakan	- Pembuatan kandang- kandang - Penyuluhan	- Pemeliharaan ayam buras dan itik	Petani	Sentra-sentra produksi ayam buras dan itik	Memperbanyak cabang usahatani	Dinas Peternakan

SUMBERDAYA DAN INFRASTRUKTUR DI DESA SIMPANG NUNGKI

Rosita Galib, M. Thamrin dan Rismarini Zuraida

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan serius dalam pembangunan. Menurut Bank Dunia (1990) penduduk miskin adalah penduduk yang mempunyai kapasitas pengeluaran dari US \$ 370/th atau Rp 740.000/th.

Kriteria penduduk atau desa miskin masih diperdebatkan. Sementara ini batas ambang kemiskinan bertolak pada kebutuhan hidup minimum dengan batas minimal 2100 kal/kap/hari atau setara dengan 360 kg beras/kapita/th. Untuk pedesaan kebutuhan minimum diperkirakan lebih kecil yaitu setara dengan 240 kg beras/kap/th (Sayogyo, 1974). Jumlah itu setara dengan rata-rata pendapatan Rp 210.000/kap/th. Pada periode antara tahun 1970 dan 1980 Indonesia telah berhasil menekan jumlah golongan miskin dari 60% menjadi kurang dari 20% dari total populasi (Bank Dunia, 1990). Bappenas mengemukakan bahwa telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 15% dari jumlah 54 juta jiwa (1976) menjadi 27 juta jiwa (1990). Jumlah penduduk yang berada di pedesaan sebesar 17,8 juta jiwa.

Mengangkat kemiskinan menjadi suatu kajian merupakan prioritas. Pemerintah telah menyadari sehingga menyediakan dana khusus sejak th 1991/92 untuk menanggulangi kemiskinan di 17 Propinsi di Indonesia. Salah satu dari 17 Propinsi tersebut adalah Kalimantan Selatan. Untuk mengidentifikasi desa miskin di Propinsi Kalimantan Selatan, dilakukan penelitian di kabupaten Barito Kuala, diwakili oleh lima desa di tiga kecamatan dan salah satu desa terpilih adalah desa Simpang Nungki.

Kabupaten Barito Kuala memiliki lahan pasang surut terluas di Propinsi Kalimantan Selatan yaitu sekitar 59,29% dari total Propinsi (1991) dan 78-85% adalah petani (Anwarhan & Itjin, 1986). Pendapatan petani lahan pasang surut di Kalimantan Selatan sekitar Rp 140.000 - Rp 150.000. Tingkat pendapatan ini masih dibawah batas kemiskinan yang ditentukan Bappenas dengan pendapatan Rp 210.000,00/kap/th.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, terlebih dahulu perlu diketahui sumber-sumber penyebab kemiskinan. Apakah sumberdaya alam dan kapital,

teknologi, sumberdaya manusia dan kelembagaan/kebijaksanaan atau permasalahan politik atau norma atau kombinasinya. Setelah permasalahan diatas jelas melalui penelitian yang seksama, maka penyebab kemiskinan yang terjadi di Desa Simpang Nungki dapat diketahui. Seterusnya alternatif penanggulangan sesuai kondisi yang ada dapat dilakukan.

KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

1. Sejarah Perkembangan Desa

Desa Simpang Nungki terletak di Kecamatan Cerbon yang jaraknya ± 5 km dari tepi sungai Barito, 8 km dari ibukota kabupaten (Marabahan) dan 48 km dari ibukota propinsi (Banjarmasin). Luas wilayah Simpang Nungki 1950 ha yang terbagi dalam 4 rukun tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 584 jiwa atau 139 kepala keluarga (KK) dan 100% beragama Islam. Lamanya berjalan kaki dari desa Simpang Nungki ke kecamatan Cerbon pulang pergi (PP) ± 1 jam. Batas-batas Kecamatan Cerbon sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Kecamatan Bakumpai

Sebelah Barat dengan Kecamatan Tapin

Sebelah Timur dengan Kecamatan Barambai

Sebelah Selatan dengan Kecamatan Rantau Badauh

Desa Simpang Nungki ini sudah ada sejak zaman Belanda, ditemukan dan dibuka oleh seorang tokoh masyarakat yang bernama "Datuk Nungki". Pada tahun 1942 dan 1972 desa ini pernah ditinggalkan penduduknya karena kondisi alam dan pengetahuan/keterampilan petani yang tidak mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Vegetasi asli di desa ini antara lain ; galam, banta, purun dan semak-semak pasang surut yang tumbuhnya secara liar. Lahan garapan untuk usahatani yang ada sekarang ini merupakan bekas lahan pasang surut yang diolah secara tradisional dan turun temurun.

Padi adalah tanaman utama dalam usahatani di desa ini dan merupakan sumber utama pendapatan sebagian besar rumah tangga. Usahatani lainnya adalah hortikultura dan palawija serta ternak ayam. Cara budidaya dilakukan sangat sederhana dan tradisional. Varietas yang ditanam umumnya varietas lokal dengan penggunaan sarana produksi modern yang sangat kecil atau bahkan tidak digunakan sama sekali.

Tanaman padi ditanam pada lahan sawah pasang surut (tabukan, bagian rendah), sedangkan tanaman lain seperti jeruk, rambutan, pisang dan jambu ditanam pada lahan-lahan yang agak tinggi atau ditinggikan (tembakan). Tanaman ubikayu, sayuran (lombok, kacang panjang, terong, gambas dsb), ditanam dipekarangan pada tempat-tempat yang tidak terendam air sepanjang tahun dalam skala kecil sekedar untuk keperluan sendiri. Skala usahatani yang umumnya sempit ini juga dikelola secara sederhana dan subsisten, sehingga hasil yang diperolehpun rendah. Begitu pula usaha ternak ayam dilakukan secara sambilan dan tidak intensif, diutamakan untuk keperluan rumah tangga sehingga yang dijual ke pasar dalam jumlah sedikit. Kegiatan mencari ikan dan purun untuk kerajinan anyaman juga dilakukan dengan hanya memungut di alam bebas dengan alat-alat sederhana dan tidak melakukan budidaya.

2. Sumberdaya Alam

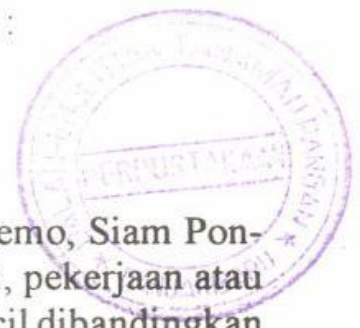
Wilayah desa Simpang Nungki seluas 1950 ha dengan penggunaan lahan sebagai berikut ; perumahan/pekarangan 100,2 ha (5,15%), sawah sederhana 370,0 ha (18,97%), hutan negara 684,0 ha (35,08%), danau/rawa pasang surut 779,8 ha (39,99%), lain-lain 16,0 ha (0,81%). Produksi utama desa Simpang Nungki adalah padi sawah pasang surut. Tinggi lahan dari permukaan laut antara 1,5- 2,5 dengan topografi dataran dan pH tanah dan air 3,5 - 4,5, dengan ketebalan gambut bervariasi (10 s/d 100 cm). Curah hujan sebesar 2500 - 3000 mm/tahun dengan distribusi tidak merata dan kelembaban 26 - 27,5°C.

Tanah dan air dipengaruhi oleh pasang surut pada kedalaman sampai dengan 50 cm. Penataan air yang baik belum ada, dan sungai-sungai alam hanya ditabat secara sederhana. Lahan pasang surut umumnya merupakan lahan marginal, dengan tingkat kemasaman tinggi, drainase kurang baik, air tidak terkendali dan terjadi intrusi air laut pada musim kemarau, serta akumulasi zat-zat beracun seperti besi dan aluminium dan defisiensi unsur hara.

Pola tanam di Desa Simpang Nungki secara umum adalah :

1. Padi - bera (disawah, bagian rendah atau tabukan)
2. Hortikultura campuran (bagian tinggi atau tembakan)
3. Palawija/ubikayu/sayuran ternak ayam di pekarangan.

Jenis padi lokal yang ditanam umumnya adalah; Ketan, Lemo, Siam Pontanak, Siam Adil dan Siam Karandukuh. Dalam usahatani padi, pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan memerlukan tenaga kerja yang relatif kecil dibandingkan dengan usahatani padi yang dilakukan bukan di lahan pasang surut. Hal ini karena pengolahan tanah dan pemeliharaan berupa penyiangan relatif tidak dilakukan, karena tidak diperlukan. Urutan kegiatan pekerjaan, waktu kegiatan



dan tenaga kerja yang diperlukan pada masing-masing kegiatan disajikan pada Tabel 34.

Tabel 34. Curahan tenaga kerja setiap kegiatan usahatani padi di Desa Simpang Nungki, Kec. Cerbon, Kab. Batola

Kegiatan	Waktu	Tenaga kerja (jam kerja)
1. Pengolahan tanah atau persiapan lahan, tebas dan angkut	Februari	82,0
2. Semai	Nopember	40,0
3. Ampak/lacak	Desember	25,0
4. Tanam	Maret	122,5
5. Pemeliharaan	Mei	15,0
6. Panen dan pasca panen	Juli	245,0
Jumlah		529,5

Sumber : Hasil wawancara, 1992
1 HOK = 7 jam kerja

Usahatani padi yang dilakukan di lahan sawah pasang surut: pada bagian rendah ditanami padi sedangkan pada bagian yang agak tinggi ditanam jenis-jenis tanaman seperti pisang, rambutan, jeruk, jambu, kelapa, ubikayu, kacang panjang, terong, lombok dan gambas. Usahatani tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, hanya sebagian kecil dijual kecuali hasil tanaman rambutan dan jeruk. Hal ini karena luas usaha yang dikelola sempit, kecuali untuk tanaman pisang, rambutan dan jeruk.

3. Sumberdaya Manusia

Karakteristik penduduk yang meliputi umur, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, jarak pemukiman dari tepi jalan atau sungai dan pasar desa, luas dan status pemilikan tanah serta mata pencaharian dan lamanya (pengalaman) dalam usahatani padi diduga berperan terhadap pendapatan rumah tangga penduduk yang mayoritas petani ini.

Umur merupakan faktor yang mempengaruhi aktifitas petani. Semakin muda umur petani semakin aktif dan terampil mereka melakukan kegiatan usahatannya dan semakin mudah dia mengadopsi teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa $\pm 84\%$ petani berada dalam umur produktif (10-54 th), memberikan gambaran bahwa petani masih berpotensi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan usahatannya.

Tingkat pendidikan yang dimiliki petani adalah : 1) belum sekolah 4,80%, 2) tidak tamat Sekolah Dasar/ sederajat 40,24%, 3) tamat Sekolah Dasar/ sederajat

47,43%, 4) tamat Sekolah Lanjutan Pertama 3,94%, 5) tamat Sekolah Lanjutan Atas 3,25%, 6) tamat Perguruan Tinggi 0,34%. Tingkat pendidikan ini penting karena berpengaruh terhadap keterampilan dan keputusan-keputusan yang diambil.

Jumlah anggota keluarga dalam keluarga petani merupakan sumber tenaga kerja dalam berbagai kegiatan usahatani dan rumah tangganya. Rata-rata jumlah anggota keluarga petani di desa Simpang Nungki ini adalah 4,2 orang.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah 43,66% pria dan 56,34% wanita. Pemukiman penduduk terletak ditepi jalan darat atau sungai dan ± 2 km dari pasar desa. Jarak lahan usahatani (sawah berkisar 0-5 km) sehingga dilihat dari jarak tersebut, arus transportasi, komunikasi dan informasi lancar saja, tetapi dari kondisi fisik jalan/sungai tersebut belum memadai. Rata-rata luas garapan adalah 2,16 ha/kepala keluarga dengan kisaran antara 0,6 - 4 ha. Status pemilik penggarap (97,12%) dan sisanya (2,18%) adalah penggarap bukan pemilik (penyakap, penyewa).

Penduduk Desa Simpang Nungki 90% petani dan sisanya adalah ; pedagang, pegawai negeri dan swasta. Dari seluruh usahatani 80% adalah usahatani padi, dan 20% lainnya adalah tanaman pisang, jeruk, rambutan, ubikayu, kacang panjang, terong, lombok, gambas, kelapa dan jambu. Secara keseluruhan kegiatan penduduk dapat dikelompokkan kedalam ; 1) usahatani padi, hortikultura, palawija, sayuran, 2) mencari ikan, 3) mencari kayu bakar dan purun, 4) kerajinan anyaman purun, 5) menyadap karet, 6) buruh musiman, 7) pedagang kecil dan 8) pegawai negeri atau swasta.

Rata-rata usahatani padi di Desa Simpang Nungki seluas 1 ha dengan kisaran 0,6 - 4 ha. Varietas yang ditanam adalah varietas lokal yang berumur panjang dengan tingkat produktivitas rendah (2,126 t/ha). Cara pengelolaan usahatani subsisten dan penggunaan sarana produksi modern rendah. Pada Tabel 35 dibawah ini, dapat dilihat biaya dan penerimaan usahatani padi di lahan pasang surut Simpang Nungki.

Tabel 35. Biaya dan penerimaan usahatani padi pasang didesa Simpang Nungki
Kec. Cerbon, Kab. Batola

Uraian	Fisik (kg)	Harga (Rp)	Nilai (Rp)
Penerimaan	2.126	327	695.200
Biaya:	-	-	222.900
Bibit	8,5	400	3.400
Pupuk	100,0	245	24.500
Tenaga kerja (HOK)	76,0	2.500	190.000
Lain-lain	-	-	5.000
Lama usaha (hari)	153	-	-
Pendapatan/lama usaha	-	-	3.086
R/C	-	-	3,12

Sumber : Hasil wawancara, 1992

Nilai dari perbandingan biaya dan penerimaan (R/C) sebesar 3,12, menunjukkan bahwa usahatani padi yang dilakukan petani di Simpang Nungki cukup baik. Bila dihitung keperluan konsumsi beras rata-rata per rumah tangga 728 kg/KK/th atau setara dengan padi 1456 kg/KK/th, maka untuk mencukupi keperluan rumah tangga petani yang setara dengan 4622 kg padi/KK/th, satu keluarga petani harus memiliki dan mampu menggarap lahan sawah untuk usahatani padi seluas 2,86 ha. Untuk meningkatkan pendapatan petani melalui usahatani padi harus dilakukan usaha perluasan areal tanam atau peningkatan intensitas tanam dengan menggunakan cara-cara dan teknik bercocok tanam maju. Beberapa penelitian usahatani padi pasang surut di luar desa Simpang Nungki yang dilakukan oleh Balittan Banjarbaru dalam skala percobaan, menunjukkan bahwa produktivitas padi pasang surut dapat mencapai 5-6 t/ha. Pencapaian tingkat produksi yang tinggi tersebut diperoleh melalui penerapan teknik bercocok tanam yang maju dengan dosis pemupukan berimbang dan penggunaan varietas yang tepat.

Minat petani terhadap teknologi baru dalam usahatani padi cukup positif, hal ini dapat dilihat dari usaha-usaha masyarakat untuk memperoleh pupuk (urea, TSP) keluar desa dan mempergunakannya, walaupun dalam jumlah kecil dan belum berimbang. Kurangnya informasi dan demonstrasi mengenai teknik bercocok tanam yang maju membuat petani belum mengetahui cara-cara menggunakan pupuk secara tepat dan seimbang, tata cara menata air yang baik, mengolah tanah yang baik dan aman, dan melakukan kombinasi tanam yang dapat memberikan pendapatan lebih tinggi.

Kegiatan mencari ikan dilakukan 50% penduduk pada saat-saat lowong dari kegiatan usahatani padi. Kegiatan tersebut umumnya dilakukan setelah persiapan lahan selesai setelah tanam atau sesudah panen, yaitu sekitar bulan Pebruari,

Mei, Juni, Juli dan Agustus. Pendapatan berkisar antara Rp 2.500 - 10.000/HOK, dengan peralatan transportasi sungai sederhana seperti perahu (jukung) dan alat tangkap antara lain ; tampirai, lukah, tarumbu, banjur dsb. Jenis ikan yang diperoleh adalah ikan gabus dan papuyu. Kegiatan dilakukan secara periodik, tidak terus menerus setiap hari, tetapi berselang antara 4-7 hari. Kegiatan mencari ikan ini dilakukan secara sangat sederhana dan hanya memungut hasil di alam/sungai bebas yang ada, tanpa budidaya intensif.

Mencari kayu bakar (galam) dilakukan pada bulan Juni, Oktober, Nopember dengan alat transportasi perahu, begitu pula mencari purun untuk bahan anyaman dilakukan pada waktu-waktu kegiatan dalam usahatani padi tidak ada. Pendapatan yang diperoleh berkisar antara Rp 2000 - 5000. Membuat anyaman dari bahan purun, biasanya dilakukan oleh anak-anak dan wanita (ibu-ibu) pada siang hari sehabis melakukan kegiatan di sawah atau malam hari di rumah.

Menyadap karet dan buruh musiman (dilakukan oleh sekitar 5% penduduk) hanya dilakukan pada bulan Mei dan Juni, yaitu pada waktu hasil ikan kurang dan kegiatan usahatani padi tidak ada. Menyadap karet dilakukan oleh pria dan wanita, dengan rata-rata pendapatan Rp 3500/hari kerja. Kegiatan buruh musiman hanya dilakukan oleh pria dengan pendapatan yang diperoleh rata-rata Rp 100.000 dalam waktu 60 hari.

4. Infrastruktur

Kelembagaan di desa Simpang Nungki terbagi dalam dua kelompok, yaitu lembaga formal dan non formal. Lembaga formal adalah LKMD, kelompok tani, posyandu, penyuluh pertanian dan KUD. Fungsi kelembagaan tersebut saat ini dirasakan oleh masyarakat masih belum memadai karena berbagai hambatan baik teknis maupun non teknis.

Lembaga penyuluh pertanian (BPP, PPL) nampak belum menyentuh petani, karena segala keputusan petani belum dipengaruhi oleh penyuluh. Hal ini disebabkan kurangnya tenaga lapang yang dimiliki Balai Penyuluh Pertanian (PPL) atau luasnya wilayah yang harus dijangkau, sementara kondisi medan dan transportasi belum memadai dan terbatas.

Disamping lembaga-lembaga formal, juga ada lembaga non formal berupa organisasi kemasyarakatan yaitu, arisan qurban, arisan yasinan, arisan hari raya, walaupun belum mempunyai aktifitas tinggi dan spesifik sekali.

Desa Simpang Nungki dengan klasifikasi swakarya ini mempunyai satu buah pasar desa yang aktif setiap minggu (Jum'at). Kelompok tani ada 3 dan PPL pangan 1 orang mencakup 4 desa, sehingga frekuensi kunjungan PPL kepetani sangat jarang, bahkan kadang-kadang hanya 1 kali dalam satu tahun yaitu pada saat tanam padi.

Bagi hasil untuk usahatani padi yang disakapkan adalah 1 : 2 atau 1 : 1 sesuai kesepakatan antara pemilik dan penyakap. Kalau 1 : 2 dimana 1 bagian untuk pemilik, 2 bagian untuk penyakap, segala keperluan sarana produksi ditanggung penyakap dan sebaliknya apabila sarana produksi ditanggung pemilik dan penyakap bagi hasil 1 : 1 (maro). Status pemilikan tanah yang ada di desa ini adalah; pemilik penggarap, penggarap bukan pemilik (penyakap) dan penyewa (kecil sekali).

Sistem upah yang banyak dilakukan masyarakat adalah harian/isukan (yaitu antara 4-8 jam/hari) dengan upah berkisar antara Rp 1500 - 3000 tergantung jenis pekerjaan. Cara pengupahan dengan sistem bawon, biasanya dilakukan hanya untuk panen padi dan sakap karet yaitu bagi 3 (2:1) atau bagi 5 (4:1). Sistem warisan umumnya berdasarkan hukum Islam, sesuai dengan agama dipeluk penduduk.

Sarana pendidikan terdiri dari ; 1 buah SD ; 1 buah SLTP dan 1 buah madrasah. Sedangkan sarana keagamaan terdiri dari 4 buah langgar dalam kondisi terawat baik. Sarana fisik jalan yang ada di desa tidak begitu baik, berupa jalan tanah yang dikeraskan sepanjang 8,5 km dan lebar 3 m, jembatan kayu 100 km lebar 2 meter dan jalan Sungai sepanjang 10 km.

Sarana lain adalah ; perahu tak bermotor sebanyak 120 buah, sepeda 77 buah, sepeda motor 3 buah, perahu bermotor 2 buah, radio 72 buah, TV 7 buah, pos hansip 1 buah, gedung LKMD 1 buah dan lapangan olah Raga 1 buah (1000 m²).

TINGKAT KESEJAHTERAAN

1. Pendapatan perkapita

Salah satu tolok ukur kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat adalah pendapatan perkapita. Untuk menghitung besarnya pendapatan perkapita adalah dengan membagi pendapatan daerah dengan jumlah penduduknya. Untuk menghitung pendapatan daerah digunakan pendekatan produksi; yang diperhitungkan sebagai total nilai produksi yang diciptakan oleh tiap-tiap sektor produktif yang ada didalam perekonomian daerah. Yang dijumlahkan pada metode tersebut hanyalah nilai tambah atau value added yang diciptakan, sehingga dapat diartikan bahwa pendapatan daerah merupakan hasil penjumlahan nilai tambah seluruh sektor. Nilai tambah itu sendiri dirumuskan sebagai nilai produksi kotor dikurangi biaya produksi. Di desa Simpang Nungki terdapat 8 sektor produktif

yang dijadikan sumber pendapatan bagi penduduk. Pada Tabel 36 dibawah ini dicantumkan nilai tambah masing-masing sektor atau sub sektor.

Tabel 36. Pendapatan daerah dari sektor/sub sektor, di desa Simpang Nungki, Kecamatan Cerbon, Kab. Batola.

Sektor/sub sektor	Pendapatan (RP)
1. Tanaman bahan makanan	104.687.775
2. Perkebunan	2.286.000
3. Kebutuhan dan pekarangan	5.400.000
4. Peternakan dan hasil-hasilnya	4.307.500
5. Perikanan	5.400.000
6. Industri dan kerajinan rakyat	6.300.000
7. Transportasi dan angkutan	133.000
8. Jasa	45.000
T o t a l	128.559.275

Sumber : Kantor Pembangunan Desa Kab. Batola, 1991

Sektor bahan makanan terdiri dari sub sektor padi, kacang-kacangan, sayuran, jeruk dan rambutan. Sektor perkebunan terdiri dari kelapa dan purun, sedangkan sektor kehutanan dan pekarangan adalah mencari kayu bakar. Sektor peternakan terdiri dari sapi, domba (kambing), unggas dan telur, sedangkan sektor perikanan adalah mencari ikan sungai. Sektor industri dan kerajinan rakyat adalah membuat kampil, sedangkan sektor transportasi dan angkutan adalah ojek sepeda motor. Sektor jasa terdiri dari dukun beranak dan mengajar sekolah swasta.

Pendapatan perkapita pertahun desa Simpang Nungki dengan jumlah penduduk 584 jiwa adalah Rp 220.135,745. Rata-rata pendapatan perkapita Kalimantan Selatan adalah Rp 410.336,04 dengan perincian dikota Rp 580.000/th dan di desa Rp 390.275/th.

2. Status gizi

Tolok ukur selanjutnya untuk menentukan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat adalah status gizi penduduknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan penduduk Simpang Nungki diperoleh kesimpulan bahwa status gizi penduduk tidak seimbang, bahkan terdapat 39 balita berusia 0-5 tahun yang rawan gizi. Pola makan penduduk terdiri dari tiga kali sehari yaitu (1) makan pagi terdiri dari nasi + ikan + teh manis; (2) nasi + sayuran + ikan; (3) nasi + ikan, tidak menggambarkan status gizi yang baik. Ikan diperoleh dari penangkapan di sungai-sungai sedangkan daging unggas atau menjangan di peroleh dari berburu. Buah-buahan yang dibudidayakan adalah rambutan, jeruk dan pisang.

3. Pendidikan anak

Berdasarkan jumlah penduduk menurut pendidikan, (data Bangdes Batola, 1991) maka penduduk yang dapat menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dari tamat SD/ sederajat hanya sebesar 7,32%. Yang hanya tamat SD/ sederajat 46,09% dan yang tidak tamat SD/ sederajat 39,10%, dan yang belum sekolah 7,49%. Dari angka-angka diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk di desa ini hanya memperoleh pendidikan yang terbatas/ rendah sekali, sehingga tentu saja sangat mempengaruhi cara/ kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki. Rendahnya tingkat pendidikan yang mampu diperoleh erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan yang dimiliki penduduk. Hal ini diperburuk lagi dengan tidak tersedianya fasilitas dan sarana yang dapat mendorong penduduk mencapai pendidikan yang lebih tinggi.

4. Kualitas Perumahan

Perumahan yang dimiliki penduduk seluruhnya terdiri dari rumah kayu dan rumah bambu dengan model panggung. Rumah-rumah ini umumnya di dirikan disepanjang aliran sungai dengan luas bangunan antara 50-120 m². Atap rumah terdiri dari sirap atau daun rumbia (daun pohon sagu). Setiap rumah sudah memiliki jendela/ ventilasi yang cukup dan lantai bukan dari tanah, tetapi hanya sekitar 3% rumah yang memiliki WC/ fasilitas kamar mandi yang memenuhi syarat kesehatan. Mandi, cuci dan buang air dilakukan di sungai- sungai yang ada di sekitar pemukiman. Sumber air minum 61,81% dari sumur dan 38,19% dari air sungai.

Hal ini dapat disimpulkan, bahwa pengetahuan penduduk terhadap kesehatan lingkungan rendah sekali.

5. Kematian Balita

Angka kematian bayi merupakan indikator yang menggambarkan tidak saja status kesehatan anak, tetapi juga terhadap status penduduk keseluruhan dan kondisi ekonominya. Angka kematian bayi tidak hanya merefleksikan besarnya masalah kesehatan yang bertanggung jawab langsung terhadap kematian bayi, tetapi juga merefleksikan tingkat kesehatan ibu, kondisi, kesehatan lingkungan dan secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat. Di desa Simpang Nungki tingkat kematian (IMR) berdasarkan data Bangdes Batola 1991 adalah 200 bayi per 1000 kelahiran. Sedangkan tingkat kematian balita adalah 67 balita per 1000. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kematian balita atau bayi cukup tinggi dan ini merupakan indikator bahwa tingkat kesejahteraan penduduk secara keseluruhan masih rendah. Penyebab kematian umumnya adalah sakit perut (diare) dan demam panas serta tetanus.

6. Konsumsi Kalori

Konsumsi kalori di desa Simpang Nungki termasuk rendah. Berdasarkan wawancara dengan penduduk diperoleh menu makanan sehari-hari yang terdiri dari nasi (KH), ikan (protein) dan sayur/buah-buahan (vitamin). Rata-rata konsumsi kalori setiap anggota rumah tangga dalam keluarga adalah 3 kg beras, 1 kg ikan, 250 g sayuran, 150 g gula pasir untuk 4-5 anggota keluarga atau senilai sekitar 1.500 k Cal. Konsumsi kalori di desa ini cukup rendah apabila dibandingkan dengan konsumsi kalori kecamatan Cerbon yang rata-rata lebih besar dari 2000 k Cal.

7. Tingkat Kesehatan

Tingkat kesehatan penduduk desa Simpang Nungki secara umum masih tergolong rendah, berdasarkan pada tingkat kematian bayi, tingkat kematian balita atau orang dewasa yang terserang penyakit malaria atau sakit perut. Fasilitas kesehatan yang ada hanya 1 buah posyandu, sehingga masyarakat mengatasi sakit yang tidak terlalu berat cuma dengan obat-obatan yang dijual bebas di pasar desa.

STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Berdasarkan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan infrastruktur yang dimiliki desa Simpang Nungki, maka strategi peningkatan kesejahteraan diutamakan dengan menyediakan/memperbaiki/menambah fasilitas fisik jalan, alat transportasi dan jembatan serta penerangan (listrik). Dengan lancarnya arus barang dan komunikasi penduduk akan memacu peningkatan perekonomian masyarakat dan merangsang motivasi berusaha yang lebih intensif.

Peningkatan produktivitas pertanian dan sektor lainnya dalam lingkup pertanian dapat ditempuh melalui demontrasi dan bimbingan yang lebih intensif, lebih sering dan nyata. Penyediaan dan penggunaan sarana produksi perlu dipacu dengan bimbingan yang benar dan tepat. Kesehatan masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui penyuluhan kesehatan dan berkesinambungan. Dan yang paling penting adanya suatu tekad dan persepsi yang sama antara penentu kebijakan dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa Simpang Nungki. Kegiatan yang terpadu dari semua sektor, sub sektor sangat menentukan keberhasilan setiap program yang dijalankan untuk mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik.

KESIMPULAN

1. Sumberdaya alam di desa Simpang Nungki cukup potensial dikembangkan untuk usahatani padi, perikanan dan budidaya tanaman hortikultura dan purun yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan.
2. Kurangnya fasilitas jalan dan transportasi di desa ini merupakan penyebab utama kelambatan perkembangan perekonomian desa. Pengadaan sarana dan prasarana sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah daerah setempat.
3. Rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk desa Simpang Nungki dicirikan dengan beberapa indikator (pendapatan perkapita, kesehatan, pendidikan, perumahan, tingkat kematian balita dan konsumsi kalori) yang merupakan akumulasi dari rendahnya kemampuan dan keterampilan penduduk, belum lancarnya arus barang dan informasi serta kebijaksanaan pemerintah daerah setempat yang menerapkan sistem prioritas dan keterbatasan dana, aparat/petugas dilapangan.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Pengerukan Sungai dan pengelolaan tata air sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan produktivitas, baik tanaman pangan maupun tanaman hortikultura dan industri serta sektor pertanian lainnya seperti ternak ayam dan ikan.
2. Penyediaan sarana produksi dan modal melalui kredit usahatani sangat diperlukan, disamping penyuluhan dan informasi yang benar mengenai teknik bercocok tanam.
3. Fasilitas jalan, transportasi, listrik dan kesehatan sangat diperlukan untuk peningkatan arus barang dan informasi.
4. Motivasi penduduk untuk berusaha meningkatkan kesejahteraannya perlu dipacu melalui koordinasi terpadu dari berbagai instansi terkait dan pelayanan aparat/petugas yang lebih intensif dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Dunia, 1990. Dalam JAWA POST, 5 Mei 1993.

Kantor Pembangunan Desa kab. Batola, 1991.

Kantor kecamatan Cerbon, 1990. Data Potensi Desa Simpang Nungki.

M. Djamhuri, 1991/1992. Rencana Penelitian Tingkat Peneliti. Studi Motivasi, Sumberdaya dan Infra Struktur di Daerah Berpendapatan Rendah. Balai Penelitian Tanaman Pangan Banjarbaru.

Sayogyo, 1974. Menelaah Garis Kemiskinan. Makalah dalam lokakarya Metodologi Kaji Tindak Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Kecil 20-30 Des. IPB Cisarua.

Lampiran 4. Hubungan Karakteristik Wilayah Penyebab Kemiskinan dan Alternatif di Desa Simpang Nungkidi Kecamatan Cerbon, Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala.

Karakteristik wilayah	Kendala	Potensi	Penyebab Utama	Alternatif Penanggulangan
1. Sumber daya Alam - Topografi : dataran, dataran rendah/ rawa pasang surut(1,5-2,5 m dpl) - Potensi lahan : Rawa pasang surut (tipe A,B,C s/d D), 1-7 km dari Daerah Aliran Sungai Barito - Jenis tanah : Aluvial dan Gambut - Curah hujan : 2000-3600 mm/th - Kelembaban : 26-27,5°C - pH tanah/air: 3,5-4,5 - Ketebalan Gambut : bervariasi - Penggunaan lahan : - Sawah sederhana : 320 ha - Hutan negara : 584 ha - Danau/rawa : 779,8 ha - Perumahan/pekarangan : 100,2 ha - Lain-lain : 15 ha - Total : 1950 ha - Pola usahatani utama sistem surjan dengan pola tanam : - Tabukan : Padi tadah hujan - bera - Tembokan: Ubikayu, kacang panjang, terung, lombok, gambas, rambutan, jeruk, pisang, kelapa - Nelayan : Perikanan tangkap - Sumur ikan. - Ternak : Ayam buras.	1. Tata air belum ada 2. Tanah dan air dipengaruhi oleh pasang surut pada kedalaman s/d 50 cm 3. Distribusi hujan tidak merata 4. Kelembaban tinggi 5. Status kepemilikan sawah belum baik 6. Tingkat pengetahuan dan keterampilan terhadap teknologi baru dalam usahatani kurang. 7. Hama tikus dan babi sering menyerang. 8. Alsintan belum tersedia 9. Pengetahuan teknologi budidaya ikan dan ternak ayam rendah 10. Penyakit Tetelo (ayan) sering menyerang	1. Curah hujan dan lahan memungkinkan pengembangan usahatani dengan diversifikasi dan intensitas tanam lebih tinggi. 2. Lahan subur tersedia cukup luas.	Infrastruktur 1. Prasarana jalan, transportasi & tata air belum memadai. 2. Penyuluhan kurang menyebabkan pengetahuan petani terhadap budidayanya kurang sehingga produktivitas rendah 3. Prasarana dan sarana produksi kurang tersedia, listrik belum ada 4. Modal terbatas. 5. Cara budidaya masih subsistem dan pengendalian hama penyakit tidak ada. 6. Bibit unggul dan sarana produksi belum tersedia. 7. Teknik budidaya & alat-alat penunjang teknologi maju belum ada Perikanan 8. Modal terbatas. 9. Budidaya belum ada dan motivasi usaha rendah. 10. Cara tangkap tradisional dan pengetahuan terbatas. 11. Sumberdaya yang ada (sungai-sungai & rawa belum dimanfaatkan optimal). Peternakan 12. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. 13. Belum pernah dilakukan vaksin terhadap tetelo.	Infrastruktur 1. Peningkatan dan perbaikan jalan, penyediaan alat transportasi dan pengelolaan air. 2. Peningkatan penyuluhan dan arus informasi. 3. Realisasi listrik masuk desa. 4. Penyediaan fasilitas kesehatan dan prasarana ekonomi lainnya. Pertanian 1. Demonstrasi & lot teknik budidaya yang benar dan tepat. 2. Penyediaan saprodi dan kredit usahatani di desa. 3. Penyediaan fasilitas pendukung teknologi maju; bibit; alat-alat usahatani dsb Perikanan 1. Penyediaan saprodi, modal dan informasi yang intensif dan maju. 2. Latihan dan peningkatan kemampuan petani ikan. Peternakan 1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani melalui latihan dan penyuluhan yang intensif. 2. Penyediaan kios pakan dengan harga terkontrol.

(bersambung)

(sambungan)

Karakteristik wilayah	Kendala	Potensi	Penyebab Utama	Alternatif Penanggulangan
4. Kelembagaan sosial ekonomi - Kelompok tani : 3 kel. - KUD (sekecamatan) : 1 bh - Pasar : 1 bh - PPL (sekecamatan) : 1	14. Kemampuan penyediaan modal rendah.	5. Petani terbuka terhadap teknologi baru dan koperatif		
	15. Lembaga perkreditan resmi belum tersedia.			
	16. Aktifitas penyuluhan kurang sekali			

Program	Paket teknologi	Output	Dampak	Lembaga terkait	Skala yang dibutuhkan	Lokasi	Urutan prior.	Sasaran
A. Pertanian								
1. Peningkatan intensitas tanam dan perluasan areal sawah pasang surut	- Demplot/percobaan adopsi varietas, pemupukan, penyediaan hama tikus - Bantuan kredit usahatani - Penyuluhan dan pembinaan	- Paket penggunaan vasilitas - Takaran pemupukan dan obat-obatan - Tanaman padi lebih dari satu kali - Tanaman palawija setelah padi	- Merangsang minat petani untuk menerapkan teknologi baru - Produktivitas lahan sawah meningkat - Mengurangi minat petani mencari sumber pendapatan diluar desanya	Balai Penelitian Dinas Pertanian BPP, PPL	50 ha	Simpang Nungki	1	Petani
2. Bantuan/pembinaan kebun bibit desa	- Teknik pembibitan	- Bibit unggul tanaman buah-buahan	- Petani mudah memperoleh bibit unggul bermutu - Meningkatkan produktivitas dan tersedianya sumber gizi bagi masyarakat	Balai Penelitian Dinas Pertanian Pemakai bibit	1 ha	Simpang Nungki	2	Petani
3. Intensifikasi ternak ayam buras	- Kredit usaha ternak ayam - Penerapan teknologi maju ayam buras - Vaksinasi dan pemberantasan penyakit tetelo (ayam)	- Menekan kematian ternak ayam buras - Peningkatan populasi dan telur dan daging ayam nuras	- Peningkatan produksi daging dan telur ayam buras - Peningkatan pendapatan petani	Dinas Peternakan BPP & WKPP	550 ekor (10 betina + 1 jantan/KK)	Simpang Nungki	1	Petani
4. Pembuatan dan rehabilitasi saluran air/sungai/sumur (Tata Air)	- Bantuan pengerokan sungai - Bantuan pembangunan tata air - Operasi dan pemeliharaan saluran air sungai dan sumur bor - Studi kelayakan	- Kondisi air tersedia - Kualitas air meningkat	- Peningkatan produktivitas lahan dan ikan - Peningkatan produktivitas usahatani	Pemda Tk. I Dinas Pertanian Dinas Perikanan Balai Penelitian		Simpang Nungki	2	Petani/Nelayan
5. Bantuan peralatan tangkap pada petani nelayan	- Bantuan kredit alat-alat tangkap dan alat transportasi (perahu) - Studi kelayakan	- Produksi hasil tangkapan meningkat - Wilayah tangkap meluas	- Peningkatan pendapatan petani/nelayan - Perbaikan taraf hidup petani/nelayan	Balai Penelitian Dinas Perikanan Puslitbang Perikanan BRI Koperasi	6 unit (2 unit/ kelompok)	Simpang Nungki	2	Petani Nelayan
6. Budidaya ikan semi intensif jenis lokal	- Kredit usahatani - Penerapan teknologi tepat guna	- Produksi hasil ikan (papuyu gabus, sepat dan udang) meningkat	- Peningkatan pendapatan petani nelayan	Dinas Perikanan Puslitbang perikanan BRI	4 ha	Simpang Nungki	2	Petani Nelayan
7. Budidaya purun untuk industri anyaman	- Teknik budidaya tanaman - Pengadaan bibit	- Tersedianya purun dan bibit purun	- Peningkatan pendapatan perajin anyaman	Dinas Perindustrian Koperasi, BRI	20 KK	Simpang Nungki	1	Petani Nelayan

(bersambung)

(sambungan)

Program	Paket teknologi	Output	Dampak	Lembaga terkait	Skala yang dibutuhkan	Lokasi	Urutan prior.	Sasaran
B. Non Pertanian								
1. Pengembangan industri rumah tangga anyaman purun	- Pembinaan teknik pembuatan anyaman - Penganekaragaman hasil/bentuk anyaman - Bantuan modal dan alat usaha	- Kualitas dan kuantitas produksi anyaman meningkat	- Peningkatan pendapatan keluarga	Dinas Perindustrian Koperasi, BRI	20 KK	Simpang Nungki	2	Petani Perajin
2. Penyediaan air bersih	- Pembagian MCK	- Tersedia air bersih - Tersedia tempat mandi, cuci dan kakus	- Peningkatan kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan Bangdes	10 MCK	Simpang Nungki	3	Masyarakat
3. Pengadaan KUD	- Bantuan pengadaan	- Tersedia KUD	- Peningkatan pelayanan KUD	Koperasi Bangdes	1 unit	Simpang Nungki	1	Masyarakat
4. Peningkatan kualitas jalan/transportasi	- Perbaikan dan pengerasan jalan	- Kualitas jalan meningkat	- Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat	Bangdes Bappeda Dinas PU		Simpang Nungki	1	Masyarakat

SUMBERDAYA, INFRASTRUKTUR DAN PERMASALAHAN DI DESA TERTINGGAL TABUKAN RAYA, KABUPATEN BATOLA, KALIMANTAN SELATAN

Hidayat Dj. Noor, Danu Ismadi Saderi dan Bambang Prayudi

PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa yang tertinggal, perlu dilakukan inventarisasi dan identifikasi sumber daya dan infrastruktur serta permasalahannya di desa tersebut, sehingga dapat digunakan untuk menentukan arah dan kegiatan pembangunan yang tepat di desa tersebut. Dengan demikian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar dapat mencapai sasaran, yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat di desa tersebut.

Masyarakat desa Tabukan Raya yang termasuk salah satu desa tertinggal di wilayah Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan. Di Kecamatan Tabukan terdapat 21% penduduknya yang masih berada di bawah batas garis kemiskinan.

Desa Tabukan Raya, dulunya termasuk wilayah desa Teluk Tamba yang mulai dibuka pada tahun 1958. Pada tahun 1975 desa Teluk Tamba dimekarkan menjadi dua desa yaitu desa Tabukan dan desa Pantang. Kemudian pada tahun 1982 desa Tabukan dimekarkan lagi menjadi dua desa yaitu Tabukan Raya dan Bandar Karya.

Desa Tabukan Raya berada disepanjang daerah aliran sungai Kapuas/Barito dan kanal "Talaran" (kanal ini selesai dibangun pada tahun 1962). Jarak desa ke Ibukota Kecamatan sejauh 0,5 km, ke ibukota Kabupaten sejauh 30 meter dan ke ibukota Propinsi sejauh 80 km (Anonim, 1992).

Dalam menjalankan tugas pemerintahan Kepala desa Tabukan Raya dibantu oleh enam aparat desa, yaitu Sekretaris desa, Kaur Pemerintahan, Pembangunan dan umum serta dibantu oleh dua kepala dusun atau lingkungan. Desa terbagi dalam enam rukun tetangga (RT). Lembaga pemerintahan yang ada adalah Lembaga Masyarakat Desa (LMD) yang beranggotakan 9 orang, satu sekretaris dan satu ketua. Disamping itu adapula dibentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang beranggotakan 24 orang. Lembaga/organisasi lainnya adalah PKK yang beranggota 24 orang dan jumlah kadernya 13 orang, Hansip/

wanra sebanyak 12 orang serta Karang Taruna dengan jumlah anggota 45 orang. Selain itu ada organisasi keagamaan yaitu kelompok arisan dan pengajian serta kelompok kesenian.

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan cukup lancar, karena selama ini belum ada permasalahan yang dihadapi dalam urusan pemerintahan. Kegiatan administrasi desa sudah berjalan baik, namun masih belum lengkap karena dari 17 buku administrasi desa baru terisi 11 buku. Desa sudah memiliki kantor kepala desa, Balai desa, Ruang LKMD dan PKK.

SUMBER DAYA

1. Sumberdaya Alam dan tatagunanya lahan

Luas wilayah desa Tabukan Raya tercatat 362 ha, yang seluruhnya merupakan daerah dataran rendah yang dipengaruhi pasang surut. Wilayah pasang surut Kalimantan Selatan pada umumnya merupakan lahan marginal yang memiliki sumberdaya dan hasil guna yang sangat terbatas, karena memiliki banyak kendala dalam pengusahaannya. Hal ini terlihat dari data tata guna lahan yang masih terbatas, yang mana hanya digunakan untuk persawahan sederhana pasang surut seluas 20 ha, pekarangan dan perumahan seluas 15 ha serta perkebunan rakyat 1,2 ha dan selebihnya adalah hutan, rawa dan sungai.

Lahan sawah ditanami padi varietas lokal satu kali setahun. Sebagian kecil sawah memiliki guludan yang ditanami pisang, rambutan atau jeruk. Pada tegalan atau pekarangan umumnya ditanami dengan kelapa. Dari hasil wawancara dengan petani dan indikator tanaman di lapangan ternyata produktivitas lahan sawah maupun kebun masih rendah, yaitu rata-rata 2,25 t gabah/ha. Sedangkan pendapatan petani yang memiliki kebun; pendapatan dari pisang (sekitar 10 rumpun atau lebih) hanya berkisar sekitar Rp 50 ribu pertahun dan rambutan dan jeruk Rp 15.000 - 17.500 perpohon/tahun. Produktivitas lahan masih dapat ditingkatkan dengan memberikan input dan pengelolaam yang lebih baik. Hal ini terlihat dari beberapa orang petani yang mencoba menggunakan pupuk di lahan sawahnya dapat memberikan peningkatan hasil padi sampai mencapai 3 t/ha. Demikian juga terlihat kondisi tanaman di kebun yang tidak terpelihara dengan baik, sehingga hasilnya menjadi rendah.

Sumber mata pencaharian penduduk lainnya adalah menangkap ikan di-sungai, kanal dan hutan (galam); memelihara ternak unggas di pekarangan dan mencari kayu (galam) di hutan. Sungai dan kanal selain sebagai lahan untuk menangkap ikan juga berfungsi sebagai prasarana transportasi dan sumber air

bersih untuk penduduk. Ketersediaan air sepanjang tahun dari aliran sungai barito/kapuas memungkinkan dapat dikembangkannya budidaya ikan.

2. Sumber Daya Manusia

Sampai pada tahun 1991, jumlah penduduk desa Tabukan Raya berjumlah 1085 jiwa, dengan 245 kepala keluarga. Distribusi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 37.

Berdasarkan sebaran usia pada Tabel 37, terlihat bahwa jumlah penduduk yang berumur dibawah 15 tahun mencapai 434 jiwa atau 40%. Sedangkan penduduk yang berumur 15 tahun sampai 54 tahun hanya mencapai 592 atau 54,6% serta yang berumur diatas 55 tahun 59 orang atau 5,4%. Berarti angkatan kerja yang nonproduktif sebanding dengan tenaga kerja produktif. Dari jumlah tersebut diatas dapat diartikan bahwa satu orang angkatan kerja harus mampu menghidupi 1,83 penduduk (termasuk dirinya sendiri).

Tabel 37. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia dan jenis kelamin di Desa Tabukan Raya, Kec. Tabukan, Kab. Batola.

Tingkat Usia	Jenis (Jiwa)		Total
	Pria	Wanita	
0 - 4 th	62	60	122
5 - 9 th	78	79	157
10 - 14 th	80	75	155
15 - 19 th	54	58	112
20 - 24 th	43	53	96
25 - 29 th	43	52	95
30 - 34 th	35	30	65
35 - 39 th	31	32	63
40 - 44 th	30	29	59
45 - 49 th	25	30	55
50 - 54 th	23	24	47
> 55 th	28	31	59
Jumlah	532	553	1085

Sumber : Monografi Desa, 1990/91

Berdasarkan perbandingan angkatan kerja dan non angkatan kerja tersebut, maka struktur penduduk secara kuantitas termasuk kategori cukup baik, yaitu tingkat ketergantungan penduduk rendah, kurang dari 1.

Struktur sumberdaya manusia, yang secara kuantitatif cukup baik, akan lebih baik lagi apabila didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai. Adapun jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan seperti pada tabel 38.

Tabel 38. Distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di desa Tabukan Raya, Kec. Tabukan, Kab. Batola.

Tingkat Pendidikan	Jumlah penduduk (jiwa)
1. Tidak/belum pernah sekolah	208
2. Tidak tamat SD/ sederajat	553
3. Tamat SD/ sederajat	195
4. Tamat SLTP/ sederajat	90
5. Tamat SLTA/ sederajat	37
6. Tamat Akademi	2

Sumber : Monografi Desa, 1990/91

Dari tabel 38 terlihat di desa Tabukan Raya tingkat pendidikan penduduk pada umumnya rendah. Dari jumlah penduduk yang belum sekolah mencapai 19,2%, yang tidak tamat SD 51%, tamat SD 18% dan yang tamat SLTP 8,3%, tamat SLTA 3,4% dan Tamat akademi 0,1%.

Dengan kualitas sumber daya manusia seperti yang ada di desa Tabukan Raya ini terlihat kurang mendukung dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan di desa, karena dengan tingkat pendidikan ini terlihat bahwa bidang usaha yang dapat dilakukan umumnya hanyalah bertani secara tradisional. Disamping itu terlihat bahwa mobilitas penduduk tinggi sekali dimana lebih dari 10 persen penduduk tidak menetap, yaitu setelah mereka menanam padi, mereka mencari usaha lain ke luar desa.

INFRASTRUKTUR

1. Prasarana Sosial dan Ekonomi

Tingkat pendidikan penduduk berkaitan erat dengan ketersediaan prasarana pendidikan, tingkat ekonomi dan budaya penduduk. Ketersediaan sarana pendidikan di desa Tabukan Raya hanya berupa satu Sekolah Dasar Negeri dan satu sekolah madrasah (swasta) dengan daya tampung 144 murid. Untuk melanjutkan ke sekolah menengah tingkat pertama atau sekolah tingkat menengah atas tidak ada masalah, karena tersedia SMP dan Aliyah di Kecamatan yang jaraknya hanya 0,5 km.

Meskipun sarana pendidikan cukup tersedia dan terjangkau sampai ke tingkat sekolah lanjutan, namun karena terbentur oleh kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah serta budaya setempat yang sering mengikutkan anak-anaknya membantu orang tua bekerja pada hari-hari dimana anak-anaknya

harus masuk sekolah. Hal ini menyebabkan sekolah anak-anaknya menjadi terbengkalai dan akhirnya tidak dapat meneruskan atau berhenti sekolah. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan penduduk yang banyak tidak tamat SD atau hanya tamat SD (Tabel 38).

Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi juga oleh fasilitas komunikasi. Semakin banyak fasilitas komunikasi yang tersedia, kesadaran penduduk akan informasi semakin besar dan ini akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, inovatif dan berwawasan lebih luas. Fasilitas komunikasi yang ada di desa hanya terbatas pada radio dan televisi. Jumlah radio mencapai 125 buah dan televisi 43 buah. Walaupun jumlah komunikasi ini cukup banyak tetapi dari penggunaannya umumnya masih terbatas sebagai alat penghibur. Belum ada pengorganisasian penduduk dalam usaha untuk mengoptimalkan alat komunikasi tersebut untuk kemajuan pembangunan desa seperti pengorganisasian dalam bentuk Kelompencapir.

Fasilitas yang cukup penting dalam menunjang kesejahteraan dan perekonomian penduduk desa adalah prasarana jalan dan sarana angkutan serta ketersediaan energi seperti listrik. Prasarana jalan masih dominan melalui air (sungai dan kanal). Jalan darat yang baik dan beraspal masih terbatas sampai di kecamatan, sedangkan jalan yang tersedia sampai ke ibukota kabupaten baru bisa dijalani oleh kendaraan sepeda motor pada waktu kering (musim kemarau). Demikian juga sarana angkutan masih didominasi angkutan sungai yaitu perahu bermotor atau tidak bermotor. Waktu tempuh ke ibukota Kabupaten (Marabahan) memerlukan waktu 2 jam, dan ke ibukota kabupaten lainnya yang terdekat (Kuala Kapuas) memerlukan waktu 3 jam serta ke ibukota propinsi (Banjarmasin) memerlukan waktu paling cepat 6 jam. Prasarana jalan dan sarana angkutan yang ada didesa seperti Tabel 39.

Tabel 39. Prasarana jalan dan sarana angkutan di desa Tabukan Raya, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Batola

Jenis	Jumlah/ukuran	Kondisi
1. Jalan Aspal	500 meter	Baik
2. Jalan Tanah	500 meter	Sedang
3. Jalan Sungai	2 buah	Baik
4. Sepeda motor	12 buah	Baik s/d sedang
5. Perahu Motor	28 buah	Baik s/d sedang
6. Sepeda	50 buah	Baik s/d sedang

Sumber : Monografi Desa Th 1991/92

Energi listrik sudah masuk ke Desa mulai dari kecamatan. Pemanfaatan-listrik belum merata dimanfaatkan oleh penduduk, baru sebagian kecil yang memasang listrik. Dari 245 buah rumah didesa baru 90 buah rumah yang dialiri oleh listrik. Sebagian besar penduduk masih menggunakan energi minyak untuk penerangan yaitu dengan menggunakan lampu templok.

Prasarana penting lainnya yang sangat menentukan kualitas sumber daya dan kesejahteraan hidup masyarakat adalah ketersediaan fasilitas kesehatan, sanitasi(kebersihan) dan sumber air bersih. Fasilitas kesehatan yang ada di desa baru berupa pos kesehatan/posyandu, satu kelompok sub PKBD dan 2 kelompok KB, yang kegiatannya 2 kali sebulan. Untuk berobat penduduk desa menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di kecamatan dimana ada Puskesmas dengan tenaga medis langsung ditangani oleh seorang dokter dan dibantu oleh seorang bidan dan satu orang tenaga perawat. Kadang-kadang penduduk pergi ke rumah sakit yang berada di Banjarmasin jika penyakit yang dideritanya cukup parah.

Sumber air minum umumnya masih tergantung dengan air sungai maupun air hujan. Belum ada jaringan air bersih (PDAM) atau sumur bor atau sumber air bersih lainnya. Pada musim kemarau yang panjang, air sungai biasanya tercemar oleh air laut sehingga menjadi asin, penduduk terpaksa harus mencari air bersih mudik lebih jauh lagi ke hulu sungai. Karena itu hampir setiap tahun pada musim kemarau wabah diare dan muntaber selalu ada. Penyakit lain yang umumnya menyerang pada penduduk desa adalah penyakit akibat infeksi seperti influenza, malaria, sakit pernapasan (asma), bronchitis dan penyakit kulit.

2. Kelembagaan dan Kebijakan

Kelembagaan yang terpenting untuk menunjang kesejahteraan penduduk di pedesaan adalah kelembagaan ekonomi desa. Kelembagaan ekonomi pedesaan yang umumnya berkembang adalah kelembagaan yang tidak bersifat formal, tetapi merupakan kelompok/organisasi yang kegiatannya meliputi usaha peningkatan ekonomi, seperti kelompok Tani, kelompok arisan atau kelompok lainnya yang mengarah kepada penumpukan modal atau usaha produksi. Sedangkan kelembagaan ekonomi pedesaan yang berbentuk badan usaha adalah Koperasi, baik itu KUD maupun jenis koperasi lainnya, juga Bank unit Desa. Namun tidak semua desa ada atau terjangkau koperasi (KUD) dan Bank Unit Desa.

Kelompok tani walaupun sebenarnya bukan sebagai lembaga perekonomian tetapi dalam dinamikanya sering melakukan kegiatan perekonomian, yaitu distribusi sarana produksi, pemasaran hasil, penumpukan dan penyediaan modal serta perkreditan.

Di Desa Tabukan Raya belum ada lembaga ekonomi formal berbentuk Badan Usaha, maupun kelompok tani yang dianggap sebagai lembaga non formal. Di Desa Tabukan Raya hanya ada 2 kelompok gotong royong yang usahanya hanya mengatur/melaksanakan kegiatan pembersihan lingkungan dan kegiatan yang bersifat sosial, tidak mengarah pada kegiatan perekonomian atau penumpukan modal. Kalau dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian maka sebagian besar penduduk adalah petani, terutama petani tanaman pangan "Padi". Sebenarnya dengan adanya kelompok tani akan sangat membantu dalam usaha memajukan pertanian dan sekaligus perekonomian penduduk desa Tabukan Raya. Akibat belum adanya lembaga perekonomian baik formal maupun non formal tersebut menyebabkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa menjadi tertinggal.

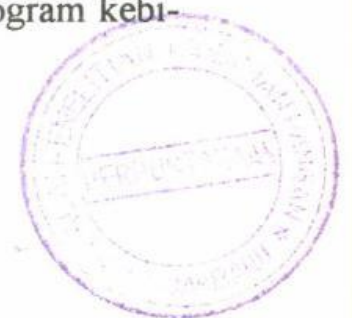
Petani di Desa Tabukan Raya sangat tergantung pada pedagang pengumpul dan pengusaha kios di desa, terutama untuk pemasaran hasil dan memperoleh sarana produksi. Karena itu pedagang pengumpul dan pengusaha kios memegang peranan penting dalam perekonomian desa. Ada cukup banyak pedagang pengumpul, terutama pedagang pengumpul dari kecamatan dan kabupaten yang datang pada hari pasar desa, seminggu sekali. Ada 16 buah kios/warung yang ada di desa Tabukan Raya yang menyediakan keperluan hidup dan sarana usaha/produksi untuk masyarakat desa.

Peranan kelembagaan yang tak kalah pentingnya dalam memajukan perekonomian pedesaan adalah masalah kebijakan. Banyak kebijakan yang telah terprogram atau dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan dan ekonomi penduduk pedesaan seperti kebijakan dalam bidang pertanian seperti intensifikasi, dibidang kesehatan perbaikan menu dan gizi masyarakat, kebijakan dibidang industri rumah tangga, koperasi dan lain-lain. Namun di desa Tabukan Raya kebijakan-kebijakan tersebut belum terprogram, sehingga peranan kebijakan ini belum ada sama sekali, hal ini juga berkaitan dengan keberadaan lembaga formal dan non formal yang belum terbentuk di desa, sehingga program-program kebijakan belum bisa diaktualisasikan.

TINGKAT KESEJAHTERAAN

1. Pendapatan Perkapita

Keterbatasan kualitas sumberdaya dan infrastruktur akan menyebabkan tingkat kesejahteraan dan perekonomian di wilayah tersebut rendah. Hal ini juga dipertajam oleh pembagian pendapatan yang tidak merata.



Sesuai dengan sumber daya dan infrastruktur yang ada di Desa Tabukan Raya menyebabkan banyak penduduk desa yang hidup kurang sejahtera. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pendapatan per kapita desa Tabukan Raya tahun 1991 hanya sebesar Rp. 136.240/kapita/th (Monografi desa, 1991/92). Menurut batasan yang dikemukakan oleh Sayogyo bahwa suatu penduduk desa dikategorikan miskin apabila pendapatan perkapita sebesar 240 kg beras/tahun atau jika dirupiahkan menjadi Rp. 175.920/tahun.

Sumber matapencaharian penduduk yang memberikan pendapatan desa yang tertinggi adalah di sektor tanaman pangan "padi", yaitu sebesar Rp. 85.000.000,-, diikuti oleh kegiatan anyaman purun sebesar Rp. 42.500.000,-, hasil kayu 10.550.000,-, Jasa Rp. 7.980.000 dan ternak Rp. 1.800.000,-

2. Indikator Hidup

Tingkat pendapatan yang rendah hanya akan menghasilkan kualitas hidup yang rendah. Hal ini dapat terlihat pada tingkat konsumsi, Kalori (status gizi), kualitas perumahan dan tingkat kesehatan penduduk serta indikator hidup lainnya yang ada di desa tersebut.

Pada umumnya kebiasaan masyarakat desa Tabukan Raya makan dua kali sehari, dengan pola konsumsi nasi, ikan dan sayur. Ikan segar maupun ikan asin tiap hari selalu dikonsumsi dan jumlahnya tergantung kemampuan masing-masing. Ikan dapat dicari sendiri di sungai atau dengan cara membeli pada penduduk yang mengusahakannya untuk dijual. Sayur tidak dikonsumsi tiap hari. Umumnya penduduk desa mengkonsumsi sayuran 3 sampai 4 kali dalam seminggu, kecuali yang memiliki kebun sayur sendiri di sawah atau pekarangan. Daging atau ayam sangat jarang dikonsumsi, kecuali pada saat kenduri atau selamatan, karena itu makan daging/ayam hanya dua atau tiga bulan sekali. Buah-buahan banyak dimakan pada musim buah, terutama buah-buahan daerah pasang surut yang banyak ditanam sendiri seperti mangga lokal, jeruk, rambutan, kecapi dan nenas. Kebiasaan jajan, terutama pada pagi hari sebelum bekerja dan pada sore hari di warung seperti halnya kebiasaan dahulu penduduk asli Kalimantan Selatan masih membudaya di desa Tabukan Raya ini. Dengan pola makan seperti tersebut diatas sangat mempengaruhi kualitas dan tingkat kesehatan penduduk.

Indikator hidup lainnya disamping pola makan, yang menggambarkan status gizi masyarakat, sebagai indikator hidup adalah kualitas perumahan. Karena kualitas rumah akan berpengaruh terhadap kesehatan penduduk. Indikator hidup yang mengacu pada kualitas perumahan adalah minimum luas bangunan rumah yaitu 40 meter persegi, memiliki ventilasi (jendela), lantai dan dinding yang tidak lembab serta memiliki kakus (wc).

Di desa Tabukan Raya terdapat 247 buah rumah yang rata-rata luasnya kurang dari 40 meter persegi. Dari sejumlah itu 225 buah rumah yang memiliki ventilasi (Jendela), lantai dan dinding. Dari 225 buah rumah ini 200 buah rumah yang memiliki lantai dan dinding yang dan tidak lembab serta 35 buah rumah yang memiliki kakus (wc).

Sumber air minum penduduk adalah sungai sebagian besar penduduk menggunakan air sungai untuk minum dan memasak makanan. Demikian juga sungai (air sungai) dipergunakan untuk mandi dan tempat membuang kotoran. Akibat kondisi ini maka penyakit yang sering menyerang penduduk adalah penyakit infeksi. Hampir tiap tahun (di musim kemarau) diare dan muntaber menyerang penduduk. Penyakit lainnya yang kebanyakan menyerang penduduk adalah influenza, malaria dan asma.

Tingkat kesejahteraan penduduk desa juga dapat diukur dengan tingkat pendidikan. Dengan memperhatikan keadaan tingkat melek huruf di masyarakat. Di desa Tabukan Raya dari usia 10 -55 tahun tidak dijumpai yang buta aksara, dengan demikian tingkat melek huruf cukup tinggi. Hal ini disebabkan di desa Tabukan Raya sudah dilaksanakan kejar paket A bagi mereka yang tidak pernah sekolah yang dilaksanakan oleh PKK desa. Di desa Tabukan Raya pada umumnya tingkat pendidikan penduduk lebih banyak didominasi oleh yang tidak tamat Sekolah Dasar, yaitu 50,96% dan Tamat SD 17,97% serta yang tidak pernah dan belum sekolah mencapai 19,17%.

MASALAH PENGELOLAAN SUMBERDAYA

Uraian pada bab terdahulu menunjukkan bahwa, secara visual penduduk desa Tabukan Raya masih tergolong rendah tingkat kesejahterannya, tetapi ada beberapa potensi yang dimiliki desa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Disamping itu berbagai masalah dan kendala harus dipecahkan agar tujuan peningkatan kesejahteraan itu dapat tercapai.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk perlu diatur strategi yang sistematis dengan mempertimbangkan potensi, masalah dan kendala yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan, serta alternatif pemecahan yang dapat dilaksanakan berdasarkan atas pengamatan lapang. Strategi yang akan diterapkan dibagi beberapa bagian yang saling berkaitan/terpadu.

1. Pemanfaatan Sumberdaya Biofisik

Yang mendominasi permasalahan pada sumberdaya biofisik adalah tanah dan air, produktivitas tanaman, ternak dan ikan, serta faktor iklim sebagai faktor

penunjang. Permasalahan pada berbagai faktor tersebut di atas yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk desa Tabukan Raya.

Faktor iklim besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman, yaitu jumlah curah hujan dan sebarannya serta suhu udara. Iklim di Desa Tabukan Raya seperti juga didaerah pasang surut lainnya di Kabupaten Barito Kuala memiliki jumlah curah hujan yang tinggi yaitu 2000-3000 mm pertahunnya dengan memiliki bulan basah sampai 9 bulan. Suhu harian rata-rata berkisar 24 sampai 34°C. Data curah hujan dan sebarannya perbulan serta jumlah hari hujan per bulan dapat dimanfaatkan untuk menyusun. Bila keadaan curah hujan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menyusun pola tanam (terutama untuk tanaman pangan), usahatani akan lebih tepat dan lebih mudah pemeliharaannya sehingga produksi dapat lebih tinggi dan terhindar dari resiko kegagalan panen.

Ditinjau dari gerakan pasang surut air, sebagian lahan yang terletak dekat aliran sungai termasuk lahan tipe A dan lahan yang didarat termasuk lahan tipe B. Rata-rata petani memiliki lahan (sawah) 1,0 ha, Namun kebanyakan sawah mereka berada di luar desa dan hanya sebagian kecil yang berada di desa yaitu sekitar 20 Ha. Hampir semua lahan sudah dibuka dan hanya tersisa untuk hutan negara 1,2 Ha, sehingga petani banyak yang membuka lahan keluar desa.

Pemilikan lahan (sawah) petani cukup luas, namun memiliki beberapa kendala yaitu mempunyai tingkat kesuburan rendah, kahat P dan Ca serta memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Disamping itu mengandung firit yang dapat meracuni tanaman jika pengelolaannya tidak tepat.

Di daerah lahan tipe A (dekat aliran sungai), kualitas air yang masuk langsung dari sungai Barito-Kapuas kualitasnya cukup baik dan kaya akan unsur hara sehingga tanamam padi dapat tumbuh dengan baik. Masalah yang timbul adalah tingginya genangan air pasang masuk kesawah, lebih-lebih pada musim penghujan. Karena itu petani lebih suka menanam padi varietas lokal yang adaptif pada kondisi tersebut. Tinggi genangan air disawah pada lahan tipe A bisa mencapai 50 cm lebih, sedangkan pada tipe B paling tinggi 25 cm. Kendala lain yang dihadapi adalah masuknya air asin ke lahan sawah pada musim kemarau panjang.

Didaerah lahan tipe B (yang jauh dari sungai Barito-Kapuas), air hanya masuk ke lahan (sawah) hanya pada waktu pasang. Di tipe lahan ini lebih banyak diharapkan air hujan untuk proses pencucian dibanding air sungai yang hanya ada pada waktu pasang. Untuk memperlancar air sungai keluar-masuk lahan (sawah) pada saat pasang-surut di buat satu kanal/anjir dengan kanal-kanal sekundernya dari sungai Barito-Kapuas. Kanal/anjir ini berfungsi juga sebagai prasarana

angkutan, sumber air minum, mandi dan mencuci serta tempat membuang kotoran.

Padi merupakan tanaman dan sumber mata pencaharian utama penduduk desa Tabukan Raya. Padi yang ditanam adalah padi varietas lokal, yang ditanam satu tahun sekali, baik pada tipe lahan A maupun B. Budidaya yang dilakukan petani masih tradisional tanpa menggunakan cara-cara budidaya yang intensif seperti pengolahan tanah, penyiangan, pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit. Penyiapan lahan biasanya dilakukan pada bulan Desember-Januari, yaitu pada saat genangan air disawah mulai tinggi 10 sampai 25 cm. Penyiapan lahan dilakukan hanya dengan membabat rumput dengan menggunakan "tajak". Tebasan vegetasi kemudian dikumpulkan dan di tumpuk-tumpuk atau digulung-gulung, yang kemudian dibolak-balik agar cepat membusuk. Pada waktu tanam vegetasi yang sudah membusuk disebar merata di sawah. Persiapan bibit dilakukan sebelum persiapan lahan, dan dilakukan secara bertahap yaitu mulai dengan menugal benih ("tardak"), kemudian pembesaran bibit pertama ("ampak") dan kedua ("lacak"). Persiapan bibit ini dilakukan 4 sampai 5 bulan dan ini dimaksudkan selain untuk perbanyak bibit, juga dimaksudkan untuk mendapatkan bibit yang kuat dan yang tinggi sehingga dapat ditanam pada genangan air yang tinggi. Penanaman dilakukan pada bulan Maret-April, pada saat genangan air mulai turun, yaitu 10 sampai 15 cm. Kebiasaan petani setelah tanam, sawah mereka ditinggalkan dan mencari pekerjaan keluar desa dan pada waktu panen mereka datang kembali dengan membawa bekal (uang) untuk biaya panen. Panen dilakukan pada bulan Agustus-september, di musim kemarau, dimana air di sawah sudah kering sama sekali. Panen biasanya di upahkan, yaitu dengan sistem tebus (Rp. 500/blek), atau sistem bagi hasil (5:1). Selama panen, makan minum pemanen ditanggung oleh pemilik. Pemanen biasanya datang dari luar desa. Rata-rata hasil padi yang didapat mencapai 2,5 sampai 3 ton/ha. Penggunaan varietas lokal dengan waktu produksi yang cukup lama membuat petani hanya dapat mengusahakan tananam padi satu kali setahun, dan peluang perluasan lahan sawah yang terbatas, akan menyebabkan peningkatan produksi padi, sulit dicapai.

Selain tanamam pangan, Tanaman keras seperti jeruk, rambutan, sawo dan pisang dan kelapa cukup tumbuh dengan baik. Biasanya tanaman keras ini ditanam di galangan-galangan sawah atau diatas tukungan (guludan) yang sengaja dibuat untuk tanaman tersebut. Kelapa lebih banyak ditanam di pekarangan di daerah tepi sungai besar. Hasil tanaman keras ini sebenarnya cukup tinggi jika dipelihara dengan baik, namun karena penduduk sering pergi sehingga pemberihannya hanya dilakukan pada saat yang bersamaan dengan persiapan lahan untuk padi. Dari hasil wawancara dengan petani yang tanaman kerasnya dipeli-

hara dengan baik, dengan 10 rumpun pisang, penghasilan tambahan dapat dicapai sampai 75 ribu rupiah/th, 1 pohon rambutan dapat menghasilkan 10 sampai 15 ribu rupiah/th dan 1 pohon jeruk mencapai 25 ribu rupiah/th. Namun tidak semua petani memiliki pohon jeruk dan rambutan, dan yang memiliki juga terbatas, paling banyak 10 pohon. Masalah utama yang dihadapi petani dalam penanaman tanaman buah-buahan ini adalah kondisi lahan rawa (pasang-surut) yang harus memerlukan tenaga dan biaya yang cukup besar dalam pembuatan guludannya, dan ini tidak dimiliki petani.

Ternak ayam buras cukup potensial dan banyak dipelihara oleh penduduk desa. Namun cara pemeliharaan petani yang kurang intensif, sehingga laju pertumbuhannya kurang. Rata-rata pemilikan sekitar 3 ekor induk betina dan rata-rata hasil perbulan yang dijual 1 sampai 2 ekor. Hambatan pemeliharaan yang utama adalah penyakit ayam yang selalu datang dan bisa menghabiskan hampir semua ayam didesa. Akibatnya penduduk tidak berani memelihara ayam dalam jumlah besar dan sepanjang tahun.

Ternak kambing dan sapi sebenarnya dapat juga di pelihara, namun memerlukan modal dan pemeliharaan yang lebih intensif dengan sistem kandang. Walaupun padang penggembalaannya tidak ada, namun potensi makanan cukup tersedia. Ada beberapa petani yang memiliki ternak kambing, ternyata cukup berhasil.

Usaha lain yang dilakukan penduduk adalah mencari ikan, karena desa terletak ditepian sungai besar Barito-Kapuas. Usaha budidaya ikan memberikan peluang yang cukup besar, namun diperlukan keterampilan, modal dan pembiayaan yang intensif untuk keberhasilannya.

Teknologi yang digunakan petani dalam mengelola sumberdaya alam, terutama untuk tanaman pangan padi, masih sangat sederhana (tradisional). Penggunaan tenaga kerja cukup rendah 70-80 HOK. Kegiatan yang banyak menggunakan tenaga adalah pada waktu penyiapan lahan, tanam dan panen. Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja pada saat yang diperlukan, terutama pada penanaman, dilakukan gotong royong dengan sistem "Handep", yaitu petani berkelompok untuk melakukan kerja secara bergilir. Setelah tanam petani (terutama Bapak tani) pergi keluar desa mencari pekerjaan (Off farm) seperti menebang kayu, mendulang, memburuh atau sebagian lagi mencari ikan. Setelah tanam padi, tidak dilakukan pemeliharaan, baik penyiangan, pemupukan maupun pemberantasan hama penyakit. Pemeliharaan dilakukan hanya sekedar menebas tepi galangan sawah yang banyak dilakukan oleh ibu-ibu tani sambil menanam sayuran ala kadarnya dan inipun terbatas di lahan sawah yang tidak jauh dari rumah.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Tenaga produktif (umur 15 - 55 tahun) yang tersedia di desa cukup potensial yaitu 592 orang. Ditinjau dari teknologi tanaman pangan yang dilaksanakan dan kesempatan bekerja off-farm yang cukup besar maka HOK yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal hal ini menunjukkan masih mempunyai peluang untuk digunakan pada kegiatan lain misalnya menerapkan teknologi baru.

Masalahnya sekarang bagaimana merubah kebiasaan dan teknologi yang ada dan meningkatkan pengetahuan mereka agar tenaga kerja yang ada ini benar-benar dapat dikelola secara baik dan efisien, sehingga kemajuan dan peningkatan produksi didesa lebih tinggi.

Pengalaman berusahatani dan bekerja (Off-farm) penduduk desa ini hanya dengan teknologi yang turun-temurun. Mereka masih belum banyak tahu tentang teknologi baru dalam berusahatani dan bekerja. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan petani, dimana mereka mengetahui dan ingin mencoba teknologi baru seperti pemupukan, penyemprotan dan lain-lainnya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mendapatkannya dan bagaimana cara menggunakannya. Meskipun sudah ada satu dua orang petani yang mencoba menggunakan pupuk buatan (Urea dan TSP), walaupun pelaksanaannya kurang tepat, dosis dan cara serta waktu pemberiannya, tetapi cukup memberikan hasil yang memuaskan, karena hasil yang didapatnya lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan wawasan dan keterampilan berusaha ibu-ibu tani, yang memegang peranan yang besar dalam berusahatani, memelihara anak, pendidikan dan kesehatan keluarga, sangat besar artinya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan perekonomian desa. Demikian juga terhadap anak-anak, pemuda tani yang umumnya cenderung meninggalkan sekolah dan usahatani keluarga untuk menjadi buruh (bekerja) di perusahaan kayu, seperti plywood.

3. Permasalahan modal dan kelembagaan

Modal berupa uang tunai dari penduduk untuk berusahatani atau berusaha lainnya tidak tersedia, modal utama mereka hanyalah tenaga kerja yang tersedia. Hasil Usahatani dan off-farm mereka, sebenarnya tidak cukup dan selalu habis untuk biaya keperluan hidup sehari-hari. Di lain pihak petani hanya mengandalkan padi sebagai sumber pendapatan utamanya. Jika harga padi rendah, pendapatan petani menjadi rendah.

Usaha-usaha berkelompok kearah penghimpun modal belum ada terpikirkan. Untuk modal usahatani, kadang-kadang petani meminjam kepada pedagang pengumpul atau pengusaha kios di desa yang biasanya pada waktu panen dibayar dengan padi. Selain harga jual padi pada saat panen yang rendah, KUD yang diharapkan dapat menampung hasil padi petani dengan harga yang

baik belum ada, sehingga petani selalu mendapat nilai yang lebih rendah dalam harga jual hasil produksinya, dan pendapatan petani menjadi rendah.

Belum adanya kelembagaan dan kebijakan yang dapat membantu petani dalam peningkatan produksi, melalui penyediaan modal, sarana produksi, penyuluhan teknologi dan plot demonstrasi, menyebabkan petani tetap menggunakan cara-cara berusahatani tradisional dan produksi yang dicapai masih rendah.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Tingkat kemiskinan penduduk desa Tabukan Raya ditandai oleh tingkat pendapatan perkapita yang rendah dan berada dibawah katagori kemiskinan yaitu hanya Rp. 136.000/kapita/th. Disamping itu juga keberadaan infrastruktur yang belum memadai dan tingkat kesehatan penduduk yang kurang.

Dukungan sumber daya biofisik yang rendah dan bermasalah serta kualitas sumber daya manusia yang rendah menyebabkan tingkat pengelolaan sumber daya alam menjadi rendah dan dengan cara tradisional, sehingga produksi yang dihasilkan juga rendah.

Guna meningkatkan kesejahteraan penduduk desa Tabukan Raya perlu kebijakan yang tepat dan sesegera mungkin terhadap peningkatan produksi padi yang menjadi sumber mata pencaharian utama penduduk dan pengelolaan sumberdaya alam lainnya seperti pembinaan perkebunan buah-buahan, kelapa, usaha peternakan dan usaha ayam rumah tangga purun. Selain itu didukung pula oleh kebijakan lain dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan petani akan teknologi berusaha, kebijakan pemenuhan gizi dan kesehatan masyarakat. Membentuk Kelompok Tani, kelompokcapir serta adanya KUD yang bergerak di desa Tabukan Raya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1992. Monografi Desa Tabukan Raya. Tahun 1991/1992. Pemerintah Desa Tabukan Raya, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Batola, Propinsi Kalimantan Selatan.

- Anonim. 1969. Inventarisasi Istilah dan Alat-Alat Pertanian (Handtools) Pasang Surut Kalimantan Selatan. Team Inventarisasi Pasang Surut. Proyek Pengairan Kalimantan, Banjarmasin.
- Idak, H. 1982. Perkembangan dan Sejarah Persawahan di Kalimantan Selatan.
- Sayogyo. 1982. Menelaah Garis Kemiskinan. Makalah dalam Lokakarya Metodologi Kaji Tindak Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Kecil 20-30 Desember. IPB. Cisarua.

ISBN : 979-8253-28-0

B